

**MENGUMUMKAN INFORMASI TENTANG PROGRAM
DAN KEGIATAN SEDANG DIJALANKAN**

1. LAPORAN KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2026 :

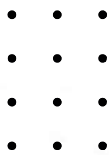
https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/LKJ_BBPBL_Lampung_TW_I_2026.pdf

2. RENCANA KERJA 2026 :

https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/RENCANA_KERJA_TAHUNAN_BBPBL_Lampung_20262.pdf

3. RENSTRA 2025 – 2029 :

https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Kepdirjen_No_473_Th_2025_RENSTRA_2025-2029_DJPB.pdf



LAPORAN KINERJA

TW I - 2026

Disusun Oleh
BALAI BESAR PERIKANAN
BUDI DAYA LAUT LAMPUNG

Contact
(0721) 4001379/4001380

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Satker BBPBL Lampung Triwulan I Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPBL Lampung selama Triwulan I Tahun 2026, serta sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai tingkat capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam laporan ini disajikan berbagai informasi terkait capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk kendala yang dihadapi dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan kinerja BBPBL Lampung di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kinerja BBPBL Lampung secara berkelanjutan.

Lampung, 17 April 2026
Kepala BBPBL Lampung,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Supito, S.Pi, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Triwulan I Tahun 2026, kinerja BBPBL Lampung menunjukkan arah yang positif dan terkendali, dengan capaian kinerja yang secara umum berada di atas target serta didukung oleh pemanfaatan anggaran yang efisien. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif serta selaras dengan perencanaan yang ditetapkan.

Kinerja pada bidang teknis, khususnya perikanan budi daya ikan air laut, memperlihatkan akselerasi yang signifikan, ditandai dengan capaian beberapa indikator yang melampaui target secara substansial, terutama pada layanan pengujian laboratorium dan kegiatan surveillance. Di sisi lain, fungsi dukungan manajemen juga menunjukkan penguatan, tercermin dari meningkatnya kualitas tata kelola, transparansi pengadaan, serta optimalnya layanan perkantoran.

Dari perspektif keuangan, realisasi anggaran yang mencapai 15,22% dengan capaian efisiensi 101,46% terhadap target triwulanan mengindikasikan bahwa strategi pengendalian belanja dan pelaksanaan kegiatan berjalan secara disiplin dan terukur. Kondisi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kinerja dan penggunaan sumber daya, sehingga menghasilkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas output.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan strategis yang belum terealisasi pada triwulan ini, terutama yang berkaitan dengan pengadaan, produksi, dan indikator manajerial tertentu. Hal ini merupakan bagian dari dinamika awal tahun anggaran dan akan menjadi fokus percepatan pada triwulan berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian Triwulan I ini memberikan landasan yang kuat untuk pencapaian target tahunan. Ke depan, diperlukan percepatan implementasi program, penguatan monitoring dan evaluasi, serta konsistensi dalam menjaga efisiensi dan efektivitas anggaran, guna memastikan seluruh sasaran strategis dapat tercapai secara optimal.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Tabel

Daftar Gambar

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I	Pendahuluan	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	1
	1.3. Tugas dan Fungsi	2
	1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia	5
	1.5. Potensi dan Permasalahan	7
	1.5.1. Potensi yang Dimiliki	7
	1.5.2. Permasalahan Utama	8
	1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	9
BAB II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	11
	2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	11
	2.1.1. Visi	11
	2.1.2. Misi	11
	2.1.3. Tujuan	12
	2.1.4. Sasaran Kegiatan	13
	2.1.5. Arah dan Kebijakan	13
	2.2. Perjanjian Kinerja BBPBL Lampung	14
	2.3. Pengukuran Capaian Kinerja TW I - 2026	15
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	18
	3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
	3.2. Analisis Capaian Kinerja	20
	a. SK 1. Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air tawar.....	20
	- IKU 1. Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan BBPBL Lampung	20

b. SK 2. Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	23
- IKU 2. Calon induk unggul ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung.	23
- IKU 3. Benih ikan air laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung	27
- IKU 4. Benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung	29
- IKU 5. Sampel uji laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan ikan air laut oleh BBPBL Lampung	36
- IKU 6. Sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji oleh BBPBL Lampung	40
- IKU 7. Sampel surveillance resistensi antimikroba ikan air laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BBPBL Lampung	45
c. SK 3. Terkelolanya sistem perikanan budi daya air payau	49
- IKU 8. Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) BBPBL Lampung	49
d. SK 4. Terkelolanya sistem prasarana dan sarana perikanan budi daya	52
- IKU 9. Sarana perikanan budi daya yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung	52
e. SK 5. Terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut	57
- IKU 10. Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung	57
f. SK 6. Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung	60
- IKU 11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker BBPBL Lampung	60
- IKU 12. Penilaian Mandiri SAKIP BBPBL Lampung	63
- IKU 13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPBL Lampung	67
- IKU 14. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPBL Lampung	71
- IKU 15. Indeks Profesionalitas ASN BBPBL Lampung	74
- IKU 16. Nilai pengawasan kearsipan satker BBPBL Lampung	77
- IKU 17. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BBPBL Lampung	79
- IKU 18. Indeks pengelolaan SDM satker BBPBL Lampung	84
- IKU 19. Pelayanan keterbukaan informasi publik satker BBPBL Lampung ...	88
- IKU 20. Persentase layanan perkantoran satker BBPBL Lampung	92
- IKU 21. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan unit kerja yang berpredikat menuju WBK	94
- IKU 22. Indeks layanan perpustakaan satker BBPBL Lampung	98

	3.3. Analisis capaian kinerja keuangan	101
	3.3.1. Efisiensi penggunaan sumber daya	103
BAB IV	Penutup	105
	4.1. Kesimpulan	105
	4.2. Permasalahan	106
	4.3. Rekomendasi	106



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sasaran Kegiatan Tahun 2026	13
Tabel 3.1.	Pencapaian Indikator Kinerja Utama BBPBL Lampung TW I - 2026	18
Tabel 3.2.	Capaian Sasaran Kegiatan 1, pada IKU 1	20
Tabel 3.3.	Data perbandingan capaian tersedianya peralatan laboratorium lingkup UPT laut	20
Tabel 3.4.	Capaian Sasaran Kegiatan 1, pada IKU 2	23
Tabel 3.5.	Data ketersediaan calon induk dan induk ikan air laut	23
Tabel 3.6.	Data perbandingan capaian produksi calon induk ikan laut lingkup UPT laut	24
Tabel 3.7.	Data monitoring kualitas air di KJA	25
Tabel 3.8.	Capaian Sasaran Kegiatan 2, pada IKU 3	27
Tabel 3.9.	Data perbandingan capaian benih ikan laut yang diproduksi lingkup UPT laut	27
Tabel 3.10.	Capaian Sasaran Kegiatan 2, pada IKU 4	29
Tabel 3.11.	Data distribusi bantuan benih ikan laut	30
Tabel 3.12.	Sebaran lokasi dan jumlah penerima bantuan benih ikan laut	32
Tabel 3.13.	Data bantuan benih ikan laut per komoditas	32
Tabel 3.14.	Data perbandingan capaian bantuan benih ikan laut untuk lingkup UPT laut	34
Tabel 3.15.	Capaian Sasaran Kegiatan 2, pada IKU 5	36
Tabel 3.16.	Data jumlah sampel uji kualitas air berdasarkan ruang lingkup TW I - 2026	37
Tabel 3.17.	Data perbandingan capaian sampel uji laboratorium lingkup UPT laut	38
Tabel 3.18.	Capaian Sasaran Kegiatan 2, pada IKU 6	40
Tabel 3.19.	Data sampel monitoring penyakit ikan air laut berdasarkan parameter pengujian	41
Tabel 3.20.	Data perbandingan capaian sampel monitoring penyakit ikan laut lingkup UPT laut ..	42
Tabel 3.21.	Capaian Sasaran Kegiatan 2, pada IKU 7	45
Tabel 3.22.	Perincian sampel AMU/AMR.....	45
Tabel 3.23.	Data perbandingan capaian sampel AMU/AMR lingkup UPT laut	47
Tabel 3.24.	Data hasil identifikasi isolate bakteri	48
Tabel 3.25.	Capaian Sasaran Kegiatan 3, pada IKU 8	49
Tabel 3.26.	Data perbandingan capaian produksi pakan ikan air laut lingkup UPT laut	49
Tabel 3.27.	Harga Perkiraan Sendiri untuk produksi pakan ikan laut	51
Tabel 3.28.	Capaian Sasaran Kegiatan 4, pada IKU 9	52
Tabel 3.29.	Data usulan aspirasi bantuan bioflok dan mesin pakan	52

Tabel 3.30.	Data usulan bantuan bioflok yang telah diterima BBPBL Lampung	53
Tabel 3.31.	Data usulan bantuan mesin dan bahan baku pakan yang telah diterima	53
Tabel 3.32.	Data perbandingan capaian sarana perikanan budidaya lingkup UPT laut	54
Tabel 3.33.	Capaian Sasaran Kegiatan 5, pada IKU 10	57
Tabel 3.34.	Data penerima bantuan bibit rumput laut	57
Tabel 3.35.	Data perbandingan capaian bantuan bibit rumput laut lingkup UPT laut.....	58
.Tabel 3.36.	Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 11	60
Tabel 3.37.	Data perbandingan capaian rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT laut	61
Tabel 3.38.	Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 12	63
Tabel 3.39.	Data perbandingan capaian nilai PM SAKIP untuk lingkup UPT laut.....	64
Tabel 3.40.	Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 13	67
Tabel 3.41.	Data perbandingan capaian IKPA lingkup UPT laut	68
Tabel 3.42.	Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 14	71
Tabel 3.43.	Pagu Anggaran berdasarkan kegiatan	71
Tabel 3.44.	Data perbandingan capaian NKPA lingkup UPT laut	72
Tabel 3.45.	Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 15	74
Tabel 3.46.	Data perbandingan capaian IP ASN lingkup UPT laut	75
Tabel 3.47.	Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 16	77
Tabel 3.48.	Data perbandingan capaian pengawasan kearsipan untuk lingkup UPT laut..	78
Tabel 3.49.	Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 17	79
Tabel 3.50.	Data perbandingan capaian RUP PBJ untuk lingkup UPT laut..	82
Tabel 3.51.	Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 18	84
Tabel 3.52.	Data perbandingan capaian pengelolaan SDM untuk lingkup UPT laut..	86
Tabel 3.53.	Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 19	88
Tabel 3.54.	Data perbandingan capaian keterbukaan informasi publik lingkup UPT laut.....	89
Tabel 3.55.	Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 20	92
Tabel 3.56.	Data perbandingan capaian layanan perkantoran lingkup UPT laut	93
Tabel 3.57.	Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 21	94
Tabel 3.58.	Data perbandingan capaian nilai minimal WBK lingkup UPT laut..	96
Tabel 3.59.	Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 22	98
Tabel 3.60.	Data perbandingan capaian indeks layanan perpustakaan lingkup UPT laut.	99
Tabel 3.61.	Capaian realisasi keuangan TW I – 2026	101
Tabel 3.62.	Rincian realisasi anggaran TW I – 2026	102
Tabel 3.63.	Efisiensi anggaran TW I – 2026	104



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur organisasi BBPBL Lampung (sebelum perubahan)	3
Gambar 1.2.	Perubahan struktur organisasi BBPBL Lampung	3
Gambar 1.3.	Data jumlah pegawai BBPBL Lampung	5
Gambar 1.4.	Data jumlah pegawai BBPBL Lampung berdasarkan gender	5
Gambar 1.5.	Data pegawai BBPBL Lampung berdasarkan tingkat pendidikan	6
Gambar 1.6.	Data ASN BBPBL Lampung berdasarkan pangkat	6
Gambar 2.1.	Penetapan Kinerja BBPBL Lampung 2026	15
Gambar 2.2.	Screenshoot capaian kinerja TW I - 2026	17
Gambar 3.1.	Uraian penggunaan vitamin	25
Gambar 3.2.	Diagram bantuan benih ikan laut per komoditi	33
Gambar 3.3.	Kegiatan penyerahan bantuan benih ikan laut	33
Gambar 3.4.	Daftar rekapitulasi proposal yang masuk ke BBPBL Lampung	35
Gambar 3.5.	RAB pengiriman bantuan benih ikan laut	35
Gambar 3.6.	Diagram jumlah sampel berdasarkan ruang lingkup	37
Gambar 3.7.	Kegiatan pengambilan sampel kualitas air	38
Gambar 3.8.	Diagram jumlah sampel berdasarkan parameter	41
Gambar 3.9.	Kegiatan pengambilan sampel monitoring penyakit ikan air laut	42
Gambar 3.10.	Diagram jumlah sampel berdasarkan jenis sampel ikan	46
Gambar 3.11.	Kegiatan pengambilan sampel AMU/AMR	46
Gambar 3.12.	Kegiatan monitoring lapangan pada tahap produksi	55
Gambar 3.13.	Kegiatan bimtek operasional bioflok dan mesin pakan	55
Gambar 3.14.	Kerjasama dengan penyuluh terkait dukungan teknis	56
Gambar 3.15.	Kegiatan penyaluran bantuan bibit rumput laut	58
Gambar 3.16.	Kegiatan monitoring bantuan bibit rumput laut 2025	59
Gambar 3.17.	Capaian rekomendasi hasil pengawasan TW I – 2026	61
Gambar 3.18.	Dokumen manual IKU sesuai Permen KP no 35 tahun 2023	66
Gambar 3.19.	Capaian IKPA 2025	69
Gambar 3.20.	Capaian IKPA TW I – 2026	70
Gambar 3.21.	Capaian realisasi belanja 053 pada TW I – 2026	73
Gambar 3.22.	Pengumuman pemakaian superapp	78
Gambar 3.23.	Capaian RUP PBJ BBPBL Lampung TW I – 2026	81

Gambar 3.24.	Penyesuaian RUP dengan anggaran 2026	83
Gambar 3.25.	Pemutakhiran data RUP PBJ	83
Gambar 3.26.	Pengumuman terkait KP/KJ	87
Gambar 3.27.	Kegiatan Forum Konsultasi Publik	91
Gambar 3.28.	Monev SOP Pelayanan Publik	93
Gambar 3.29.	Rapat pembahasan hasil reuiu Inspektorat III	97
Gambar 3.30.	Tambahan bahan Pustaka	100
Gambar 3.31.	Realisasi anggaran TW I – 2026 (sumber OM-SPAN)	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap satuan kerja diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja disusun secara berkala, salah satunya dalam bentuk laporan Triwulanan, guna memantau capaian kinerja secara periodik serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja ke depan.

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan budidaya perikanan laut. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BBPBL Lampung telah menetapkan berbagai indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja BBPBL Lampung selama periode Januari sampai dengan Maret 2026. Selain itu, laporan ini juga memuat analisis terhadap capaian indikator kinerja, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahunan.

Melalui penyusunan laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel mengenai kinerja organisasi, serta menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kinerja pada periode selanjutnya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk menyajikan informasi mengenai pelaksanaan dan capaian kinerja BBPBL Lampung secara periodik.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Mengetahui tingkat capaian indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2026.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Menyusun langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.
4. Menyediakan data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020, tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, mempunyai tugas : **Melaksanakan Uji Terap Teknik dan Kerjasama, Pengelolaan Produksi, Pengujian Laboratorium, Mutu Pakan, Residu, Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Bimbingan Teknis dan Pengelolaan Sistem Informasi di Bidang Perikanan Budidaya Laut.**

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka Balai Besar Perikanan Budidaya Laut mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang perikanan budidaya laut;
2. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut;
4. Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
5. Pelaksanaan kerjasama teknis perikanan laut;
6. Pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. Pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian;
10. Pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
11. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

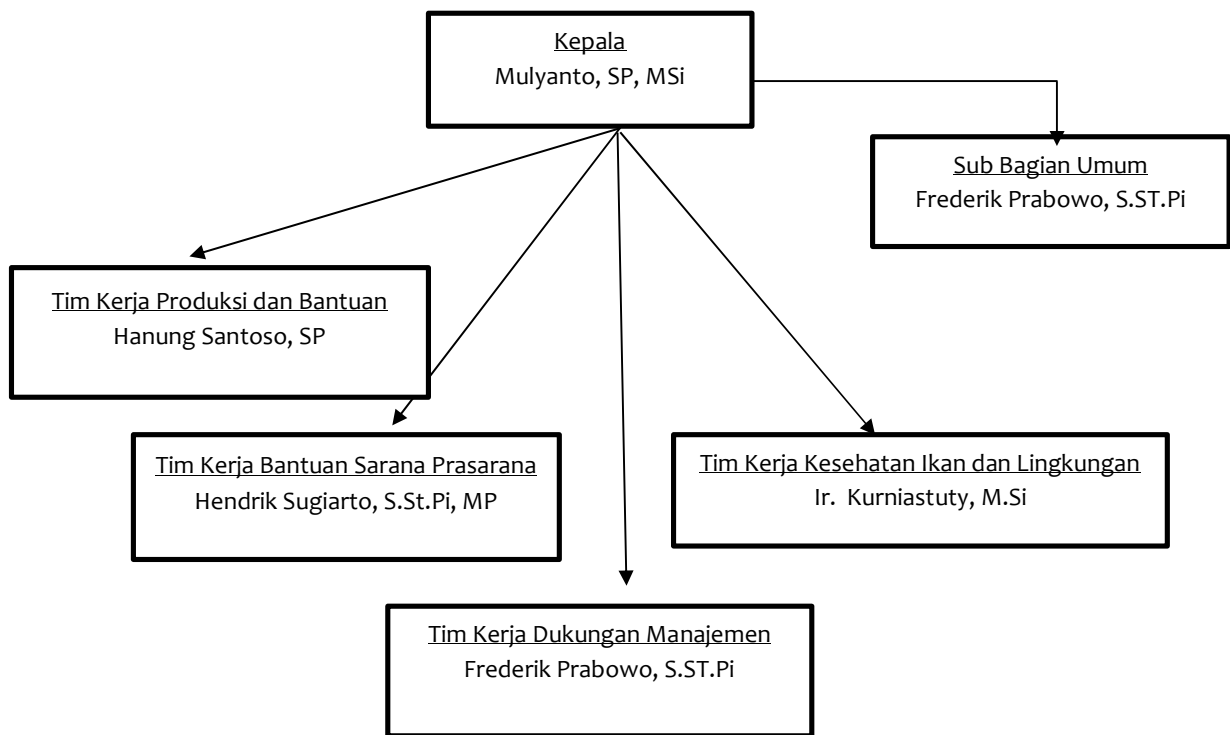
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya.

Seiring dengan dinamika organisasi, telah ditetapkan Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07/MEN-KP/KP.430/II/2022 tentang pengangkatan Kepala BBPBL Lampung yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Mulyanto, S.T., M.Si.

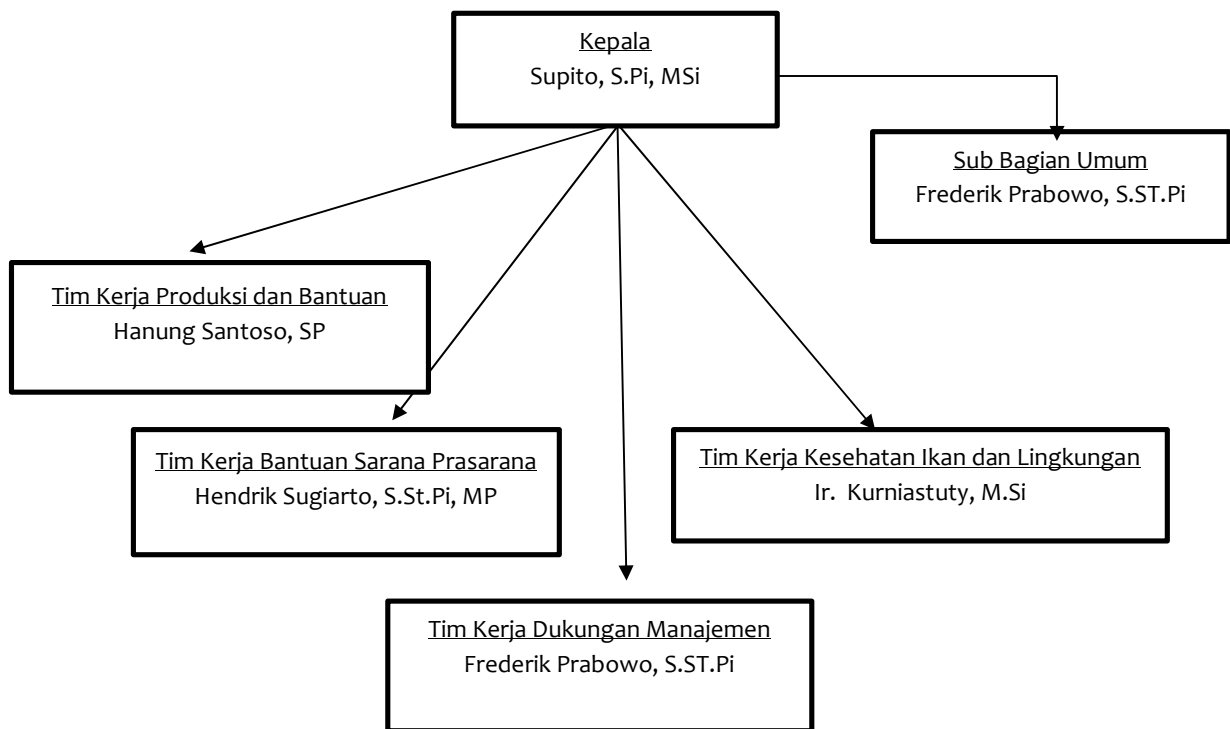
Selanjutnya, berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN-KP/KP.430/III/2026 tanggal 4 Maret 2026, terjadi perubahan kepemimpinan dengan pengangkatan Bapak Supito, S.Pi., M.Si sebagai Kepala BBPBL Lampung.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, telah ditetapkan pula Surat Tugas Nomor B.415/BBPBL/OT.210/I/2026 tentang Tim Kerja Lingkup BBPBL Lampung. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, struktur organisasi BBPBL Lampung disusun guna menjamin terselenggaranya tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun struktur organisasi BBPBL Lampung adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur organisasi BBPBL Lampung (Sebelum perubahan)



Gambar 1.2. Perubahan struktur organisasi BBPBL Lampung

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

1. KASUBAG UMUM

Mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :

penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

2. TIM KERJA PRODUKSI DAN BANTUAN

Bertanggung jawab terhadap pencapaian IKU (2) Calon induk unggul ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung; (3) Benih ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung; (4) Benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung; (8) Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) BBPBL Lampung; (10) Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung

3. TIM KERJA SARANA PRASARANA

Bertanggung jawab terhadap pencapaian IKU (9) Sarana perikanan budidaya yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung

4. TIM KERJA KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

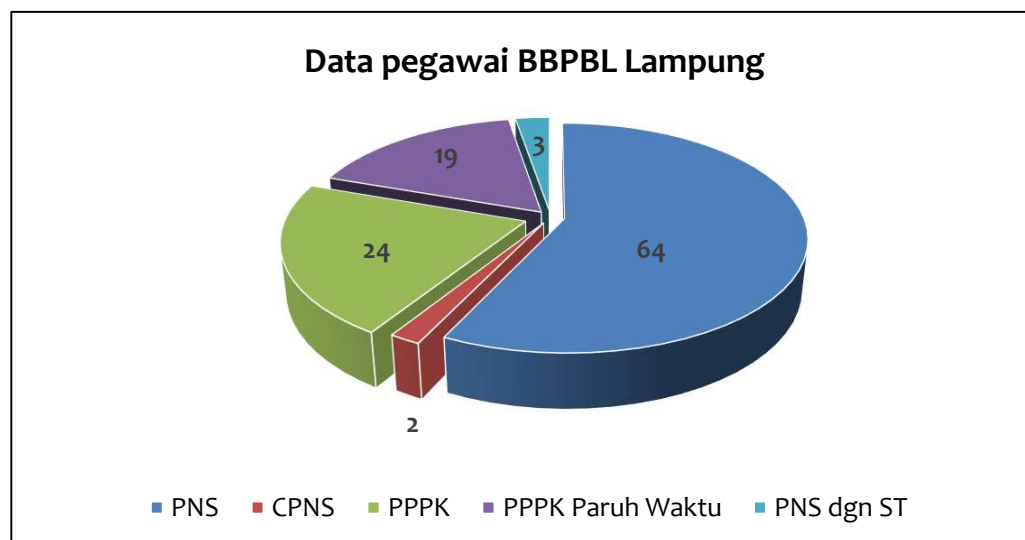
Bertanggung jawab terhadap pencapaian IKU (1) Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BBPBL Lampung; (5) Sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ikan air laut oleh BBPBL Lampung; (6) Sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji oleh BBPBL Lampung; (7) Sampel surveillance Resistensi Antimikroba ikan air laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BBPBL Lampung

5. TIM KERJA DUKUNGAN MANAJEMEN

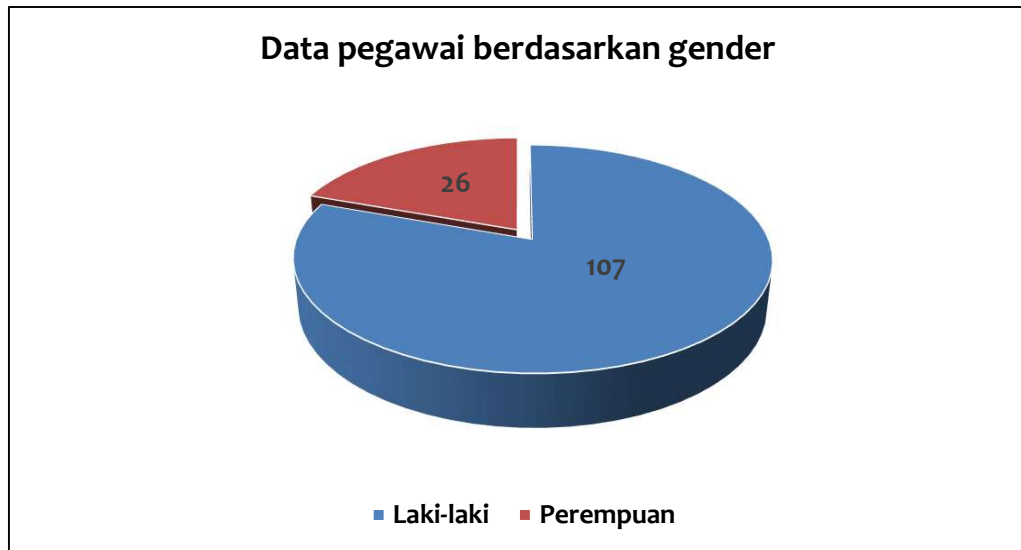
Bertanggung jawab terhadap pencapaian IKU (11) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker BBPBL Lampung; (12) Penilaian Mandiri SAKIP BBPBL Lampung; (13) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPBL Lampung; (14) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPBL Lampung; (15) Indeks Profesionalitas ASN BBPBL Lampung; (16) Nilai pengawasan kearsipan satker BBPBL Lampung; (17) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BBPBL Lampung; (18) Indeks pengelolaan SDM satker BBPBL Lampung; (19) Pelayanan keterbukaan informasi publik satker BBPBL Lampung; (20) Persentase layanan perkantoran satker BBPBL Lampung; (21) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan unit kerja yang berpredikat menuju WBK; (22) Indeks layanan perpustakaan satker BBPBL Lampung.

1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA

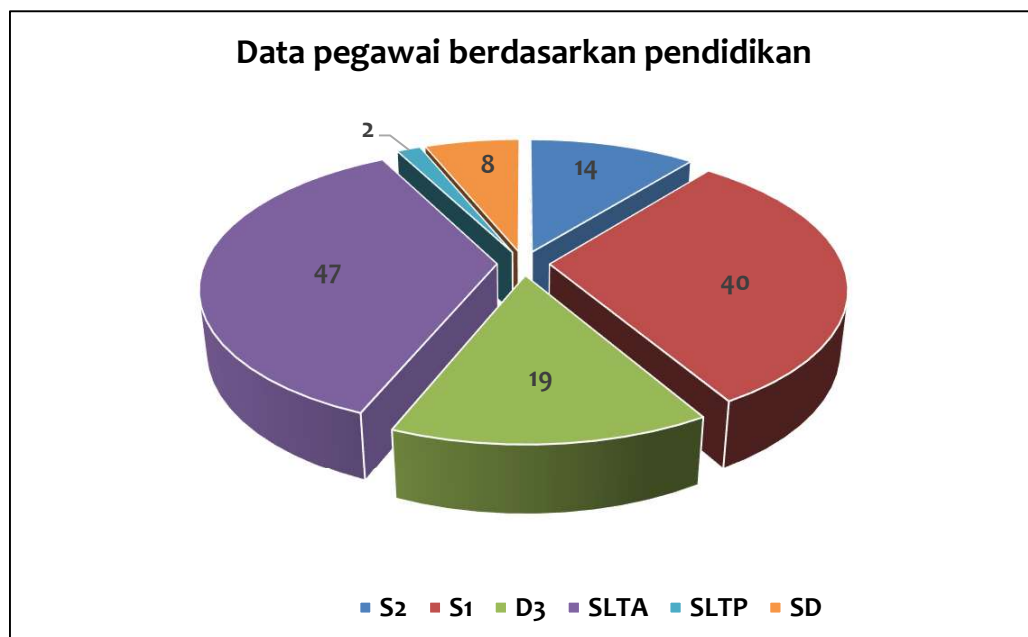
Data SDM dari Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sampai dengan Maret 2026 sejumlah 133 orang adalah sebagai berikut :



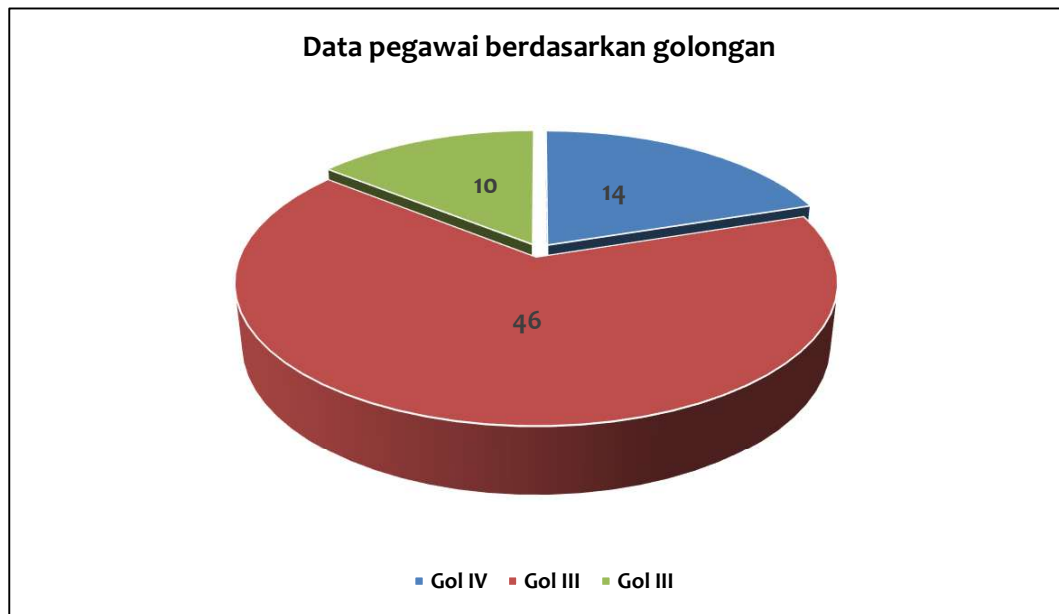
Gambar 1.3. Data jumlah pegawai BBPBL Lampung



Gambar 1.4. Data jumlah pegawai berdasarkan gender



Gambar 1.5. Data Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan



Gambar 1.6. Data pegawai berdasarkan pangkat

1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.5.1. POTENSI YANG DIMILIKI

Sektor perikanan merupakan salah satu sumberdaya alam potensial untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Penangkapan ikan dan budidaya ikan di laut mempunyai potensi sangat besar, sehingga pemanfaatan sumberdaya ikan di laut akan dapat menjadi andalan untuk menopang pembangunan negara di masa sekarang dan masa depan.

Potensi yang dimiliki BBPBL Lampung berdasarkan peran strategis, sumberdaya dan dukungan kelembagaan, sebagai berikut :

1. Letak geografis strategis
 - ❖ Terletak di Teluk Lampung yang memiliki kualitas air laut yang mendukung kegiatan budidaya laut.
 - ❖ Dekat dengan pasar domestik dan akses ekspor melalui Pelabuhan Panjang.
2. Sumber daya alam yang mendukung
 - ❖ Air laut dengan kualitas optimal untuk budidaya ikan laut (seperti Kerapu, Kakap dan Bawal Bintang)
 - ❖ Ketersediaan lahan pantai dan laut untuk pengembangan budidaya berbasis kawasan (*marine farming zone*)
 - ❖ Potensi pengembangan teknologi bioflok dan sistem resirkulasi (RAS) di perairan terbatas.

3. Fasilitas dan sarana teknologi
 - ❖ Berdiri diatas lahan 5,9 Ha terdiri atas laut yang merupakan fasilitas untuk budidaya pembesaran ikan laut di KJA.
 - ❖ Laboratorium uji kualitas air, pakan dan kesehatan ikan yang memadai
 - ❖ Fasilitas hatchery (pembenihan) ikan laut modern dengan kapasitas produksi tinggi.
 - ❖ Instalasi pakan mandiri untuk mendukung kemandirian pakan.
4. Sumber daya manusia kompeten
 - ❖ Didukung oleh tenaga ahli perikanan dengan kompetensi tinggi dibidang budidaya laut.
 - ❖ SDM mampu melakukan inovasi teknologi budidaya serta pelatihan dan bimbingan teknis kepada masyarakat.
5. Peran sebagai pusat rujukan nasional
 - ❖ Berperan dalam penyebaran teknologi budidaya laut di Indonesia.
 - ❖ Mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan kawasan kampung budidaya dan perikanan berkelanjutan.
 - ❖ Menjadi pusat pelatihan, penelitian dan pelayanan teknis bidang budidaya laut.
6. Dukungan kelembagaan dan kemitraan.
 - ❖ Telah menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi, swasta, LSM serta mitra internasional.
 - ❖ Mendukung kegiatan PNBP melalui penjualan benih, pakan dan jasa teknis.
7. Potensi inovasi dan digitalisasi
 - ❖ Siap mengembangkan budidaya laut berbasis *Internet of Thing (IoT)* dan *smart aquaculture*.
 - ❖ Berperan dalam pengembangan *blue economy* melalui praktik budidaya ramah lingkungan.

1.5.2. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam pelaksanaan tugas pengembangan budidaya perikanan laut, BBPBL Lampung masih menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja. Permasalahan tersebut meliputi aspek teknis, sumber daya, hingga kelembagaan sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana pendukung budidaya laut, seperti hatchery, instalasi pembenihan, peralatan laboratorium, serta sarana produksi lainnya masih terbatas

atau memerlukan peningkatan kualitas. Hal ini berdampak pada kapasitas produksi benih maupun kualitas layanan teknis yang diberikan kepada masyarakat.

2. Kualitas dan ketersediaan induk dan benih
Ketersediaan induk unggul dan benih berkualitas masih menjadi tantangan. Tidak semua komoditas memiliki induk yang stabil dan produktif, sehingga mempengaruhi kontinuitas produksi benih ikan laut.
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kapasitas SDM, baik dari sisi jumlah (banyaknya pegawai yang memasuki masa purna tugas) maupun kompetensi teknis, masih perlu ditingkatkan.
4. Faktor lingkungan dan perubahan iklim
Kondisi lingkungan perairan yang dinamis, seperti perubahan suhu, kualitas air, serta cuaca ekstrem, menjadi faktor risiko dalam kegiatan budidaya laut. Hal ini dapat menyebabkan tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) yang rendah.
5. Serangan penyakit dan kesehatan Ikan
Munculnya penyakit ikan yang sulit dikendalikan masih menjadi kendala utama. Keterbatasan dalam deteksi dini dan penanganan penyakit berdampak pada produktivitas budidaya.
6. Keterbatasan akses pakan
Harga pakan yang relatif tinggi serta ketergantungan pada pakan komersial menyebabkan meningkatnya biaya produksi. Hal ini berdampak pada efisiensi usaha budidaya.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung TW I - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BBPBL Lampung pada TW I – 2026

2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BBPBL Lampung secara singkat tentang tugas pokok dan fungsi, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan Laporan Kinerja (LKj).
3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program BBPBL Lampung pada Tahun 2025, Penetapan Kinerja BBPBL Lampung serta pengukuran/pengelolaan kinerja BBPBL Lampung.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPBL Lampung serta evaluasi dan analisis kinerja TW I - 2026. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1.1. VISI

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 - 2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Sedangkan Visi KKP 2025 - 2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat” Visi ini menekankan pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2025 - 2029 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP adalah “Perikanan Budi Daya yang Maju, Berkelanjutan dan Tangguh untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat”

Penjelasan elemen visi tersebut adalah sebagai berikut:

- ❖ **Maju** : Mewakili transformasi sektor perikanan budi daya menuju sistem yang modern dan efisien, melalui peningkatan penggunaan teknologi, digitalisasi proses produksi, inovasi kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- ❖ **Berkelanjutan** : Menunjukkan komitmen terhadap praktik budi daya yang menjaga keseimbangan ekologi, memperhatikan daya dukung lingkungan, dan menjamin keberlangsungan usaha dari sisi sosial maupun ekonomi.
- ❖ **Tangguh** : Menggambarkan ketahanan sektor budi daya dalam menghadapi dinamika global dan tantangan lokal, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga input, risiko penyakit ikan, dan gangguan rantai pasok. Visi ini mencerminkan daya adaptasi, resiliensi, dan stabilitas sistem budidaya secara menyeluruh.
- ❖ **Ketahanan pangan dan kesejahteraan Masyarakat** : Menjadi tujuan utama pembangunan, yaitu menjadikan subsektor perikanan budi daya sebagai sumber protein hewani yang aman dan bergizi serta sebagai pendorong ekonomi rakyat, khususnya di wilayah pesisir dan perdesaan

2.1.2. MISI

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025–2029 adalah :

1. Meningkatkan produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan sebagai kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian pelaku utama perikanan budi daya.

3. Mengembangkan sistem usaha perikanan budi daya yang adaptif, efisien, dan berbasis teknologi.
4. Memperkuat tata kelola subsektor perikanan budi daya yang profesional, transparan, dan digital.

2.1.3. TUJUAN

Pembangunan perikanan budidaya pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung merupakan bagian dari upaya strategis dalam mendukung peningkatan kinerja sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Tujuan pembangunan tersebut diarahkan untuk mewujudkan sistem budidaya yang produktif, efisien, berdaya saing, dan ramah lingkungan.

Adapun tujuan pembangunan perikanan budidaya di BBPBL Lampung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya laut
Melalui penyediaan benih dan calon induk unggul yang berkualitas, sehat, dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pembudidaya.
2. Meningkatkan mutu dan jaminan kesehatan ikan serta lingkungan budidaya
Melalui kegiatan pengujian laboratorium, monitoring kesehatan ikan, serta pengendalian kualitas lingkungan perairan secara berkala.
3. Mengembangkan dan diseminasi teknologi budidaya
Dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha, produktivitas, serta penerapan prinsip budidaya yang baik (Good Aquaculture Practices).
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM perikanan budidaya
Melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada pembudidaya serta pemangku kepentingan terkait.
5. Mendukung pengendalian penyakit ikan dan resistensi antimikroba (AMR)
Melalui kegiatan surveillance, deteksi dini, dan pengujian laboratorium guna mencegah serta mengendalikan penyebaran penyakit ikan.
6. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya
Melalui peningkatan produksi, efisiensi usaha, serta akses terhadap teknologi dan sarana produksi.
7. Mewujudkan pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan
Dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem perairan.

2.1.4. SASARAN KEGIATAN

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BBPBL Lampung sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Kegiatan (SK) BBPBL Lampung tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN 2026	
SK 1	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air tawar
SK 2	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut
SK 3	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air payau
SK 4	Terkelolanya sistem prasarana dan sarana perikanan budi daya
SK 5	Terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut
SK 6	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung

2.1.5. ARAH DAN KEBIJAKAN

Mengacu kepada arah kebijakan DJPB, maka BBPBL Lampung menetapkan program terinci sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan prioritas yaitu penyaluran bantuan benih ikan laut dan bibit rumput laut ke masyarakat sebagai upaya stimulasi pengembangan usaha pembudidayaan ikan dan budidaya rumput laut;
2. Peningkatan produksi induk ikan laut yang berkualitas melalui kegiatan produksi calon induk unggul ikan laut;
3. Peningkatan peran peningkatan produksi pembudidaya melalui kegiatan produksi benih ikan laut yang dapat dibeli oleh para pembudidaya;
4. Pengembangan budidaya ikan air tawar Lele dan Nila yang disalurkan ke masyarakat melalui bantuan sarana dan prasarana bioflok serta bantuan bahan baku dan mesin pakan;
5. Mengembangkan kemandirian pakan ikan laut dengan produksi pakan mandiri untuk operasional BBPBL Lampung;
6. Pengelolaan kawasan budidaya laut melalui pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan serta pengawasan kegiatan perikanan budidaya;
7. Peningkatan peran layanan laboratorium keskanling dalam layanan pengujian sampel penyakit, kualitas air dan pakan ikan;
8. Peningkatan pelayanan publik melalui layanan satu pintu dan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi;

9. Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku guna tertib administrasi;
10. Pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran dan kerumahtanggaan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA BBPBL LAMPUNG

Sesuai tujuan program pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yaitu meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai), maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan BBPBL Lampung pada Tahun Anggaran 2026, berpedoman pada Dokumen Penetapan Kinerja BBPBL Lampung TA 2026, DIPA Tahun Anggaran 2026 No : SP DIPA – 032.04.2.427706/2026 tanggal 01 Desember 2025 ditetapkan anggaran sebesar Rp. 38.471.341.000, dan setelah adanya RO Khusus maka ditetapkan anggaran sebesar Rp. 34.354.301.000. Dengan adanya penetapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan maka ditetapkanlan Penetapan Kinerja BBPBL Lampung tahun 2026 yang telah ditandatangani antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dengan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sebagai berikut :



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEFON (021) 3519070 (J. AGAK), FAKSIMILE (021) 3514772
 LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT
LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mulyanto**
 Jabatan : **Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung**
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
 Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala BBPBL Lampung



Mulyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air tawar	1. Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BBPBL Lampung (unit)	1
2.	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	2. Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung (ekor)	250
		3. Benih ikan Laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung (ekor)	162.436
		4. Benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung (ekor)	1.324.831
		5. Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut oleh BBPBL Lampung (Sampel)	200
		6. Sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji oleh BBPBL Lampung (sampel)	160
		7. Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BBPBL Lampung (sampel)	75
3.	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air payau	8. Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) BBPBL Lampung (kg)	6.211
4.	Terkelolanya sistem prasarana dan sarana perikanan budi daya	9. Sarana perikanan budi daya yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung (unit)	35
5.	Terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut	10. Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung (kg)	9.463
6.	Terdwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung	11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker BBPBL Lampung (Persen)	86
		12. Penilaian Mandiri SAKIP BBPBL Lampung (Nilai)	84,2
		13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPBL Lampung (nilai)	92,1
		14. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPBL Lampung (nilai)	71,75
		15. Indeks Profesionalitas ASN BBPBL Lampung (nilai)	61,5
		16. Nilai Pengawasan kearsipan satker BBPBL Lampung (Nilai)	81
		17. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang dimunkan pada SIRUP satker BBPBL Lampung (Persen)	77
		18. Indeks Pengelolaan SDM satker BBPBL Lampung (Nilai)	4

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		19. Pelayanan keterbukaan informasi publik satker BBPBL Lampung (Nilai)	281
		20. Persentase layanan perkantoran satker BBPBL Lampung (Persen)	100
		21. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja yang berpredikat menuju WBK (nilai)	76
		22. Indeks layanan perpustakaan satker BBPBL Lampung (Indeks)	3

Data Anggaran		
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air tawar	70.500.000
2.	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	6.751.059.000
3.	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air payau	70.000.000
4.	Terkelolanya sistem prasarana dan sarana perikanan budi daya	7.395.270.000
5.	Terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut	446.692.000
6.	Tersajudinya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung	19.620.780.000
Total Anggaran BBPBL Lampung		34.354.301.000

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala BBPBL Lampung


Ditandatangani Secara Elektronik
TB. Haeru Rahayu

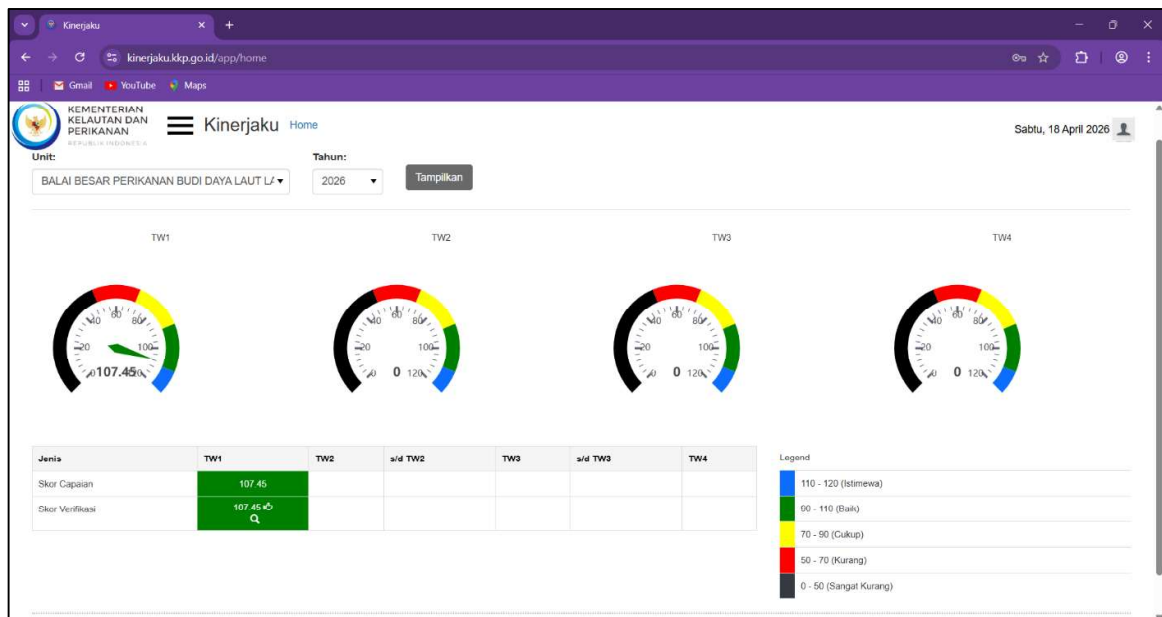

Ditandatangani Secara Elektronik
Mulyanto

Gambar 2.1. Penetapan Kinerja BBPBL Lampung 2026

2.3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TW I - 2026

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja TW I - 2026 yang didukung dengan implementasi Aplikasi "KINERJAKU" yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi. Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi "kinerjaku.kkp.go.id" diperoleh Nilai Capaian IKU (NPSS) TW I – 2026 sebesar **107,45**



Kinerjaku Home

Sabtu, 18 April 2026

NKO Maret - 2026

Unit Kerja : BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG

Skor Kinerja : 107.45

Download

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol ✕
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung➕

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
SK.01	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air tawar											
IKSK.01.1	Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BBPBL Lampung	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 11:24
	Tambah Data Dukung➕											
SK.02	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut						111,23			111,23		
IKSK.02.1	Caion induk unggul ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung	Ekor	Maximize	Nilai Posisi Akhir	250,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 11:24
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.02.2	Benih ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung	Ekor	Maximize	Nilai Posisi Akhir	162.436,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 11:24
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.02.3	Benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Data Dukung3 ✓	Ekor	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1.324.831,00	200.000,00	203.500,00	101,75	200.000,00	203.500,00	101,75	14-Apr-2026 10:46
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.02.4	Sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ikan air laut oleh BBPBL Lampung Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Data Dukung3 ✓	sampel	Maximize	Nilai Posisi Akhir	200,00	50,00	152,00	120,00	50,00	152,00	120,00	14-Apr-2026 10:46
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.02.5	Sampel monitoring penyakit ikan laut yang diuji oleh BBPBL Lampung Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Data Dukung3 ✓	sampel	Maximize	Nilai Posisi Akhir	160,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00	14-Apr-2026 10:46
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.02.6	Sampel surveillance resistensi antimikroba ikan air laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BBPBL Lampung Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Data Dukung3 ✓	sampel	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	21,00	35,00	120,00	21,00	35,00	120,00	14-Apr-2026 10:46
	Tambah Data Dukung➕											

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kegiatan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung pada tahun 2026 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BBPBL Lampung dengan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Sasaran Kegiatan ada 6 (enam) dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi BBPBL Lampung.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” diperoleh Nilai Capaian IKU (NPSS) sebesar **107,45**. Adapun rekapitulasi capaian kinerja TW I – 2026 Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama BBPBL Lampung TW I – 2026

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Realisasi	%	
			Tahunan	TW I		Tahunan	TW I
1.	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air tawar	1. Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BBPBL Lampung (unit)	1	-	-	-	-
2.	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	2. Calon induk unggul ikan laut yang di produksi oleh BBPBL Lampung (ekor)	250	-	-	-	-
		3. Benih ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung (ekor)	162.436	-	-	-	-
		4. Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung (ekor)	1.324.831	200.000	203.500	15,36	101,75
		5. Sampel uji laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan ikan air laut oleh BBPBL Lampung (sampel)	200	50	152	76,00	304,00
		6. Sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji oleh BBPBL Lampung (sampel)	160	40	40	25,00	100,00
		7. Sampel surveillance resistensi antimikroba ikan air laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BBPBL Lampung (sampel)	75	21	35	46,67	166,67
3.	Terkelolanya system perikanan budi daya ikan air payau	8. Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) BBPBL Lampung (kg)	6.211	-	-	-	-

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Realisasi	%	
			Tahunan	TW I		Tahunan	TW I
4.	Terkelolanya system prasarana dan sarana perikanan budidaya	9. Sarana perikanan budi daya yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung (unit)	36	-	-	-	-
5.	Terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut	10. Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung (kg)	9.463	2.400	2400	25,36	100
6.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung	11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker BBPBL Lampung (Persen)	86	86-	100	116,28	116,28
		12. Penilaian Mandiri SAKIP BBPBL Lampung (Nilai)	85	-	-	-	-
		13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPBL Lampung (nilai)	92,1	-	-	-	-
		14. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPBL Lampung (nilai)	71,75	-	-	-	-
		15. Indeks Profesionalitas ASN BBPBL Lampung (nilai)	81,5	-	-	-	-
		16. Nilai Pengawasan kearsipan satker BBPBL Lampung (Nilai)	81	-	-	-	-
		17. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BBPBL Lampung (persen)	77	77	100	129,87	129,87
		18. Indeks Pengelolaan SDM satker BBPBL Lampung (Nilai)	4	-	-	-	-
		19. Pelayanan keterbukaan informasi publik satker BBPBL Lampung (Nilai)	≥81	-	-	-	-
		20. Persentase layanan perkantoran satker BBPBL Lampung (Persen)	100	100-	100	100	100
		21. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja yang berpredikat menuju WBK (nilai)	76	-	-	-	-
		22. Indeks layanan perpustakaan satker BBPBL Lampung (Indeks)	3	-	-	-	-

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SK. 1. TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR

IKU 1. PERALATAN LABORATORIUM PENGUJIAN PENYAKIT DAN LINGKUNGAN YANG DISEDIAKAN OLEH BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.2. Capaian Sasaran Kegiatan 1, pada IKU 1

Sasaran Kegiatan-1		Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air tawar						
IKU-1		Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BBPBL Lampung (unit)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	1	-	-	-	-	70.500.000	-	-

Sumber : Tim Kerja Keskanling BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BBPBL Lampung adalah seluruh perangkat, instrumen, dan sarana teknis yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pengujian, analisis, dan diagnosa terhadap sampel ikan, air, pakan, serta media lingkungan perikanan guna mendeteksi penyakit, mengidentifikasi agen patogen, serta menilai kualitas lingkungan perairan.

Perhitungan capaian pada IKU 1 ini dilakukan pada akhir tahun, dengan target sebanyak 1 unit. Pola perhitungan yang dilakukan adalah nilai posisi akhir, dengan tingkat validitas output kendali tinggi.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Dari Tabel 3.2. dapat diketahui bahwa capaian peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BBPBL Lampung sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan indikator kinerja tersebut tidak terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2025.

Tabel 3.3. Data perbandingan capaian tersedianya peralatan laboratorium lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (unit)	Realisasi (unit)	%
1.	BBPBL Lampung	1	-	-
2.	BPBAL Lombok	1	-	-
3.	BPBAL Ambon	1	-	-
4.	BPBAL Batam	1	1	100

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Anggaran peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan sebesar Rp. 75.500.000 dengan target sebanyak 1 unit. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja peralatan laboratorium sebesar Rp. 50.400.000 dan akreditasi sebesar Rp. 20.100.000. Realisasi anggaran sampai dengan TW I – 2026 sebesar Rp. 21.350.000 (30,28%).

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, indikator penyediaan peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan oleh BBPBL Lampung menunjukkan belum tercapainya target (0%), baik dari sisi fisik maupun keuangan.

Dengan demikian, pada periode Triwulan I, pelaksanaan kegiatan ini dapat dikategorikan belum berhasil. Namun, kondisi tersebut belum dapat sepenuhnya dinilai sebagai kegagalan, mengingat :

1. Sifat kegiatan pengadaan
Kegiatan penyediaan peralatan laboratorium umumnya memiliki tahapan yang cukup panjang, mulai dari perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, proses pengadaan, hingga distribusi barang.
2. Penjadwalan kegiatan tahunan
Realisasi kegiatan kemungkinan memang direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan berikutnya, sehingga belum terdapat capaian pada awal tahun.
3. Belum memasuki tahap eksekusi
Ketiadaan realisasi anggaran menunjukkan bahwa kegiatan masih berada pada tahap awal (perencanaan/administratif), bukan karena hambatan pada tahap pelaksanaan teknis.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Pada periode sebelumnya (TW IV - 2025) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja berupa peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BBPBL Lampung. Hal ini dikarenakan IKU tersebut tidak ada dalam Penetapan Kinerja 2025, sehingga tidak ada capaian keuangan dan fisik.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Dalam upaya pencapaian target penyediaan peralatan laboratorium pengujian kesehatan ikan dan lingkungan, BBPBL Lampung menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

1. Keterbatasan anggaran pengadaan
Alokasi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan peralatan laboratorium yang sesuai standar dan perkembangan teknologi terkini.
2. Kapasitas dan kondisi peralatan eksisting
Beberapa peralatan yang sudah ada mengalami penurunan kinerja atau kerusakan, sehingga memerlukan perawatan atau penggantian.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Untuk mendukung pencapaian target penyediaan peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan di BBPBL Lampung, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Percepatan proses pengadaan
Segera menyelesaikan tahapan administrasi pengadaan, termasuk finalisasi spesifikasi teknis, penyusunan dokumen pengadaan, dan penetapan metode pengadaan.
2. Penyusunan jadwal pelaksanaan yang terstruktur
Menetapkan timeline yang jelas dan realistis untuk setiap tahapan kegiatan agar pelaksanaan dapat terkontrol dan tepat waktu.
3. Penguatan koordinasi internal
Meningkatkan koordinasi antara unit perencanaan, teknis, dan pengadaan untuk memastikan kesesuaian kebutuhan dan kelancaran proses.
4. Monitoring dan evaluasi berkala
Melakukan pemantauan rutin terhadap progres kegiatan guna mengidentifikasi hambatan sejak dini dan melakukan langkah korektif secara cepat.

SK. 2. TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT
IKU 2. CALON INDUK UNGGUL IKAN LAUT YANG DIPRODUKSI OLEH BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.4. Capaian Sasaran Kegiatan 2, pada IKU 2

Sasaran Kegiatan-2		Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut						
IKU-2		Calon induk unggul ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung (ekor)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	250	-	-	-	-	57.397.000	48.690.000	84,83

Sumber : Tim Kerja Produksi dan bantuan-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan budidaya perikanan laut nasional melalui penyediaan calon induk unggul ikan laut yang berkualitas. Calon induk unggul merupakan ikan hasil seleksi yang memiliki performa genetik, kesehatan, dan produktivitas yang lebih baik dibandingkan populasi biasa, sehingga sangat penting dalam menunjang keberhasilan produksi benih secara berkelanjutan.

Calon induk unggul yang diproduksi harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain :

- Pertumbuhan cepat dan ukuran seragam.
- Kesehatan prima, bebas dari penyakit.
- Respons pakan baik dan efisiensi konversi pakan tinggi.
- Tidak cacat fisik dan memiliki morfologi normal.
- Memiliki potensi reproduksi tinggi.

Perhitungan capaian pada IKU 2 ini dilakukan pada akhir tahun, dengan target sebanyak 250 ekor. Pada saat ini kegiatan produksi calon induk ikan laut masih dalam tahap pemeliharaan di Karamba Jaring Apung (KJA). Pola perhitungan yang dilakukan adalah nilai posisi akhir, dengan tingkat validitas output kendali tinggi.

Tabel 3.5. Data ketersediaan calon induk dan induk ikan air laut

No	Nama Komoditas	Ukuran	Jumlah (ekor)
1.	Bawal Bintang	Calin > 1.400 gr	211
2.	Kakap Putih	Calin > 500 gr	32
3.	Kakap Merah	Calin >1000 gr	19
4.	Kobia	Calin > 1.250 gr	16

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Dari Tabel 3.4. dapat diketahui bahwa capaian calon induk unggul ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2026 hasilnya sama dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan ikan laut masih dalam proses pemeliharaan di Karamba Jaring Apung (KJA)

Tabel 3.6. Data perbandingan capaian produksi calon induk ikan laut lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (ekor)		Realisasi (ekor)	%	
		Tahunan	TW I		Tahunan	TW I
1.	BBPBL Lampung	250	-	-	-	-
2.	BPBAL Lombok	1665	65	66	3,90	101,54
3.	BPBAL Ambon	1.667	30	40	1,79	133,33
4.	BPBAL Batam	1.115	315	424	38,03	134,60

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Anggaran calon induk ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung sebesar Rp. 57.397.000 dengan target sebanyak 250 ekor. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja perlengkapan kerja sebesar Rp. 3.242.000, pakan sebesar Rp. 49.980.000 dan vitamin, obat-obatan sebesar Rp. 4.175.000. Realisasi anggaran sampai dengan TW I – 2026 sebesar Rp. 48.690.000 (84,83%), dengan rincian belanja perlengkapan kerja Rp. 0,- (0%) dan belanja pakan sebesar Rp. 48.690.000 (84,83%).

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Indikator Calon Induk Unggul Ikan Laut yang Diproduksi oleh BBPBL Lampung merupakan indikator kinerja yang bersifat output tahunan, dengan target capaian sebanyak 250 ekor yang penghitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran. Hingga periode pelaporan saat ini, kegiatan masih berada pada tahap pemeliharaan dan pembesaran, sehingga belum dapat dilakukan penetapan akhir terhadap jumlah calon induk unggul yang memenuhi kriteria.

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian indikator belum dapat diukur secara kuantitatif terhadap target yang telah ditetapkan, sehingga penilaian keberhasilan atau kegagalan belum dapat disimpulkan secara final. Namun demikian, berdasarkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, proses pemeliharaan calon induk menunjukkan kondisi yang relatif terkendali, baik dari aspek kelangsungan hidup, pertumbuhan, maupun pengelolaan kualitas lingkungan pemeliharaan.

Indikator ini dapat dikategorikan berada dalam status *on track* atau berjalan sesuai rencana, dengan catatan bahwa keberhasilan pencapaian target sangat bergantung pada keberlanjutan kondisi pemeliharaan hingga akhir tahun. Beberapa faktor risiko yang berpotensi mempengaruhi capaian antara lain tingkat mortalitas, serangan penyakit, ketidaktercapaian standar pertumbuhan, serta fluktuasi kualitas lingkungan budidaya.

Dengan demikian, diperlukan upaya pengendalian yang optimal melalui penerapan manajemen pemeliharaan yang baik, pengawasan kesehatan ikan secara berkala, serta pengelolaan kualitas air yang konsisten guna memastikan bahwa jumlah ikan yang memenuhi kriteria sebagai calon induk unggul dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir tahun anggaran.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

1. Meminimalisir terjadinya mortalitas pada komoditi Kobia dan Bawal Bintang, maka dilakukan penambahan vitamin pada pakan yang diberikan pada komoditas tersebut.

KARTU KENDALI URAIAN PAKAN DAN OBAT OBATAN POMBA KJA						
NAMA KEGIATAN NAMA BARANG		Pembelian BIOVIT				
NO	PENGUNIA	TANGGAL	MASUK	KELUAR	SALDO	KETERANGAN
1		1/1/2026		0		
2		1/2/2026		0		
3		1/2/2026		0		
4		1/4/2026		0		
5		1/5/2026		0		
6		1/6/2026		0		
7		1/7/2026		0		
8		1/8/2026		0		
9		1/9/2026		0		
10		1/10/2026		0		
11		1/11/2026		0		
12		1/12/2026		0		
13		1/1/2026		0		
14		1/2/2026		0		
15		1/3/2026		0		
16		1/4/2026		0		
17		1/5/2026		0		
18		1/6/2026		0		
19		1/7/2026		0		
20		1/8/2026		0		
21		1/9/2026		0		
22		1/10/2026		0		
23		1/11/2026		0		
24		1/12/2026		0		
25		1/1/2026		0		
26		1/2/2026		0		
27		1/3/2026		0		
28		1/4/2026		0		
29		1/5/2026		0		
30		1/6/2026		0		
31		1/7/2026		0		

KARTU KENDALI URAIAN PAKAN DAN OBAT OBATAN POMBA KJA						
NAMA KEGIATAN NAMA BARANG		Pembelian C-Sun				
NO	PENGUNIA	TANGGAL	MASUK	KELUAR	SALDO	KETERANGAN
1		2/1/2026			540	
2		2/2/2026		16	126	
3		2/3/2026		10	900	
4		2/4/2026		10	860	
5		2/5/2026		10	860	
6		2/6/2026		10	860	
7		2/7/2026		10	860	
8		2/8/2026		10	860	
9		2/9/2026		10	860	
10		2/10/2026		10	860	
11		2/11/2026		10	860	
12		2/12/2026		10	860	
13		2/1/2026		10	860	
14		2/2/2026		10	860	
15		2/3/2026		10	860	
16		2/4/2026		10	860	
17		2/5/2026		10	860	
18		2/6/2026		10	860	
19		2/7/2026		10	860	
20		2/8/2026		10	860	
21		2/9/2026		10	860	
22		2/10/2026		10	860	
23		2/11/2026		10	860	
24		2/12/2026		10	860	
25		2/1/2026		10	860	
26		2/2/2026		10	860	
27		2/3/2026		10	860	
28		2/4/2026		10	860	
29		2/5/2026		10	860	
30		2/6/2026		10	860	
31		2/7/2026		10	860	

Gambar 3.1. Uraian penggunaan vitamin

2. Dilakukan monitoring kualitas air di lokasi KJA secara berkala

Tabel 3.7. Data monitoring kualitas air di KJA

Parameter	KJA St1								
	07-Jan	14-Jan	21-Jan	29-Jan	4-Peb	10-Peb	25-Peb	04-Mar	11-Mar
Kedalaman	19,9	19,4	20,6	19,4	20,0	19,8	19,6	20,6	19,8
Kecerahan	7,0	9	7,0	6,0	8,0	8	9,0	8,0	5
Suhu	29,2	29,1	28,5	31	28,8	29,8	28,8	28,9	30,5
Salinitas	32	32	31	29,4	31	31	32	32	32
DO	5,29	5,18	5,3	5,99	6,2	6,12	5,86	5,81	5,38

Parameter	KJA St1								
	07-Jan	14-Jan	21-Jan	29-Jan	4-Peb	10-Peb	25-Peb	04-Mar	11-Mar
pH	8,05	7,96	7,96	8,27	8,1	8,05	8	8,11	8,07
Alkalinitas	116	120	116	152	144	116	108	108	25,72
Kesadahan	5686	5606	5165	6607	7007	5606	5886	5806	5926
NO ₂ (N)	0,078	0,081	0,07	0,086	0,093	0,149	0,144	0,07	0,078
NH ₃	0,201	0,106	0,097	0,244	0,246	0,248	0,262	0,681	0,701
PO-4	0,287	0,293	0,242	0,159	0,657	0,516	0,117	0,549	1,122
TOM	9,23	12,89	30,65	36,66	24,02	16,94	16,43	31,79	25,72

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Dalam pelaksanaan kegiatan produksi calon induk unggul ikan laut, terdapat beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi pencapaian target pada akhir tahun anggaran, antara lain :

1. Tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) yang fluktuatif, terutama pada fase awal dan transisi pemeliharaan, yang dapat mengurangi jumlah populasi yang tersedia untuk seleksi.
2. Potensi serangan penyakit, baik yang bersifat parasitik, bakteri, maupun viral, yang dapat berdampak pada kesehatan dan kualitas ikan.
3. Kualitas lingkungan perairan, seperti perubahan suhu, salinitas, oksigen terlarut, dan parameter lainnya yang dapat mempengaruhi performa pertumbuhan dan kesehatan ikan.
4. Keterbatasan pakan berkualitas atau efisiensi pemberian pakan, yang dapat berdampak pada laju pertumbuhan dan keseragaman ukuran ikan.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Untuk mendukung pencapaian target kegiatan produksi calon induk unggul ikan laut oleh BBPBL Lampung, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan kualitas air secara konsisten dan terukur, melalui pemantauan rutin serta tindakan korektif yang cepat terhadap perubahan parameter lingkungan.
2. Memperkuat sistem biosekuriti dan pengendalian penyakit, termasuk pelaksanaan monitoring kesehatan ikan secara berkala dan penerapan tindakan pencegahan yang efektif.
3. Mengoptimalkan manajemen pakan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun frekuensi pemberian untuk mendukung pertumbuhan yang maksimal dan seragam.

4. Melaksanakan kegiatan grading dan seleksi secara berkala, guna menjaga keseragaman ukuran dan memastikan hanya ikan dengan performa terbaik yang dipertahankan.

SK. 2. TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT

IKU 3. BENIH IKAN LAUT YANG DIPRODUKSI OLEH BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.8. Capaian Sasaran Kegiatan 2, pada IKU 3

Sasaran Kegiatan-2		Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut						
IKU-3		Benih ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung (ekor)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	162.436	-	-	-	-	920.618.000	13.000.000	1,41

Sumber : Tim Kerja Produksi dan Bantuan-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Benih ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung adalah jumlah benih ikan laut yang dihasilkan melalui kegiatan pembenihan di BBPBL Lampung dalam periode tertentu, yang telah memenuhi standar kelayakan teknis (ukuran, kesehatan, dan keseragaman), serta dinyatakan layak untuk didistribusikan atau dibesarkan lebih lanjut.

Perhitungan capaian pada IKU 3 ini di mulai pada TW II - 2026, dengan target sebanyak 162.436 ekor. Pada TW I – 2026 saat ini kegiatan produksi benih ikan laut masih dalam tahap pemeliharaan pemeliharaan larva, sehingga belum ada benih yang dihitung sesuai formula perhitungan capaian. Perhitungan capaian yaitu dengan menjumlahkan benih yang terjual melalui PNBP.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Dari Tabel 3.8. dapat diketahui bahwa capaian benih ikan laut yang oleh BBPBL Lampung sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan indikator kinerja tersebut tidak terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2025

Tabel 3.9. Data perbandingan capaian benih ikan laut yang diproduksi lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (ekor)		Realisasi (ekor)	%	
		Tahunan	TW I		Tahunan	TW I
1.	BBPBL Lampung	162.436	-	-	-	-
2.	BPBAL Lombok	30.000	-	-	-	-
3.	BPBAL Ambon	46.667	30.000	47.870	102,58	159,57
4.	BPBAL Batam	58.001	5.000	7.250-	12,49	145

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Anggaran benih ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung sebesar Rp. 920.618.000 (awal) dengan target sebanyak 162.438 ekor. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja Tahap pendederan I sebesar Rp. 489.732.000, pendederan II sebesar Rp. 430.886.000. Pada saat periode berjalan terdapat revisi anggaran untuk kegiatan benih ikan laut yang diproduksi BBPBL Lampung sebesar Rp. 682.232.000. Anggaran revisi tersebut dialokasikan untuk belanja Tahap pendederan I sebesar Rp. 361.712.000, pendederan II sebesar Rp. 320.520.000. Realisasi anggaran sampai dengan TW I – 2026 sebesar Rp. 13.000.000 (1,41%) terhadap anggaran awal dan realisasi 1,91% terhadap anggaran revisi.

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Indikator *Benih Ikan Laut yang Diproduksi oleh BBPBL Lampung* memiliki target tahunan sebesar 162.436 ekor, dengan pengukuran capaian dilakukan secara akumulatif hingga akhir tahun anggaran. Pada Triwulan I, indikator ini tidak memiliki target maupun realisasi, mengingat kegiatan pembenihan masih berada pada tahap persiapan dan proses awal produksi, seperti pemeliharaan induk, pemijahan, serta pemeliharaan larva.

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak adanya target dan realisasi pada Triwulan I tidak dapat diinterpretasikan sebagai kegagalan kinerja, melainkan merupakan bagian dari tahapan proses produksi yang secara teknis belum menghasilkan output berupa benih siap hitung. Dengan demikian, indikator ini belum dapat dinilai tingkat keberhasilan atau kegagalannya pada periode Triwulan I.

Secara substansi, pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I lebih difokuskan pada pemenuhan prasyarat produksi, yang meliputi kesiapan induk, pengelolaan kualitas lingkungan pembenihan, serta optimalisasi sarana dan prasarana. Keberhasilan pada tahap ini menjadi faktor kunci yang sangat menentukan capaian produksi benih pada triwulan berikutnya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, indikator ini dapat dikategorikan berada dalam status *on track*, dengan catatan bahwa capaian akhir tahun sangat bergantung pada keberhasilan proses produksi pada periode selanjutnya, khususnya dalam menjaga tingkat keberhasilan pemijahan, kelangsungan hidup larva, serta kualitas benih yang dihasilkan.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Pada periode sebelumnya (TW IV - 2025) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja berupa benih ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung. Hal ini dikarenakan IKU tersebut tidak ada dalam Penetapan Kinerja 2025, sehingga tidak ada capaian keuangan dan fisik.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Dalam pelaksanaan kegiatan produksi benih ikan laut, terdapat beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi pencapaian target pada akhir tahun anggaran, antara lain :

1. Tingkat kelangsungan hidup larva yang relatif rendah pada fase awal, mengingat fase larva merupakan tahap yang paling sensitif terhadap perubahan lingkungan.
2. Sensitivitas larva terhadap kualitas air, seperti perubahan suhu, salinitas, oksigen terlarut, dan parameter lainnya yang dapat berdampak langsung pada mortalitas.
3. Keterbatasan ketersediaan pakan alami, seperti fitoplankton dan zooplankton, yang sangat dibutuhkan pada fase awal pemeliharaan larva.
4. Potensi serangan penyakit, baik yang disebabkan oleh bakteri maupun parasit, yang dapat menghambat keberhasilan produksi sejak tahap awal.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Untuk mendukung pencapaian target kegiatan produksi benih ikan laut oleh BBPBL Lampung, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Memperkuat teknik pemeliharaan larva, khususnya pada fase kritis, melalui pengaturan kepadatan, pemberian pakan yang tepat, serta pengendalian lingkungan.
2. Menjamin ketersediaan pakan alami secara berkelanjutan, baik melalui kultur mandiri maupun pengelolaan stok pakan alami yang optimal.
3. Meningkatkan sistem biosekuriti dan pengendalian penyakit, termasuk monitoring kesehatan secara berkala dan penerapan tindakan pencegahan yang efektif.

SK. 2. TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT

IKU 4. BENIH IKAN LAUT YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT OLEH BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.10. Capaian Sasaran Kegiatan 2, pada IKU 4

Sasaran Kegiatan-2		Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut						
IKU-4		Benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung (ekor)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
198.200	1.324.831	200.000	203.500	101,75	2,67	5.458.322.000	1.767.116.485	32,37

Sumber : Tim Kerja Produksi dan Bantuan-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi penyaluran benih ikan laut mencapai 203.500 ekor dari target 150.000 ekor, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 135,67%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyaluran benih telah melampaui target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2025 sebesar 198.200 ekor, terjadi kenaikan sebesar 2,60%, yang mengindikasikan adanya peningkatan kinerja meskipun relatif moderat.

Tabel 3.11. Data distribusi bantuan benih ikan laut

No	Nama Kelompok	Alamat	Komoditas	Volume (ekor)	No. BAST	No. SK Penetapan
Bandar Lampung						
1.	Mekar Sari (Almawi, MS)	Jl. RE Martadinata, gg. Harnas, Way Tataan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung	Ikan Hias	1.000	B.176/BBPBL/PB.140/I/2026	B.165/BBPBL/PB.170/I/2026
2.	Bahari Utama Jaya (Pandi)	Jl. Teluk Bone II, Kel. Kota Karang, Kec. Telukbetung Timur, Bandar Lampung	Kakap Putih	3.500	B.478/BBPBL/PB.140/I/2026	B.429/BBPBL/PB.170/II/2026
			Kakap Putih	6.000		
3.	Singa Laut (Warli)	P. Pasaran, LK II, Kel. Kota Karang, Kec. Telukbetung Timur, Bandar Lampung	Bawal Bintang	5.000	B.526/BBPBL/PB.140/II/2026	B.510/BBPBL/PB.170/II/2026
			Kobia	5.000		
4.	Damai Samudra (Ashari)	P. Pasaran, LK II, Kel. Kota Karang, Kec. Telukbetung Timur, Bandar Lampung	Kerapu Macan	3.000	B.714/BBPBL/PB.140/III/2026	B.693/BBPBL/PB.170/II/2026
			JUMLAH	23.500		
Sumatera Barat						
5.	Katapiang (Wandrianto)	Kp. Sungai Nipah, Desa Nagari Painan Selatan, Kec. IV Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kakap Putih	5,000	B.340/BBPBL/PB.140/I/2026	B.291/BBPBL/PB.170/I/2026

No	Nama Kelompok	Alamat	Komoditas	Volume (ekor)	No. BAST	No. SK Penetapan
6.	Maju Bersama (Desmar)	Kp. Sungai Nipah, Desa Nagari Painan Selatan, Kec. IV Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kakap Putih	5,000	B.342/BBPBL/PB.140/II/2026	B.291/BBPBL/PB.170/II/2026
7.	Harapan Bersama (Jadmiko)	Kp. Sungai Nipah, Desa Nagari Painan Selatan, Kec. IV Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kakap Putih	5,000	B.341/BBPBL/PB.140/II/2026	B.291/BBPBL/PB.170/II/2026
8.	Harapan Baru (Joniwar)	Kp. Sungai Nipah, Desa Nagari Painan Selatan, Kec. IV Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kakap Putih	5,000	B.339/BBPBL/PB.140/II/2026	B.291/BBPBL/PB.170/II/2026
9.	Batu Kodi II (Devi Hendrianto)	Kp. Sungai Nipah, Desa Nagari Painan Selatan, Kec. IV Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kakap Putih	5,000	B.366/BBPBL/PB.140/II/2026	B.291/BBPBL/PB.170/II/2026
			JUMLAH	25.000		
Pesawaran						
10	Anugerah Teluk Pandan (Aria Hendra Putranto)	Desa Sidodadi, kec. Teluk Pandan, Pesawaran	Bawal Bintang	10.000	B.527/BBPBL/PB.140/II/2026	B.510/BBPBL/PB.170/II/2026
11	Mina Berkah Harapan (Sobirin)	Dsn Ringgung, Desa Sidodadi, kec. Teluk Pandan, Pesawaran	Bawal Bintang	10.000	B.559/BBPBL/PB.140/II/2026	B.510/BBPBL/PB.170/II/2026
12	Samudra Biru Lestari (Warnadi)	Dsn Ringgung, Ds. Gebang, Kec. Teluk Pandan, Pesawaran	Bawal Bintang Kobia	10.000 5.000	B.558/BBPBL/PB.140/II/2026	B.510/BBPBL/PB.170/II/2026
13	Luv Ringgung Berjaya (Romy S. Utama L)	Dsn Sidodadi, Ds. Gebang, Kec. Teluk Pandan, Pesawaran	Bawal Bintang	10.000	B.565/BBPBL/PB.140/II/2026	B.510/BBPBL/PB.170/II/2026

No	Nama Kelompok	Alamat	Komoditas	Volume (ekor)	No. BAST	No. SK Penetapan
14	Wajo Bone Berjaya (Jaenal)	Dsn Ringgung, Ds. Gebang, Kec. Teluk Pandan, Pesawaran	Bawal Bintang	5.000	B.564/BBPBL/PB.140/II/2026	B.510/BBPBL/PB.170/II/2026
			JUMLAH	50.000		
Brebes						
15	Mina Sebrogan (Kasnadi)	Ds Pengaradan, Kec. Tanjung, Kab. Brebes	Kakap Putih	35.000	B.724/BBPBL/PB.140/III/2026	B.693/BBPBL/PB.170/II/2026
16	Makmur Jaya (Sapi'i)	Ds. Krakahan Kec. Tanjung, Kab. Brebes	Kakap Putih	35.000	B.723/BBPBL/PB.140/III/2026	B.693/BBPBL/PB.170/II/2026
17	Kajoran Makmur (Abdul Wahidin)	Ds Randusanga Wetan, Kec. Brebes, Kab. Brebes	Kakap Putih	35.000	B.722/BBPBL/PB.140/III/2026	B.693/BBPBL/PB.170/II/2026
			JUMLAH	105.000		
			TOTAL	203.500		

Sebaran bantuan benih ikan laut yang dilakukan oleh BBPBL Lampung pada TW I - 2026 adalah sebanyak 17 Pokdakan yang tersebar pada 4 lokasi, yaitu Bandar Lampung, Sumatera Barat, Pesawaran dan Brebes

Tabel 3.12. Sebaran lokasi dan jumlah penerima bantuan benih ikan laut

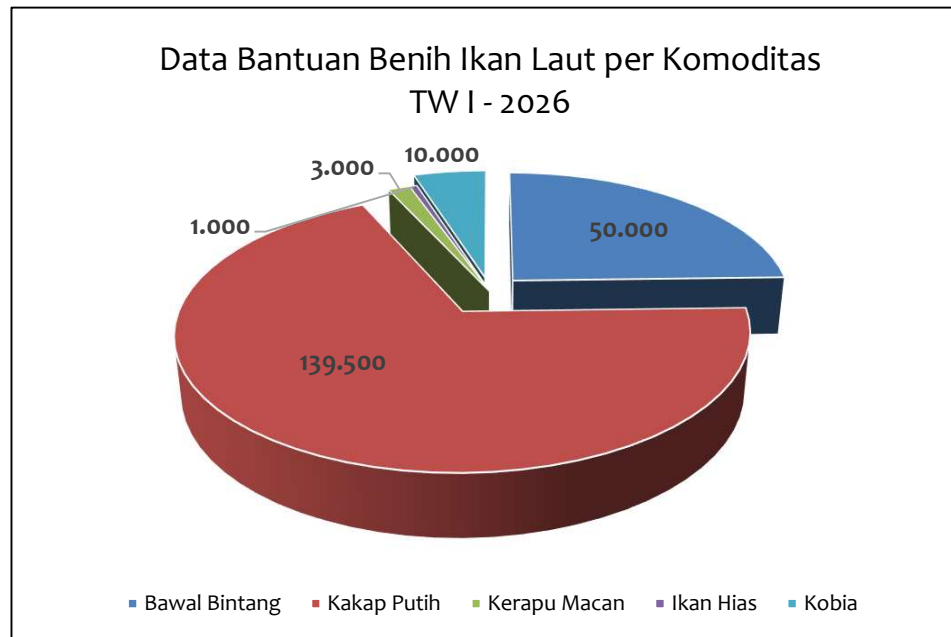
No.	Lokasi	Jumlah benih (ekor)	Jumlah kelompok
1.	Bandar Lampung	23.500	4
2.	Sumatera Barat	25.000	5
3.	Pesawaran	50.000	5
4.	Brebes	105.000	3
	Total	203.500	17

Data bantuan benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung per komoditas pada TW I - 2026 tertera pada tabel 3.13.

Tabel 3.13. Data bantuan benih ikan laut per komoditas

Komoditi	Target	Bulan			Jumlah	%
		Januari	Pebruari	Maret		
Bawal Bintang	150.000	-	50.000	-	50.000	33,33
Kakap Putih		25.000	3.500	111.000	139.500	93,00
Kerapu Bebek		-	-	-	-	-
Kerapu Macan		-	-	3.000	3.000	2,00

Komoditi	Target	Bulan			Jumlah	%
		Januari	Pebruari	Maret		
Ikan Hias		1.000	-		1.000	0,66
Kobia		-	-	10.000	10.000	6,66
Jumlah	150.000	26.000	53.500	124.000	203.500	135,67



Gambar 3.2. Diagram bantuan benih ikan laut per komoditi



Gambar 3.3. Kegiatan penyerahan bantuan benih ikan laut

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Perbandingan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 terhadap periode yang sama pada Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan yang positif. Pada Triwulan I Tahun 2025, capaian penyaluran benih ikan laut tercatat sebanyak 198.200 ekor, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 meningkat menjadi 203.500 ekor.

Dengan demikian, terjadi kenaikan capaian sebesar 5.300 ekor atau sekitar 2,67%. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja dalam proses produksi dan/atau distribusi benih ikan laut oleh BBPBL Lampung. Selain itu, capaian tersebut juga mengindikasikan bahwa upaya optimalisasi kegiatan budidaya dan penyaluran kepada masyarakat berjalan lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum, tren peningkatan ini menunjukkan kinerja yang baik dan perlu dipertahankan, serta terus ditingkatkan melalui penguatan manajemen produksi, kualitas benih, dan ketepatan sasaran distribusi pada periode berikutnya.

Tabel 3.14. Data perbandingan capaian bantuan benih ikan laut lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (ekor)		Realisasi (ekor)	%	
		Tahunan	TW I		Tahunan	TW I
1.	BBPBL Lampung	1.324.831	150.000	203.500	15,36	135,67
2.	BPBAL Lombok	692.699	70.000	80.000	11,55	114,29
3.	BPBAL Ambon	1.088.624	150.000	150.000	13,78	100
4.	BPBAL Batam	987.558	53.000	53.000	5,37	100

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Anggaran benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung sebesar Rp. 5.458.322.000 target sebanyak 1.324.831 ekor. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja produksi telur sebesar Rp. 1.245.545.000, pendederan I sebesar Rp. 1.331.040.000, pendederan II sebesar 787.137.000, distribusi sebesar Rp. 1.125.671.000, dan sarana pendukung sebesar 524.461.000. Realisasi anggaran sampai dengan TW I – 2026 sebesar Rp. 1.767.116.485 (32,37%), dengan rincian realisasi produksi telur sebesar Rp. 419.868.532, pendederan I sebesar 946.375.807, pendederan II sebesar 249.650.000, distribusi sebesar Rp. 70.703.750 dan sarana pendukung sebesar Rp. 28.860.000

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Kebhasilan capaian ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Ketersediaan benih yang memadai, baik dari hasil produksi internal maupun dukungan unit produksi.
2. Perencanaan distribusi yang efektif, sehingga penyaluran dapat dilakukan lebih cepat dari target.

3. Koordinasi yang baik dengan kelompok masyarakat penerima bantuan, sehingga proses distribusi berjalan lancar.
4. Kondisi lingkungan budidaya yang relatif mendukung, sehingga produksi benih tidak mengalami hambatan signifikan.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

1. Membuat daftar antrian untuk proposal yang masuk dan jumlah ikan yang didistribusikan disesuaikan dengan kapasitas produksi yang ada

REKAPITULASI PROPOSAL BENIH MASUK									
No.	Kelompok/Ketua/No.HP	Alamat	Tgl Diterima Proposal	Jenis Komoditas	Volume permintaan	BPJS	NO. KUSUKA	CPL	JUMLAH REALISASI
1	SKC SFI CAKRA SAMUDRA Misiati Eleni 0878 7260 0612	Kp. Kedungsoka, Desa Kedungsoka, Kec. Pulo Ampel, Serang	10/06/2023	Bawal Bintang	12.000	BLM ADA	TIDAK TERDAFTAR		
2	Arung Laut Sejahtera Saparjo	Desa Margo saru, lili Talo, kabupaten seluma	2/16/2024	kerapu	5.000	BLM ADA	02001705787850		
3	Samudera Biru lestari Wanadi 0831 7369 1194	Desa Gebang, kec. Teluk Pandan, Pesawaran	12/10/2026	Bawal Bintang	10.000	0000354164218	41161347/SK/V1.10.03/VIM2019		
4	Wajo Bone Berjaya Jaenal 0812 7866 1939	Desa Siddodadi, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	10/10/2026	Bawal Bintang kakap	10.000 10.000	ADA	0210218093299591		
5	Singa laut Vati 0838 40389542	Pulau pasaran, LK II, Kota Karang, Telukbetung Timur bandar Lampung	11/19/2025	kakap putih kerapu kobis Bawal Bintang	12.000 15.000 12.000 10.000	0002731771432	0210218716740231		
6	Lux Pinggang Berjaya Promy S Utama L 0893 8015 2856	Ds. Siddodadi Kc. Teluk pandan Pesawaran	21 Okt 2025	Bawal Bintang kakap	10.000 10.000	ADA	0210218094071706		
7	Putra Sanjaya Abadi Muhroji 0892 0053 66632 0821 3537 3394	desa tambak muljo kec. Puring Kab. Kebumen Jawa Tengah	30 Okt 2025	kakap putih	25.000	BLM ADA	ada tapi KUSUKA perseorangan		
8	Kolak Sekancil Antonius Joni Planto 0812 2854 0162	Dsn. Lempong Puung, Desa Ujungalang, Kec. Kampung Laut, Kab.	10/25/2024	calin kakap	10.000	BLM ADA	TIDAK TERDAFTAR		
10	Vindu Jaya Jiman 0859 7294 2209	Desa Binangun, Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap	10/25/2024	kakap	10.000	BLM ADA	TIDAK TERDAFTAR		
11	Mina Salugu Suwardi	Jln. Pondok Bali, Desa Magangan, Kec. Legonkulon, Kab.	8/4/2024	kakap	10.000	BLM ADA	TIDAK TERDAFTAR		
12	Bintang Timur bersaudara Jaya Mandiri Jamaludin, S.Kom 0812 7860 1939	Desa Pinvopo, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur	8/23/2024	kakap	30.000	ALIR	0030218014538262		
13	Kelompok Teluk Shudra	Desa Siddodadi, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran		Bawal Bintang	10.000	ADA	021021809376673680		

Gambar 3.4. Daftar rekapitulasi proposal yang masuk ke BBPBL Lampung

2. Menyusun RAB biaya pengiriman bantuan benih ikan laut

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)							
Kegiatan		: Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat					
Pekerjaan		: Pengiriman Bantuan Benih Kakap Putih Ke Kelompok Penerima Bantuan					
Lokasi		: Pesisir Selatan, Sumatera Barat					
Volume		: 25.000 Ekor					
Tahun Anggaran		: 2026					
NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	Pajak 11%	JUMLAH (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Transportasi Darat PP (Truck 125 PS)	Ls	Ls	1	18.018.018	11%	20.000.000
2	Transportasi Darat PP (Mobil MPV)	Ls	Ls	1	7.027.027	11%	7.800.000
3	Biaya Packing dan Muat	Koli	Koli	125	20.495	11%	2.843.750
4	Teknisi Pendamping (4 Orang x 5 Hari)	OK	OK	20	270.270	11%	6.000.000
TOTAL							36.643.750

Pesawaran, 19 Januari 2026
Rejabat Pembuat Komitmen



Sunaryat, SP, SKM

Gambar 3.5. RAB pengiriman bantuan benih ikan laut

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Meskipun capaian melampaui target, masih terdapat beberapa kendala :

1. Distribusi yang tidak merata secara geografis, terutama ke wilayah yang sulit dijangkau.
2. Monitoring pasca-penyaluran yang belum optimal, sehingga tingkat keberhasilan pemanfaatan benih di masyarakat belum sepenuhnya terukur.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Untuk mendukung pencapaian target kegiatan produksi benih ikan laut oleh BBPBL Lampung, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem perencanaan distribusi berbasis wilayah prioritas, agar penyaluran lebih merata.
2. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pasca-penyaluran, guna memastikan keberlanjutan hasil bantuan.

SK. 2. TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT

IKU 5. SAMPEL UJI LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN IKAN AIR LAUT OLEH BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.15. Capaian Sasaran Kegiatan 2, pada IKU 5

Sasaran Kegiatan-2		Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut						
IKU-5		Sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ikan air laut oleh BBPBL Lampung (sampel)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
293	200	50	152	304,00	-92,76	52.849.000	1.100.000	2,08

Sumber : Tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama (IKU-5) yaitu Sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ikan air laut oleh BBPBL Lampung (sampel) pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang sangat baik.

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi capaian tercatat sebanyak 152 sampel dari target triwulan sebesar 50 sampel, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 304,00%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target yang ditetapkan secara signifikan.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya (Triwulan I Tahun 2025) yang sebesar 293 sampel, terjadi penurunan sebesar - 92,76%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun target tahun 2026 telah terlampaui, volume pengujian sampel masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

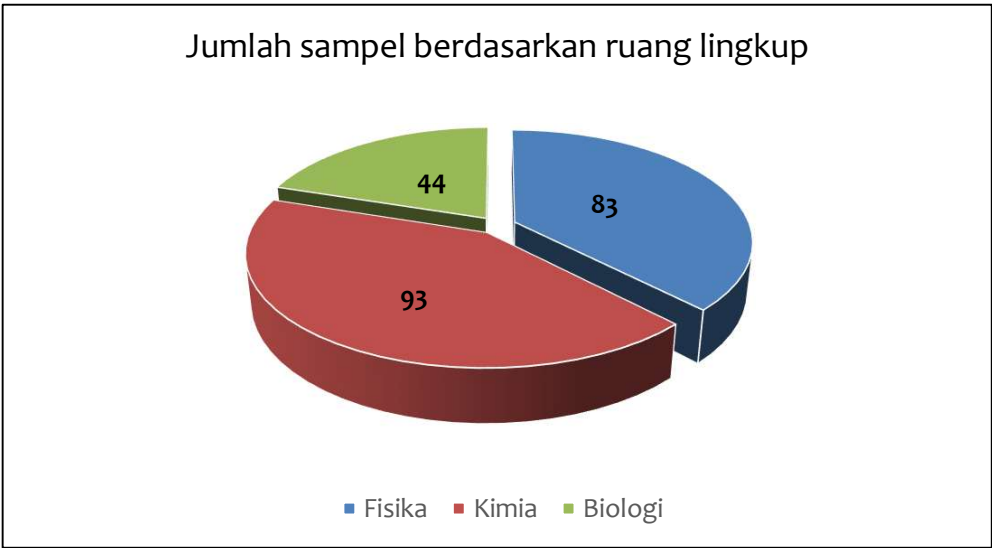
Pengujian sampel uji kualitas air berdasarkan ruang lingkup terdiri atas :

- a. Ruang lingkup parameter fisika, yang terdiri atas kedalaman, kecerahan, suhu, salinitas, Oksigen Terlarut (DO), dan Derajat Keasaman (pH)
- b. Ruang lingkup parameter kimia, yang terdiri atas Alkalinitas Total, Kesadahan Total, Nitrit (NO₂), Nitrat (NO₃), Amonia (NH₃), Phospat (PO₄-P), Bahan Organik Total (TOM), Padatan Tersuspensi Total (TSS), dan TDS
- c. Ruang lingkup parameter biologi, yang terdiri atas identifikasi plankton atau kelimpahan

Pengujian sampel kualitas air meliputi 3 ruang lingkup, yaitu parameter fisika, parameter kimia dan parameter biologi. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka jumlah sampel sebanyak 220 sampel, seperti pada tabel 3.16

Tabel 3.16. Data jumlah sampel uji kualitas air berdasarkan ruang lingkup TW I - 2026

Bulan	Jenis Sampel			Jumlah
	Fisika	Kimia	Biologi	
Januari	39	40	12	91
Pebruari	23	33	14	70
Maret	21	20	18	59
Jumlah	83	93	44	220



Gambar 3.6. Diagram jumlah sampel berdasarkan ruang lingkup



Gambar 3.7. Kegiatan pengambilan sampel kualitas air

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-5) pada Triwulan I Tahun 2026 dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan jumlah sampel yang diuji. Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebanyak 293 sampel, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 realisasi mencapai 152 sampel.

Dengan demikian, terjadi penurunan capaian sebesar 141 sampel atau -92,76%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa volume layanan pengujian laboratorium pada Triwulan I Tahun 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa capaian pada Triwulan I Tahun 2026 telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga dari sisi pencapaian target kinerja tetap menunjukkan hasil yang sangat baik. Perbedaan capaian antar tahun ini kemungkinan dipengaruhi oleh variasi jumlah permintaan layanan pengujian, kegiatan operasional, maupun faktor teknis lainnya.

Tabel 3.17. Data perbandingan capaian sampel uji laboratorium lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (sampel)		Realisasi (sampel)	%	
		Tahunan	TW I		Tahunan	TW I
1.	BBPBL Lampung	200	50	152	76,00	304,00
2.	BPBAL Lombok	582	147	180	30,93	122,45
3.	BPBAL Ambon	700	161	166	23,71	103,11
4.	BPBAL Batam	360	130	160	44,44	123,08

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Anggaran sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ikan air laut oleh BBPBL Lampung sebesar Rp. 52.849.000 target sebanyak 200 sampel. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja bahan sebesar Rp. 4.048.000, barang persediaan sebesar Rp. 28.854.000, jasa lainnya sebesar 15.747.000, dan perjalanan dinas sebesar 4.200.000. Realisasi anggaran sampai dengan TW I – 2026 sebesar Rp. 1.100.000 (2,08%), dengan rincian realisasi perjalanan dinas sebesar Rp. 1.100.000

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-5) pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dikategorikan berhasil, bahkan sangat berhasil dalam hal pemenuhan target kinerja. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi sebesar 152 sampel dari target triwulan sebesar 50 sampel, dengan tingkat capaian mencapai 304,00%. Tingginya capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengujian laboratorium telah berjalan dengan baik dan melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan.

Kebhasilan tersebut antara lain didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana laboratorium, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta adanya permintaan layanan pengujian yang tetap berjalan pada awal tahun. Selain itu, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan juga turut berkontribusi terhadap tingginya capaian output.

Namun demikian, jika dilihat dari perbandingan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025, terjadi penurunan jumlah sampel yang diuji. Hal ini menunjukkan bahwa secara volume layanan, capaian tahun 2026 belum sepenuhnya menyamai kinerja tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan pengujian, perbedaan waktu pelaksanaan kegiatan, atau faktor teknis lainnya.

Di sisi lain, realisasi anggaran yang masih rendah yaitu sebesar 2,08% juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya optimal dari aspek penyerapan anggaran. Hal ini dapat disebabkan oleh sebagian kegiatan yang masih dalam tahap awal pelaksanaan atau belum terealisasi pada Triwulan I.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Pada periode sebelumnya (TW IV - 2025) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja berupa sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ikan air laut oleh BBPBL Lampung. Hal ini dikarenakan IKU tersebut tidak ada dalam Penetapan Kinerja 2025, sehingga tidak ada capaian keuangan dan fisik. Sampel kualitas air pada tahun 2025 masuk dalam IKU jumlah sampel ikan air laut dan nutrisi pakan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan satker BBPBL Lampung.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Meskipun capaian melampaui target, masih terdapat beberapa kendala :

1. Kegiatan pengujian yang bersifat demand-driven (berdasarkan permintaan), sehingga jumlah sampel sangat bergantung pada pihak eksternal.
2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan laboratorium yang didukung anggaran pada awal tahun, sehingga penyerapan anggaran masih rendah.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Untuk mendukung pencapaian target kegiatan sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ikan air laut oleh BBPBL Lampung, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengujian yang telah direncanakan agar penyerapan anggaran dapat lebih maksimal.
2. Menyusun strategi proaktif dalam pengumpulan sampel, tidak hanya menunggu permintaan, tetapi juga melalui kegiatan jemput bola atau kerja sama dengan pihak terkait.

SK. 2. TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT

IKU 6. SAMPEL MONITORING PENYAKIT IKAN AIR LAUT YANG DIUJI OLEH BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.18. Capaian Sasaran Kegiatan 2, pada IKU 6

Sasaran Kegiatan-2		Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut						
IKU-6		Sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji oleh BBPBL Lampung (sampel)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
139	160	40	40	100	-71,22	217.700.000	36.405.000	16,72

Sumber : Tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengujian penyakit ikan air laut telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan:

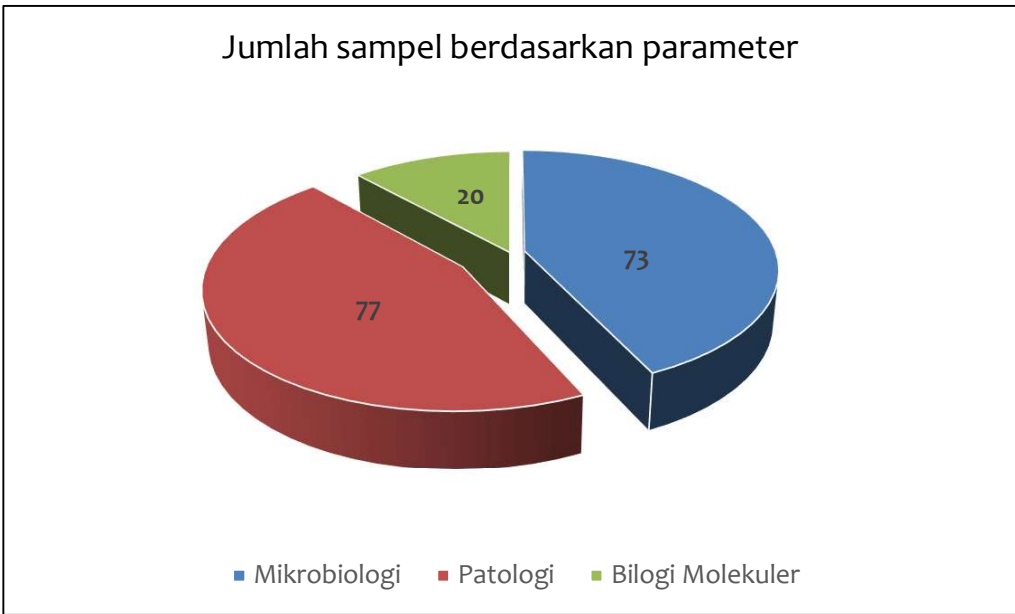
- Perencanaan kegiatan yang lebih terukur dan realistis
- Efektivitas pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel
- Kesiapan sarana dan prasarana laboratorium dalam mendukung kegiatan

Meskipun demikian, dari sisi kuantitas, capaian tahun 2026 lebih rendah dibandingkan tahun 2025, sehingga perlu dicermati agar tidak berdampak pada cakupan monitoring kesehatan ikan secara keseluruhan.

Pengujian sampel monitoring penyakit ikan air laut meliputi 3 parameter pengujian, yaitu parameter mikrobiologi (non AMR), parameter patologi dan parameter biologi molekular. Berdasarkan parameter pengujian tersebut, maka jumlah sampel sebanyak 170 sampel, seperti pada tabel 3.19.

Tabel 3.19. Data sampel monitoring penyakit ikan air laut berdasarkan parameter pengujian

Bulan	Jenis Sampel			Jumlah
	Mikrobiologi (Non AMR)	Patologi	Biologi Molekular	
Januari	16	16	4	36
Pebruari	42	40	15	97
Maret	15	21	1	34
Jumlah	73	77	20	170



Gambar 3.8. Diagram jumlah sampel berdasarkan parameter



Gambar 3.9. Kegiatan pengambilan sampel monitoring penyakit ikan air laut

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi pengujian sampel monitoring penyakit ikan air laut tercatat sebanyak 139 sampel. Sementara itu, pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi mencapai 40 sampel dari target triwulan sebesar 40 sampel, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Namun, jika dibandingkan secara absolut, terjadi penurunan jumlah sampel yang diuji dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan penetapan target, di mana pada Tahun 2026 target triwulan telah disesuaikan menjadi lebih kecil (40 sampel) dibanding realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 3.20. Data perbandingan capaian sampel monitoring penyakit ikan laut lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (sampel)		Realisasi (sampel)	%	
		Tahunan	TW I		Tahunan	TW I
1.	BBPBL Lampung	160	40	40	25,00	100
2.	BPBAL Lombok	60	10	22	36,67	220
3.	BPBAL Ambon	60	10	23	16,67	230
4.	BPBAL Batam	60	15	29	48,33	193,33

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Anggaran sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji oleh BBPBL Lampung sebesar Rp. 217.700.000 target sebanyak 200 sampel. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja bahan sebesar Rp. 6.883.000, barang persediaan sebesar Rp. 181.599.000, jasa lainnya sebesar 20.818.000, dan perjalanan dinas sebesar 8.400.000. Realisasi anggaran sampai

dengan TW I – 2026 sebesar Rp. 36.405.000 (16,72%), dengan rincian realisasi barang persediaan Rp. 35.305.000 dan perjalanan dinas sebesar Rp. 1.100.000

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-6) berupa jumlah sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji oleh BBPBL Lampung mencapai 40 sampel atau 100% dari target triwulan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, secara administratif dan operasional, capaian indikator ini dapat dikategorikan berhasil, karena telah memenuhi target output sesuai dengan perencanaan kinerja pada periode pelaporan.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengujian dan monitoring penyakit ikan air laut telah berjalan sesuai dengan rencana kerja, serta didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana laboratorium, maupun mekanisme koordinasi pelaksanaan kegiatan.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 139 sampel, realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan penurunan sebesar 71,22%. Penurunan ini tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja, melainkan lebih disebabkan oleh adanya perbedaan dalam penetapan target kinerja, khususnya distribusi target triwulanan yang pada Tahun 2026 direncanakan lebih proporsional dan bertahap sepanjang tahun anggaran.

Selain itu, dari aspek penyerapan anggaran, realisasi hingga Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar Rp36.405.000 atau 16,72% dari total pagu anggaran. Tingkat serapan ini relatif masih rendah, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya optimal pada awal tahun anggaran, meskipun secara output fisik telah mencapai target yang ditetapkan.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Pada periode sebelumnya (TW IV - 2025) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja berupa sampel monitoring penyakit ikan air laut oleh BBPBL Lampung. Hal ini dikarenakan IKU tersebut tidak ada dalam Penetapan Kinerja 2025, sehingga tidak ada capaian keuangan dan fisik. Sampel monitoring penyakit ikan pada tahun 2025 masuk dalam IKU jumlah sampel ikan air laut dan nutrisi pakan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan satker BBPBL Lampung. Pada TW IV – 2025, terdapat permasalahan pada alat ukur lemak pada uji proksimat, akan tetapi pada tahun 2026 pengujian proksimat tidak masuk dalam sampel yang diuji oleh BBPBL Lampung.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU-6) pada Triwulan I Tahun 2026, meskipun target kinerja telah tercapai secara optimal, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Ketidakseimbangan distribusi target kinerja antar triwulan
Penetapan target yang relatif kecil pada Triwulan I menyebabkan capaian terlihat menurun signifikan apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,.
2. Penurunan volume kegiatan dibandingkan tahun sebelumnya
Realisasi pengujian sampel yang lebih rendah dibandingkan Triwulan I Tahun 2025 mengindikasikan adanya penurunan intensitas kegiatan pada awal tahun anggaran, baik yang disebabkan oleh faktor perencanaan maupun pelaksanaan.
3. Potensi keterbatasan permintaan sampel uji
Jumlah sampel yang diuji sangat bergantung pada permintaan layanan pengujian dan kegiatan monitoring di lapangan, sehingga fluktuasi permintaan dapat mempengaruhi capaian kinerja secara langsung.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-6) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan perencanaan dan distribusi target kinerja
Melakukan penyesuaian terhadap distribusi target antar triwulan agar lebih proporsional dan mencerminkan pola pelaksanaan kegiatan yang realistis, sehingga capaian kinerja antar periode dapat dibandingkan secara lebih objektif dan representatif.
2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran
Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengujian sampel pada Triwulan I melalui perencanaan operasional yang lebih matang, guna menghindari penumpukan kegiatan pada triwulan berikutnya.
3. Peningkatan koordinasi dan perluasan sumber sampel
Mengoptimalkan koordinasi dengan unit teknis, pembudidaya, dan pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan jumlah dan kontinuitas sampel yang diuji, sehingga capaian kinerja lebih stabil sepanjang tahun.

SK. 2. TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT
IKU 7. SAMPEL SURVAILLANCE RESISTENSI ANTIMIKROBA IKAN AIR LAUT (AMU/AMR) YANG DIUJI OLEH BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.21. Capaian Sasaran Kegiatan 2, pada IKU 7

Sasaran Kegiatan-2		Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut						
IKU-7		Sampel survaillance resistensi antimikroba ikan air laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BBPBL Lampung (sampel)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
12	75	21	35	166,67	191,67	44.173.000	1.261.000	2,85

Sumber : Tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

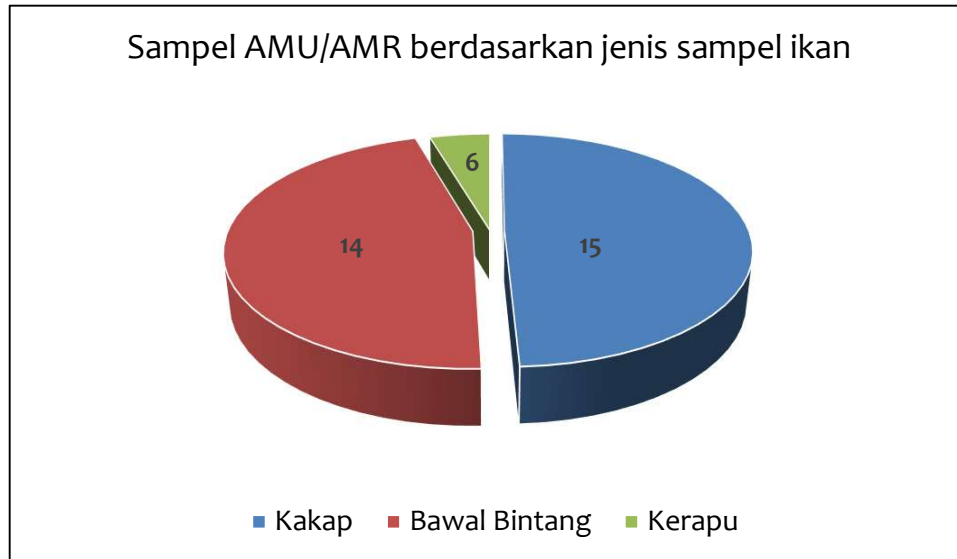
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-7) berupa jumlah sampel surveilans resistensi antimikroba (AMU/AMR) ikan air laut yang diuji oleh BBPBL Lampung tercatat sebesar 35 sampel dari target triwulan sebesar 21 sampel, sehingga diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 166,67%. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga dapat dikategorikan sangat berhasil.

Tingginya capaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan surveilans resistensi antimikroba telah berjalan secara optimal dan responsif terhadap kebutuhan pengujian di lapangan. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan efektivitas koordinasi pelaksanaan kegiatan serta kesiapan sumber daya dalam mendukung peningkatan jumlah sampel yang diuji.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 12 sampel, realisasi pada periode pelaporan mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 191,67%, yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja baik dari sisi intensitas kegiatan maupun cakupan layanan pengujian.

Tabel 3.22. Perincian sampel AMU/AMR

Bulan	Jenis Sampel			Jumlah
	Januari	Pebruari	Maret	
Kakap	2	9	4	15
Bawal Bintang	5	5	4	14
Kerapu	1	5	0	6
Jumlah	8	19	8	35



Gambar 3.10. Diagram jumlah sampel berdasarkan jenis sampel ikan



Gambar 3.11. Kegiatan pengambilan sampel AMU/AMR

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 yang sebesar 12 sampel, terjadi peningkatan signifikan sebesar 191,67%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas pengujian serta komitmen dalam penguatan sistem surveillance resistensi antimikroba pada ikan air laut.

Tabel 3.23. Data perbandingan capaian sampel AMU/AMR lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (sampel)		Realisasi (sampel)	%	
		Tahunan	TW I		Tahunan	TW I
1.	BBPBL Lampung	75	21	35	28	166,67
2.	BPBAL Lombok	25	4	4	16	100
3.	BPBAL Ambon	50	10	12	24	120
4.	BPBAL Batam	66	18	20	30,30	111,11

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Anggaran sampel surveillance resistensi antimikroba ikan air laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BBPBL Lampung sebesar Rp. 44.173.000 target sebanyak 75 sampel. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja barang persediaan sebesar Rp. 37.173.000 dan perjalanan dinas sebesar 7.000.000. Realisasi anggaran sampai dengan TW I – 2026 sebesar Rp. 1.261.000 (2,85%), dengan rincian realisasi perjalanan dinas sebesar Rp. 1.261.000

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Capaian IKU-7 pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dikategorikan berhasil (sangat tinggi), dengan rincian faktor pendukung sebagai berikut:

- Realisasi melampaui target (166,67%), menunjukkan pelaksanaan kegiatan surveillance AMU/AMR berjalan optimal bahkan melebihi rencana.
- Peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya (191,67%), yang mengindikasikan adanya perbaikan perencanaan, peningkatan kapasitas laboratorium, serta intensifikasi kegiatan pengambilan dan pengujian sampel.
- Efisiensi pelaksanaan kegiatan, terlihat dari capaian output yang tinggi dengan serapan anggaran yang masih rendah (2,85%), sehingga menunjukkan penggunaan sumber daya yang relatif hemat pada tahap awal.

Meskipun kinerja sangat baik, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

- Rendahnya penyerapan anggaran, yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara capaian fisik dan keuangan apabila tidak segera diakselerasi pada triwulan berikutnya.
- Risiko ketidaktersebaran kegiatan sepanjang tahun, karena capaian yang sudah tinggi di awal tahun dapat menyebabkan penurunan intensitas kegiatan di triwulan selanjutnya jika tidak direncanakan dengan baik.
- Kemungkinan perencanaan target yang kurang realistis, sehingga target TW I relatif rendah dibandingkan kapasitas aktual.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

1. Telah melakukan identifikasi isolat bakteri yaitu bakteri *Vibrio alginolyticus*.

Tabel 3.24. Data hasil identifikasi isolate bakteri

No	Komoditas	Target Sampel Per Tahun	Realisasi Bulan Februari	Target Bakteri	Hasil identifikasi		Hasil Uji AST	Lokasi sampling
					positif	negatif		
1.	Kakap	25	9	<i>Vibrio alginolyticus</i>	dalam proses		dalam proses	Pesawaran (8 sampel), Lampung Selatan (1 sampel)
2.	Bawal	25	5	<i>Vibrio alginolyticus</i>	dalam proses		dalam proses	Pesawaran (1 sampel), Bandar Lampung (2 sampel), Lampung selatan (2 sampel)
3.	Kerapu	25	5	<i>Vibrio alginolyticus</i>	dalam proses		dalam proses	Bandar Lampung (2 sampel), Lampung selatan (3 sampel)

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU-7) pada Triwulan I Tahun 2026, meskipun target kinerja telah tercapai secara optimal, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain :

1. Sampel belum diuji, hasil uji AST (Antimicrobial Sensitivity Test) masih dalam proses dan hasil uji AST (Antimicrobial Sensitivity Test) baru dapat dilakukan bila sudah ditemukan isolate target yaitu : bakteri *Vibrio alginolyticus*

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-7) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Pengujian ATS (Antimicrobial Sensitivity Test) harus segera dilakukan, bila telah ditemukan isolat bakteri yang diinginkan untuk mendapatkan resistensiantibikrobia (AMR) nya

SK. 3. TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR PAYAU
IKU 8. PAKAN IKAN YANG DIPRODUKSI UNTUK OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.25. Capaian Sasaran Kegiatan 3, pada IKU 8

Sasaran Kegiatan-3		Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air payau						
IKU-8		Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) BBPBL Lampung (kg)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	6.211	-	-	-	-	70.000	-	-

Sumber : Tim Kerja Produksi dan Bantuan-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan I Tahun 2026, indikator Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional UPT BBPBL Lampung belum menunjukkan capaian kinerja, ditandai dengan tidak adanya target maupun realisasi pada periode tersebut (0 kg).

Target produksi pakan ikan ditetapkan sebesar 6.211 kg untuk tahun 2026, namun hingga Triwulan I belum terdapat progres pelaksanaan, sehingga persentase capaian belum dapat dihitung. Selain itu, jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025, tidak terdapat data realisasi, sehingga tidak dapat dilakukan analisis kenaikan atau penurunan kinerja.

Dari sisi anggaran, total alokasi sebesar Rp70.000 juga belum terealisasi (0%), yang mengindikasikan bahwa kegiatan produksi pakan belum dilaksanakan pada awal tahun.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Kinerja IKU-8 pada Triwulan I Tahun 2026 relatif sama dengan Triwulan I Tahun 2025 (tidak ada capaian). Hal ini mengindikasikan bahwa belum terdapat peningkatan maupun penurunan kinerja pada periode awal tahun, sehingga perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pada triwulan selanjutnya agar target tahunan dapat tercapai.

Tabel 3.26. Data perbandingan capaian produksi pakan ikan air laut lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (kg)		Realisasi (kg)	%	
		Tahunan	TW I		Tahunan	TW I
1.	BBPBL Lampung	6.211	-	-	-	-
2.	BPBAL Lombok	-	-	-	-	-
3.	BPBAL Ambon	-	-	-	-	-
4.	BPBAL Batam	-	-	-	-	-

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Anggaran pakan ikan yang diproduksi untuk operasional UPT BBPBL Lampung sebesar Rp. 70.000.000 target sebanyak 6.211 kg. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja barang persediaan sebesar Rp. 65.874.000 dan jasa lainnya sebesar Rp. 4.125.000. Realisasi anggaran sampai dengan TW I – 2026 sebesar Rp. 0 (0%).

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Keberhasilan

Pada Triwulan I Tahun 2026, tidak terdapat keberhasilan yang dapat diidentifikasi karena kegiatan produksi pakan ikan belum dilaksanakan, sehingga belum ada output yang dihasilkan.

2. Kegagalan / Ketidaktercapaian

Capaian kinerja IKU-8 pada periode ini dapat dikategorikan belum berhasil, dengan beberapa faktor penyebab sebagai berikut :

- Tidak adanya target dan realisasi pada TW I, sehingga capaian kinerja tercatat 0%.
- Kegiatan produksi belum dimulai, yang mengindikasikan adanya penjadwalan kegiatan yang tidak dilakukan sejak awal tahun.
- Serapan anggaran 0%, menunjukkan bahwa seluruh aktivitas pendukung produksi belum berjalan.
- Perencanaan kinerja yang kurang terdistribusi, di mana target tahunan tidak dibagi ke dalam target triwulanan, sehingga kontrol terhadap progres menjadi lemah.

3. Faktor Penyebab Utama

- Kegiatan kemungkinan memang direncanakan pada triwulan berikutnya (pola musiman atau kebutuhan operasional).
- Adanya keterlambatan persiapan teknis, seperti pengadaan bahan baku, kesiapan sarana/prasarana, atau administrasi kegiatan.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

1. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kebutuhan bahan baku

Dasar Perhitungan

- Output pakan jadi: 6.211 kg, Pagu anggaran: Rp 70.000.000,-
- Loss produksi: 8- 10%
- Kebutuhan bahan baku: ± 6.901 kg
- Formulasi: protein $\pm 36\%$

Tabel 3.27. Harga Perkiraan Sendiri untuk produksi pakan ikan laut

No	Bahan baku	Volume (kg)	Harga Satuan (Rp/kg)	Jumlah (Rp)
1	Tepung ikan lokal	1.518,24	18.000	27.328.400
2	Bungkil kedelai	2.001,32	9.000	18.011.900
3	Tepung darah	621,10	8.000	4.968.800
4	Tepung jagung	1.104,18	5.000	5.520.889
5	Dedak halus	759,12	4.000	3.036.489
6	Tepung terigu	345,06	6.500	2.242.861
7	Minyak ikan	207,03	20.000	4.140.667
8	Tepung tulang	207,03	3.000	621.100
9	Premix vitamin-mineral	69,01	25.000	1.725.278
10	Binder	69,01	7.000	483.078
Total HPS				68.079.462

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Berdasarkan capaian kinerja yang belum terealisasi pada Triwulan I, terdapat beberapa permasalahan utama sebagai berikut :

1. Potensi keterlambatan proses operasional
Kegiatan yang belum berjalan dapat disebabkan oleh keterlambatan persiapan, seperti pengadaan bahan baku, kesiapan peralatan, maupun administrasi pendukung.
2. Risiko penumpukan kegiatan pada triwulan berikutnya
Ketidadaan capaian di Triwulan I berpotensi menyebabkan beban kerja dan kebutuhan anggaran menumpuk pada triwulan selanjutnya.
3. Risiko tidak tercapainya target tahunan
Jika tidak segera dilakukan percepatan, terdapat kemungkinan target produksi 6.211 kg tidak tercapai secara optimal hingga akhir tahun.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-8) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan produksi
Segera memulai proses produksi pakan pada Triwulan II dengan memastikan seluruh tahapan persiapan telah selesai.

2. Peningkatan kesiapan sarana dan prasarana
Memastikan seluruh peralatan produksi, bahan baku, dan SDM dalam kondisi siap sehingga kegiatan dapat berjalan tanpa hambatan.
3. Penjadwalan kegiatan yang lebih optimal
Menyusun jadwal produksi yang realistis dan merata sepanjang tahun guna menghindari penumpukan pekerjaan di akhir periode.

SK. 4. TERKELOLANYA SISTEM PRASARANA DAN SARANA PERIKANAN BUDIDAYA

IKU 9. SARANA PERIKANAN BUDIDAYA YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT OLEH BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.28. Capaian Sasaran Kegiatan 4, pada IKU 9

Sasaran Kegiatan-4		Terkelolanya sistem prasarana dan sarana perikanan budidaya						
IKU-9		Sarana perikanan budidaya yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung (unit)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	35	-	-	-	-	7.395.270.000	56.783.427	0,77

Sumber : Tim Kerja Sarana Prasarana-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

IKU 9 yaitu sarana perikanan budidaya yang disalurkan kemasyarakat oleh BBPBL Lampung terdiri atas 2 kegiatan, yaitu :

1. Bantuan bioflok dengan target 25 unit
2. Bantuan mesin pakan dan bahan baku dengan target 10 unit

Progress report bantuan sarana dan sarana BBPBL Lampung sampai dengan akhir bulan Maret 2026 berdasarkan usulan yang masuk dari aspirasi komisi IV DPR RI adalah

Tabel 3.29. Data usulan aspirasi bantuan bioflok dan mesin pakan

NO	NAMA	DAPIL	KUOTA	USULAN
A. MESIN DAN BAHAN BAKU PAKAN IKAN				
1	Arif Rahman	Banten I	1	0
2	drh. I Ketut Suwendra, M.M.	Lampung II	1	1
3	Ir. Dwita Ria Gunadi	Lampung II	1	1
4	Ir. H. Irham Jafar Lan Putra, M.H.	Lampung II	1	1
5	Sonny T. Danaparamita, S.H.	Jawa Timur III	1	0
6	Sumail Abdullah	Jawa Timur III	1	0
7	Muhammad Habibur Rochman, S.E.	Jawa Timur VIII	1	0
8	Riyono, S.Kel., M.Si.	Jawa Timur VII	1	0
9	Reguler 1		1	0
10	Reguler 2		1	0

NO	NAMA	DAPIL	KUOTA	USULAN
B. BIOFLOK				
1	Arif Rahman	Banten I	5	0
2	drh. I Ketut Suwendra, M.M.	Lampung II	5	1
3	Ir. Dwita Ria Gunadi	Lampung II	5	1
4	Ir. H. Irham Jafar Lan Putra, M.H.	Lampung II	5	2
5	Reguler		5	0

a. Bantuan Sarana Budidaya Bioflok

Sampai dengan Maret 2026 baru terdapat 4 kelompok pembudidaya ikan yang diusulkan oleh 3 anggota komisi IV DPR RI. Dari total 25 paket kuota bantuan bioflok BBPBL Lampung jumlah ini terhitung masih sangat sedikit. Total usulan per Maret 2026 adalah :

Tabel 3.30. Data usulan bantuan bioflok yang telah diterima BBPBL Lampung

No	Komisi IV DPR RI	USULAN	
		POKDAKAN	ALAMAT
1.	drh. I Ketut Suwendra, M.M.	Garda Samudra III	Desa Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau
2.	Ir. Dwita Ria Gunadi	Pokdakan Diraya Mina Mandiri	Desa Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah, Lampung
3.	Ir. H. Irham Jafar Lan Putra, M.H.	Mina Usaha Manggus Jaya	Desa Kota alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung
		Tirta Muda Sembada	Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Lampung

b. Bantuan mesin dan bahan baku pakan

Sampai dengan Maret 2026 baru terdapat 3 kelompok pembudidaya ikan yang diusulkan oleh 3 anggota komisi IV DPR RI. Dari total 10 paket kuota bantuan mesin dan bahan baku pakan BBPBL Lampung jumlah ini terhitung masih sangat sedikit. Total usulan per Maret 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31 Data usulan bantuan mesin dan bahan baku pakan yang telah diterima

No	Komisi IV DPR RI	USULAN	
		POKDAKAN	ALAMAT
1	drh. I Ketut Suwendra, M.M.	Pokdakan Tunas Mekar	Desa Tirta Kencana, Kecamatan tulang Bawang tengah, Kabupaten Tulang Bawang barat, Lampung
2	Ir. Dwita Ria Gunadi	Pokdakan Partner Lele	Desa Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung
3	Ir. H. Irham Jafar Lan Putra, M.H.	Pokdakan Mina way lima	Desa Semuli, Kec. Abung semuli, Kabupaten Lampung Utara, Lampung

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Pada TW I Tahun 2025 juga tidak terdapat realisasi (0 unit), sehingga tidak terjadi kenaikan capaian (0%). Kondisi ini menunjukkan pola yang konsisten bahwa kegiatan penyaluran sarana umumnya belum dilakukan pada awal tahun anggaran.

Tabel 3.32. Data perbandingan capaian sarana perikanan budidaya lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (unit)		Realisasi (unit)	%	
		Tahunan	TW I		Tahunan	TW I
1.	BBPBL Lampung	35	-	-	-	-
2.	BPBAL Lombok	28	-	-	-	-
3.	BPBAL Ambon	26	-	-	-	-
4.	BPBAL Batam	11	-	-	-	-

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Anggaran sarana perikanan budidaya yang disalurkan ke 54 masyarakat oleh BBPBL Lampung sebesar Rp. 7.395.270.000 target sebanyak 35 unit, yang terdiri atas bantuan bioflok sebanyak 25 unit dan bantuan mesin dan bahan baku pakan sebanyak 10 unit. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan bioflok sebesar Rp. 5.721.800.000 dan bantuan mesin dan bahan baku pakan sebesar Rp 1.673.470.000. Realisasi anggaran sampai dengan TW I – 2026 sebesar Rp. 56.783.427 (0,77%), dengan rincian bantuan bioflok pada belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 54.613.427 dan kegiatan bantuan mesin dan bahan baku pakan pada belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 2.170.000

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Belum tercapainya target pada TW I bukan sepenuhnya mencerminkan kegagalan, melainkan lebih disebabkan oleh:

- Pola pelaksanaan kegiatan yang umumnya dilakukan pada triwulan berikutnya (TW II–TW IV)
- Kegiatan masih dalam tahap persiapan, seperti proses pengadaan dan administrasi penyaluran

Dengan demikian, capaian 0% pada TW I masih dapat dianggap **on track** apabila pelaksanaan kegiatan direncanakan pada periode selanjutnya.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

- a. Melanjutkan monitoring lapangan dan pendampingan intensif hingga tahap produksi.



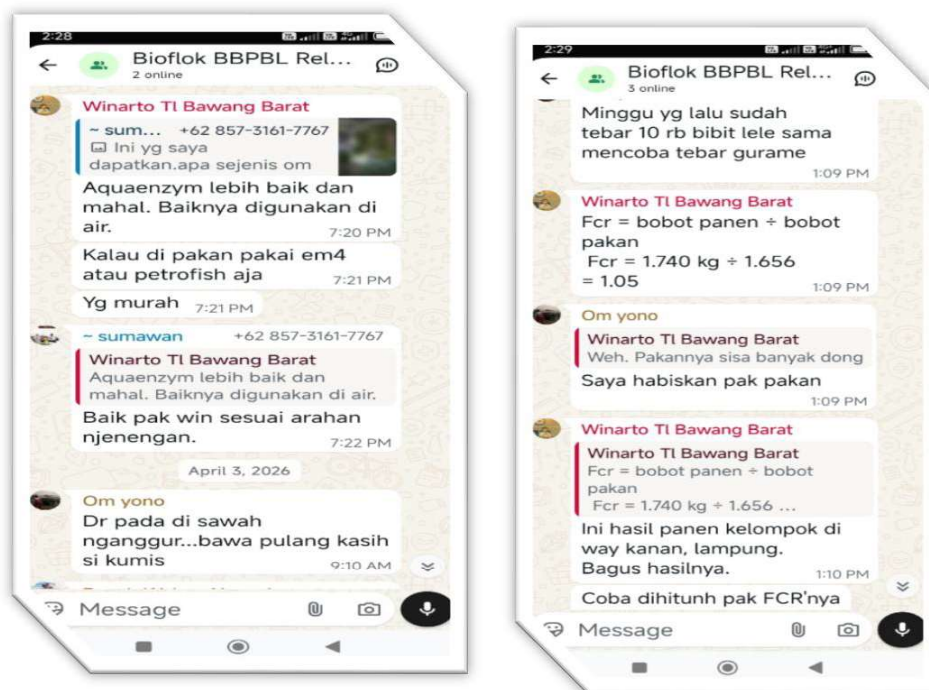
Gambar 3.12. Kegiatan monitoring lapangan pada tahap produksi

- b. Memberikan pelatihan atau bimbingan teknis lanjutan bioflok dan mesin pakan bagi anggota kelompok



Gambar 3.13. Kegiatan bimtek operasional bioflok dan mesin pakan

- c. Menjalin kerja sama dengan Dinas Perikanan daerah, penyuluh perikanan setempat untuk dukungan teknis



Gambar 3.14. Kerjasama dengan penyuluh terkait dukungan teknis

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Berdasarkan capaian kinerja yang belum terealisasi pada Triwulan I, terdapat beberapa permasalahan utama sebagai berikut :

1. Usulan bantuan sarana budidaya sistem bioflok dan bantuan mesin dan bahan baku pakan aspirasi komisi IV DPR RI masih sangat terbatas,
2. Kelengkapan dokumen usulan bantuan sarana bioflok belum lengkap

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-9) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Mendorong percepatan pengajuan usulan dari anggota komisi IV DPR RI dengan terus berkoordinasi secara intensif dengan tenaga ahli komisi IV DPR RI.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan penyuluh perikanan untuk membantu memberikan pendampingan intensif kepada kelompok calon penerima bantuan sarana dan prasarana.

SK. 5. TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA RUMPUT LAUT

IKU 10. BIBIT RUMPUT LAUT KULTUR JARINGAN YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT OLEH BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.33. Capaian Sasaran Kegiatan 5, pada IKU 10

Sasaran Kegiatan-5		Terkelolanya sistem perikanan budidaya rumput laut						
IKU-10		Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung (kg)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	6.211	2.400	2.400	100	-	446.692.000	42.561.292	9,53

Sumber : Tim Kerja Produksi dan Bantuan-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi penyaluran bibit rumput laut kultur jaringan oleh BBPBL Lampung mencapai 2.400 kg dari target Triwulan I sebesar 2.400 kg, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan kesiapan teknis dan operasional dalam proses produksi serta distribusi bibit kepada masyarakat penerima manfaat.

Apabila dikaitkan dengan target tahunan sebesar **6.211 kg**, maka realisasi pada Triwulan I telah memberikan kontribusi awal yang positif dalam mendukung pencapaian target akhir tahun.

Tabel 3.34. Data penerima bantuan bibit rumput laut

No	Nama Kelompok	Alamat	Komoditas	Volume (kg)	No. BAST	No. SK Penetapan
1	Anggrek (Suryadi)	Pulau Terong, Kec. Belakang Padang, Batam	Rumla	800	B.557/BBPBL/PB.140/II/2026	B.523/BBPBL/PB.140/II/2026
2	Harapan Jaya (Nor Aliana)	Pulau Terong, Kec. Belakang Padang, Batam	Rumla	800	B.556/BBPBL/PB.140/II/2026	B.523/BBPBL/PB.140/II/2026
3.	Rogayah Binti Bangang (Menanti)	Pulau Terong, Kec. Belakang Padang, Batam	Rumla	800	B.555/BBPBL/PB.140/II/2026	B.523/BBPBL/PB.140/II/2026
			JUMLAH	2.400		



Gambar 3.15. Kegiatan penyaluran bantuan bibit rumput laut

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 yang tidak memiliki target maupun realisasi, capaian pada tahun 2026 menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan, sekaligus mencerminkan mulai optimalnya implementasi program pengembangan budidaya rumput laut berbasis kultur jaringan.

Tabel 3.35. Data perbandingan capaian bantuan bibit rumput laut lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (kg)		Realisasi (kg)	%	
		Tahunan	TW I		Tahunan	TW I
1.	BBPBL Lampung	6.211	2.400	2.400	38,64	100
2.	BPBAL Lombok	11.830	-	-	-	-
3.	BPBAL Ambon	16.801	-	-	-	-
4.	BPBAL Batam	-	-	-	-	-

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Dari sisi anggaran terlihat bahwa realisasi sebesar Rp42.561.292 dari total pagu Rp446.692.000, atau hanya sebesar 9,53%, menunjukkan bahwa serapan anggaran masih sangat rendah meskipun target fisik telah tercapai sepenuhnya. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara capaian fisik dan penyerapan anggaran.

Anggaran bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung sebesar Rp. 446.692.000 target sebanyak 6.211 kg, Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja bahan sebesar 6.667.000, belanja honor output kegiatan sebesar Rp. 14.144.000, belanja barang persediaan konsumsi sebesar Rp. 165.186.000, belanja persediaan bahan baku sebesar Rp. 86.100.000, belanja jasa lainnya sebesar Rp 127.135.000,

dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 47.460.000. Realisasi anggaran sampai dengan TW I – 2026 sebesar Rp. 42.561.292 (9,53%), dengan perincian belanja barang persediaan konsumsi sebesar Rp. 6.770.000, belanja barang persediaan bahan baku sebesar Rp. 10.800.000, belanja jasa lainnya sebesar Rp. 14.959.992, dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 10.031.300

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Keberhasilan capaian kinerja pada IKU-10 tercermin dari terpenuhinya target fisik sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya kesesuaian antara target yang ditetapkan dengan kapasitas produksi serta kemampuan distribusi yang dimiliki oleh BBPBL Lampung.

Selain itu, kesiapan teknis dan operasional dalam proses produksi bibit rumput laut kultur jaringan turut menjadi faktor pendukung utama. Proses produksi yang berjalan lancar, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten, memungkinkan kegiatan penyaluran dapat dilaksanakan tanpa kendala berarti.

Perencanaan output yang relatif akurat juga menjadi indikator keberhasilan, dimana target yang ditetapkan mampu direalisasikan tepat waktu pada Triwulan I. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, baik dari sisi kapasitas produksi maupun kebutuhan masyarakat, sehingga target yang ditetapkan bersifat realistis dan dapat dicapai secara optimal.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

1. Melakukan monitoring bantuan bibit rumput laut 2025, pada saat distribusi bantuan bibit rumput laut 2026, dikarenakan Lokasi penerima bantuan 2026 sama dengan lokasi penerima bantuan bibit rumput laut 2025



Gambar 3.16. Kegiatan monitoring bantuan bibit rumput laut 2025

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Berdasarkan capaian kinerja yang belum terealisasi pada Triwulan I, terdapat beberapa permasalahan utama sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran yang masih rendah berpotensi menunjukkan kegiatan belum berjalan secara optimal secara finansial.
2. Kemungkinan distribusi dilakukan pada tahap awal tanpa memanfaatkan seluruh komponen anggaran yang direncanakan.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-10) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional dengan capaian output.
2. Meningkatkan skala distribusi atau kualitas bibit agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap penerima manfaat.

SK. 6. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK LINGKUP BBPBL LAMPUNG

IKU 11. PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA SATKER BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.36. Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 11

Sasaran Kegiatan-6		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung						
IKU-11		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker BBPBL Lampung (persen)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
92,86	86	86	100	116.28	7,69	-	-	-

Sumber : Tim Kerja Dukungan Manajemen-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 1 Maret 2026 (Triwulan I Tahun 2026).

Berdasarkan surat No. B.1911/DJPB.1/TU.140/IV/2026, bahwa capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker BBPBL Lampung pada TW I – 2026 sebesar 100 %

Lampiran II Surat Dinas
Nomor : 9.101/DJPB.1/TU.140/IV/2026
Tanggal : 08 April 2026

Data Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP" Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Direktorat Ikan Air Laut	88,24%
2	Direktorat Rumpuk Laut	92,31%
3	Direktorat Ikan Air Tawar	100,00%
4	Direktorat Ikan Air Payau	100,00%
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	97,46%
6	BBPAP Jepara	97,46%
7	BBPBL Lampung	100,00%
8	BBPBAT Sukabumi	100,00%
9	BPBAP Situbondo	100,00%
10	BPBAP Takalar	97,46%
11	BPBAT Sungai Gelam	100,00%
12	BPBAT Mandiangin	97,46%
13	BPBL Batam	100,00%
14	BPBL Lombok	100,00%
15	BPBL Ambon	97,46%
16	BPBAP Ujung Batsee	97,46%
17	BPBAT Tatalu	97,46%
18	BLUPPB Karawang	100,00%
19	BPJUK Karangasem	97,46%
20	BPKL Serang	100,00%

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,
Sesungguhnya Perikanan Ruri Daya

 Ditandatangani secara Elektronik
Tinggal Hermawan

Dikirimkan via telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 3.17. Capaian rekomendasi hasil pengawasan TW I - 2026

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 sebesar 92,86%, terjadi kenaikan sebesar 7,69% pada tahun 2026. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan untuk mendukung peningkatan kinerja satuan kerja.

Tabel 3.37. Data perbandingan capaian rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (%)		Realisasi (%)	%	
		Tahunan	TW I		Tahunan	TW I
1.	BBPBL Lampung	86	86	100	116,28	116,28
2.	BPBAL Lombok	86	86	100	116,28	116,28
3.	BPBAL Ambon	86	86	97,46	113,33	113,33
4.	BPBAL Batam	86	86	100	116,28	116,28

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pada Triwulan I Tahun 2026, untuk IKU-11 tidak terdapat alokasi anggaran (Rp 0) sehingga tidak ada realisasi penggunaan anggaran (Rp 0). Dengan demikian, capaian kinerja sebesar 100% yang melampaui target (116,28%) dicapai tanpa dukungan anggaran langsung. Hal ini menunjukkan bahwa :

1. Kinerja indikator lebih dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola, komitmen organisasi, dan sistem pengawasan internal, bukan oleh belanja anggaran.

2. Optimalisasi sumber daya yang ada (existing resources) mampu menghasilkan kinerja yang tinggi.
3. IKU ini bersifat non-budget driven, sehingga keberhasilannya ditentukan oleh kualitas tindak lanjut rekomendasi, bukan besaran anggaran.

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa faktor:

1. Tingginya komitmen pimpinan dan unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
2. Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian internal.
3. Koordinasi yang lebih baik antar unit dalam proses monitoring dan evaluasi tindak lanjut.
4. Kesadaran organisasi terhadap pentingnya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Pada tahun anggaran 2025 BBPBL Lampung tidak dilakukan pengawasan/audit oleh Inspektorat Jenderal, sehingga rekomendasi yang diterima oleh BBPBL Lampung telah ditindak lanjuti dan bersifat “TUNTAS”. Yang dilakukan oleh BBPBL Lampung terkait IKU 11 adalah memonitor aplikasi sidak.kkp.go.id

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Berdasarkan capaian kinerja pada Triwulan I, terdapat beberapa permasalahan utama sebagai berikut :

1. Tidak semua rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti karena keterbatasan waktu dan sumber daya.
2. Variasi kualitas rekomendasi hasil pengawasan yang mempengaruhi kemudahan implementasi.
3. Belum optimalnya sistem dokumentasi dan pelaporan tindak lanjut.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-11) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan.
2. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.
3. Mengoptimalkan peran pengawasan internal sebagai mitra strategis peningkatan kinerja.

SK. 6. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK LINGKUP BBPBL LAMPUNG
IKU 12. PENILAIAN MANDIRI SAKIP BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.38. Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 12

Sasaran Kegiatan-6		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung						
IKU-12		Penilaian mandiri SAKIP BBPBL Lampung (nilai)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	84,2	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Tim Kerja Dukungan Manajemen-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah proses evaluasi yang dilakukan secara internal oleh instansi pemerintah untuk menilai tingkat penerapan dan kualitas sistem akuntabilitas kinerja dalam organisasi. Penilaian ini mencakup seluruh komponen SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, hingga capaian kinerja yang dihasilkan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-12) Penilaian Mandiri SAKIP BBPBL Lampung belum dapat disajikan, karena pada periode ini tidak ditetapkan target maupun realisasi kinerja. Hal ini disebabkan oleh karakteristik indikator penilaian SAKIP yang bersifat tahunan, sehingga pengukuran dan penilaian kinerja baru dilakukan pada akhir tahun anggaran setelah seluruh tahapan implementasi SAKIP, meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, selesai dilaksanakan.

Secara formal, penilaian mandiri SAKIP bertujuan untuk :

- Mengukur tingkat kesesuaian implementasi SAKIP dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan kinerja instansi.
- Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-oriented government).

Secara operasional, indikator ini diukur dengan :

- Satuan ukur : Nilai (skala 0–100).
- Sumber data: Dokumen SAKIP internal (Renstra, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, hasil evaluasi internal, dan dokumen pendukung lainnya).
- Metode pengukuran: Penilaian mandiri menggunakan instrumen evaluasi SAKIP yang mengacu pada pedoman dari Kementerian PANRB.

- Waktu pengukuran: Dilakukan pada akhir tahun anggaran (tahunan).
- Kriteria capaian: Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati 100), menunjukkan semakin baik kualitas penerapan SAKIP

Target kinerja tahun 2026 untuk indikator ini ditetapkan sebesar 84,2. Namun demikian, hingga Triwulan I belum terdapat realisasi capaian maupun serapan anggaran yang dapat diukur, sehingga persentase capaian dan persentase kenaikan kinerja tidak dapat dihitung.

Meskipun belum terdapat capaian pada Triwulan I, BBPBL Lampung tetap perlu melakukan langkah-langkah persiapan sejak awal tahun guna mendukung pencapaian target nilai SAKIP pada akhir tahun. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja, konsistensi pengukuran dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan evaluasi internal secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP sehingga target nilai yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dalam usaha memenuhi kriteria penilaian dalam PM SAKIP, maka BBPBL Lampung telah menyusun : (i) Renstra 2025 – 2029, (ii); Penetapan Kinerja BBPBL Lampung 2026; (iii) Manual IKU 2026; (iv) Matriks Peran Hasil (MPH); (v) Rencana Aksi; (vi) Rencana Kerja, (vii) Rincian target IKU; (viii) Validasi SMART

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Jika dibandingkan dengan kondisi pada Triwulan I Tahun 2025, situasi yang sama juga terjadi, dimana indikator ini belum memiliki capaian pada periode triwulanan. Dengan demikian, analisis perbandingan kinerja antar periode tidak dapat dilakukan

Tabel 3.39. Data perbandingan capaian PM SAKIP lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	%
1.	BBPBL Lampung	84,2	-	-
2.	BPBAL Lombok	84,2	-	-
3.	BPBAL Ambon	84,2	-	-
4.	BPBAL Batam	84,2	-	-

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU-12) Penilaian Mandiri SAKIP BBPBL Lampung belum dapat disajikan. Hal ini disebabkan belum adanya alokasi maupun realisasi anggaran yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan penilaian mandiri SAKIP pada periode triwulanan.

Karakteristik kegiatan penilaian mandiri SAKIP yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran menyebabkan kebutuhan anggaran umumnya baru terealisasi pada tahap akhir, terutama untuk kegiatan evaluasi internal, penyusunan dan penyempurnaan dokumen kinerja, serta pelaporan. Dengan demikian, hingga Triwulan I belum terdapat serapan anggaran yang dapat dihitung persentase capaiannya.

Meskipun demikian, perencanaan penggunaan anggaran tetap perlu disiapkan secara matang sejak awal tahun guna memastikan ketersediaan dukungan pembiayaan pada saat pelaksanaan penilaian mandiri SAKIP. Hal ini penting agar proses evaluasi dan penyusunan dokumen dapat berjalan optimal serta mendukung pencapaian target nilai SAKIP yang telah ditetapkan.

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-12) Penilaian Mandiri SAKIP BBPBL Lampung belum dapat dinilai keberhasilan maupun kegagalannya. Hal ini disebabkan indikator tersebut tidak memiliki target dan realisasi pada periode triwulanan, mengingat penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan secara tahunan pada akhir tahun anggaran. Dengan belum adanya pelaksanaan penilaian pada Triwulan I, maka tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sehingga analisis tingkat keberhasilan atau kegagalan belum dapat dilakukan secara kuantitatif.

Namun demikian, dari sisi proses, keberhasilan pada tahap awal dapat diindikasikan melalui kesiapan perangkat pendukung implementasi SAKIP, seperti ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, pelaksanaan pengukuran kinerja secara berkala, serta komitmen unit kerja dalam menyusun laporan kinerja. Sebaliknya, potensi kegagalan dapat terjadi apabila sejak awal tahun tidak dilakukan penguatan terhadap kualitas data kinerja, konsistensi pelaporan, dan pelaksanaan evaluasi internal.

Oleh karena itu, meskipun capaian belum dapat diukur pada Triwulan I, diperlukan upaya proaktif dalam memastikan seluruh tahapan implementasi SAKIP berjalan dengan baik, sehingga pada akhir tahun indikator ini dapat mencapai target nilai yang telah ditetapkan.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

1. Melakukan penyusunan dokumen kinerja sesuai Permen KP no 35 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi, salah satu dokumen yang harus sesuai format adalah manual IKU

IKU 9	
INDIKATOR KINERJA	SARANA PERIKANAN BUDI DAYA YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT OLEH BBPBL LAMPUNG (UNIT)
DEFINISI	• Jumlah sarana budidaya ikan air tawar (bioflok dan mesin pakan) yang disalurkan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria sesuai petunjuk teknis dan hasil verifikasi sesuai target jumlah unit sarana yang disalurkan. • Capaian indikator kinerja ini dengan cara mengukur target jumlah dari realisasi sarana budidaya bioflok dan mesin pakan yang disalurkan.
FORMULA PERHITUNGAN	$\text{capaian} = \frac{\text{jumlah bantuan bioflok dan mesin pakan yang disalurkan ke masyarakat}}{\text{target}}$
SATUAN	Paket
TINGKAT VALIDITAS	Output kendali rendah
SUMBER DATA	BBPBL Lampung (Penanggung Jawab : Tim Kerja Sarana dan Prasarana)
POLA PERHITUNGAN	Nilai Positif Akhir
POLARISASI	Maximize
PERIODE PELAPORAN	Tahunan

Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun dengan target :

Target Triwulan (paket)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
-	-	-	35

9 | MANUAL IKU BBPBL LAMPUNG 2026

Gambar 3.18. Dokumen manual IKU sesuai Permen KP no 35 tahun 2023

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Berdasarkan capaian kinerja pada Triwulan I, terdapat beberapa permasalahan utama adalah belum optimalnya kesiapan data dukung kinerja, belum terintegrasinya pengelolaan dokumen SAKIP secara sistematis, serta belum konsistennya pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal di masing-masing unit kerja.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-12) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan adalah penyusunan dan pemutakhiran dokumen SAKIP.

SK. 6. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK LINGKUP BBPBL LAMPUNG
IKU 13. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.40. Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 13

Sasaran Kegiatan-6		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung						
IKU-13		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPBL Lampung (nilai)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	92,1	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Tim Kerja Dukungan Manajemen-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-13) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPBL Lampung belum dapat disajikan, karena pada periode ini belum terdapat target maupun realisasi kinerja yang diukur. Hal ini disebabkan oleh mekanisme penilaian IKPA yang dilakukan secara periodik berdasarkan akumulasi kinerja pelaksanaan anggaran, sehingga pada awal tahun anggaran capaian nilai belum dapat dihitung secara optimal.

Target kinerja IKPA BBPBL Lampung Tahun 2026 ditetapkan sebesar 92,1. Namun demikian, hingga Triwulan I belum tersedia data realisasi nilai IKPA maupun serapan anggaran yang dapat dijadikan dasar penghitungan persentase capaian dan tingkat kenaikan kinerja.

Capaian kegiatan IKPA pada TW I tahun 2026 BBPBL Lampung adalah sebagai berikut :

- Perencanaan Anggaran**
Kualitas perencanaan anggaran pada BBPBL Lampung mencapai nilai 100%, yang menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilakukan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kualitas Pelaksanaan Anggaran**
Kualitas pelaksanaan anggaran memperoleh nilai 97,35, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran berjalan dengan sangat baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek tertentu.
- Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran**
Nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran tercatat sebesar 72,88, yang menunjukkan bahwa hasil dari pelaksanaan anggaran cukup baik namun masih perlu peningkatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
- Nilai Akhir IKPA**
Berdasarkan komponen penilaian yang ada, nilai akhir IKPA BBPBL Lampung 72,88 (Kategori: Cukup Baik)

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Jika dibandingkan dengan kondisi pada Triwulan I Tahun 2025, situasi yang sama juga terjadi, dimana indikator ini belum memiliki capaian pada periode triwulanan. Dengan demikian, analisis perbandingan kinerja antar periode tidak dapat dilakukan

Tabel 3.41. Data perbandingan capaian IKPA lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	%
1.	BBPBL Lampung	92,1	-	-
2.	BPBAL Lombok	92,1	-	-
3.	BPBAL Ambon	92,1	-	-
4.	BPBAL Batam	92,1	-	-

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi penggunaan anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU-13) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPBL Lampung belum dapat disajikan. Hal ini disebabkan belum tersedianya data realisasi anggaran yang terukur dan terverifikasi sebagai dasar perhitungan nilai IKPA pada periode awal tahun anggaran.

Penilaian IKPA merupakan indikator komposit yang tidak hanya dipengaruhi oleh besaran serapan anggaran, tetapi juga oleh aspek kualitas pelaksanaan anggaran seperti ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, akurasi perencanaan, serta kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pada Triwulan I, meskipun proses pelaksanaan anggaran telah mulai berjalan, nilai capaian dan realisasi anggaran yang terintegrasi dalam penilaian IKPA belum dapat dihitung secara komprehensif.

Dengan demikian, hingga Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi anggaran yang dapat disajikan dalam konteks capaian IKPA, sehingga persentase capaian juga belum dapat dihitung. Ke depan, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran sejak awal tahun guna mendukung pencapaian target nilai IKPA sebesar 92,1 pada akhir tahun anggaran.

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-13) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPBL Lampung belum dapat dinilai tingkat keberhasilan maupun kegagalannya. Hal ini disebabkan belum tersedianya target dan realisasi nilai IKPA pada periode triwulanan, sehingga pengukuran kinerja belum dapat dilakukan secara kuantitatif.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00	
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00					
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00					

Gambar 3.20. Capaian IKPA TW I - 2026

Melihat gambar diatas, dan dengan adanya kegiatan untuk meminimalisir kendala dalam pencapaian target IKPA, terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian yaitu dari 97,56 menjadi 100.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan belum tersedianya data:

- Keterlambatan dalam proses administrasi pelaporan anggaran.
- Belum optimalnya integrasi sistem pelaporan kinerja dan keuangan.
- Kurangnya koordinasi antar unit pengelola anggaran.
- Data masih dalam proses rekonsiliasi internal.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-13) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan adalah

1. Percepatan penginputan dan validasi data realisasi anggaran pada aplikasi terkait.
2. Koordinasi intensif antara unit perencanaan, keuangan, dan pelaksana kegiatan.
3. Monitoring berkala terhadap progres penyerapan anggaran dan capaian kinerja.
4. Evaluasi internal terhadap kendala pelaporan agar tidak terulang pada triwulan berikutnya.

SK. 6. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK LINGKUP BBPBL LAMPUNG
IKU 14. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.42. Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 14

Sasaran Kegiatan-6		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung						
IKU-14		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPBL Lampung (nilai)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	71,75	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Tim Kerja Dukungan Manajemen-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan I Tahun 2026, target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPBL Lampung ditetapkan sebesar 71,75. Namun demikian, hingga akhir periode pelaporan, data realisasi atas indikator tersebut belum tersedia sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Belum tersedianya data realisasi tersebut mengindikasikan bahwa proses penilaian kinerja perencanaan anggaran masih dalam tahap penyelesaian atau validasi oleh unit terkait. Selain itu, kemungkinan terdapat keterlambatan dalam penyampaian data dukung maupun dalam proses input pada sistem pelaporan kinerja, sehingga hasil evaluasi belum dapat disajikan secara komprehensif.

Kondisi ini berdampak pada belum dapat dilakukannya analisis terhadap tingkat capaian, efektivitas, dan kualitas perencanaan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026. Oleh karena itu, diperlukan percepatan dalam proses penyusunan, validasi, dan pelaporan data realisasi, serta peningkatan koordinasi antar unit terkait agar hasil penilaian kinerja perencanaan anggaran dapat segera tersedia.

Tabel 3.43. Pagu Anggaran berdasarkan kegiatan

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)
1.	Pengelolaan budidaya rumput laut	684.270.000
2.	Pengelolaan Budidaya Ikan Air Payau	100.000.000
3.	Pengelolaan Budidaya Ikan Air Laut	9.641.807.000
4.	Pengelolaan Budidaya Ikan Air Tawar	120.000.000
5.	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	8.050.000.000
6.	Duk. Man. Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	19.875.264.000
	JUMLAH	38.471.341.000

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Berdasarkan data yang tersedia, capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPBL Lampung pada Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan secara kuantitatif karena data realisasi pada kedua periode belum tersedia. Sementara itu, pada Triwulan I Tahun 2026 telah ditetapkan target sebesar 71,75, namun belum terdapat nilai realisasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran capaian.

Ketiadaan data realisasi tersebut menyebabkan analisis terhadap tren kinerja, baik peningkatan maupun penurunan capaian antar periode, belum dapat dilakukan. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas dan kualitas perencanaan anggaran dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan juga belum dapat disusun secara komprehensif.

Meskipun demikian, penetapan target pada Tahun 2026 menunjukkan adanya upaya perencanaan kinerja yang lebih terarah. Untuk mendukung analisis perbandingan yang lebih akurat ke depan, diperlukan penyediaan data realisasi secara tepat waktu dan konsisten pada setiap periode pelaporan.

Tabel 3.44. Data perbandingan capaian NKPA lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	%
1.	BBPBL Lampung	71,75	-	-
2.	BPBAL Lombok	71,75	-	-
3.	BPBAL Ambon	71,75	-	-
4.	BPBAL Batam	71,75	-	-

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi penggunaan anggaran dalam rangka mendukung capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPBL Lampung belum dapat disajikan karena data anggaran dan realisasinya belum tersedia. Kondisi ini menyebabkan tingkat penyerapan anggaran serta persentase capaian penggunaan anggaran belum dapat dihitung dan dianalisis.

Belum tersedianya data realisasi penggunaan anggaran mengindikasikan bahwa proses pelaporan dan rekonsiliasi keuangan masih dalam tahap penyelesaian. Selain itu, kemungkinan terdapat keterlambatan dalam penginputan data pada sistem pelaporan keuangan maupun belum optimalnya koordinasi antar unit pengelola anggaran.

Ketiadaan informasi terkait realisasi anggaran berdampak pada belum dapat dilakukannya evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung perencanaan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan percepatan dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan realisasi anggaran, serta peningkatan kualitas pengelolaan data keuangan agar informasi yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu.

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Pada Triwulan I Tahun 2026, analisis terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPBL Lampung belum dapat dilakukan secara komprehensif. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya data realisasi yang menjadi dasar utama dalam mengukur tingkat capaian terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 71,75.

Ketiadaan data realisasi tersebut mengindikasikan bahwa proses evaluasi kinerja perencanaan anggaran masih dalam tahap penyelesaian, baik dari sisi pengumpulan data dukung maupun validasi hasil penilaian. Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah pelaksanaan perencanaan anggaran telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan target kinerja yang diharapkan.

Meskipun demikian, secara umum, keberhasilan dalam pencapaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh kualitas penyusunan dokumen perencanaan, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta ketepatan dalam pengalokasian sumber daya. Sebaliknya, potensi kegagalan dapat disebabkan oleh kurang optimalnya perencanaan, keterlambatan dalam penyusunan dokumen, serta belum terpenuhinya kelengkapan data dukung dalam proses penilaian.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

1. Realisasi belanja 053 pada TW I tahun 2026

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026									
Per Program, Kegiatan, Output, Sub-Output, Komponen, Sub-Komponen, Akun, Item;									
Periode Maret 2026									
Kementerian : 032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				Hal 7 dari 14				
Unit Organisasi : 04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA								
Satuan Kerja : 427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG								
Urutan		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SSA	
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	ANGGARAN	
522191	Belanja Jasa Lainnya	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	100.00	0	
000100	Iuran KAN	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	100.00	0	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000	0	0	0	0	0.00 %	6.000.000	
000101	Assesor	6.000.000	0	0	0	0	0.00 %	6.000.000	
HB.7941	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	7.395.270.000	0	10.175.707	46.607.720	56.783.427	0.77 %	7.338.486.573	
QEO	Bantuan Produk dan Peralatan	7.395.270.000	0	10.175.707	46.607.720	56.783.427	0.77 %	7.338.486.573	
QEO.003	Sarana Sub Daya Ikan Air Tawar yang diserahkan ke masyarakat	7.395.270.000	0	10.175.707	46.607.720	56.783.427	0.77 %	7.338.486.573	
051.0A	Bantuan Sarana dan Prasarana Bioflok	5.721.800.000	0	10.175.707	44.437.720	54.613.427	0.95 %	5.667.186.573	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	471.800.000	0	10.175.707	44.437.720	54.613.427	11.58 %	417.168.892	
000106	Perjalanan Dinas Koordinasi/Konsultasi/Rapat dengan Pusat/DUPB	213.160.000	0	10.175.707	5.814.401	15.990.108	7.50 %	197.169.892	
000112	Perjalanan Dinas CPCL, BAST, Monitoring BIOFLOK	258.640.000	0	0	38.623.319	38.623.319	14.93 %	220.016.681	
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Permda	5.250.000.000	0	0	0	0	0.00 %	5.250.000.000	
000114	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	5.250.000.000	0	0	0	0	0.00 %	5.250.000.000	
053	Bantuan Mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan	1.673.470.000	0	0	2.170.000	2.170.000	0.13 %	1.671.300.000	
053.0A	Bantuan Mesin Pakan dan Bahan Baku Pakan	1.673.470.000	0	0	2.170.000	2.170.000	0.13 %	1.671.300.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	117.530.000	0	0	2.170.000	2.170.000	1.85 %	115.360.000	
000119	Perjalanan Dinas CPCL, BAST, Monitoring Bantuan Mesin Pakan	65.785.000	0	0	0	0	0.00 %	65.785.000	
000123	Perjalanan Dinas Rapat/Koordinasi/Konsultasi dengan Pusat/DUPB	51.745.000	0	0	2.170.000	2.170.000	4.19 %	49.575.000	
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Permda	1.000.940.000	0	0	0	0	0.00 %	1.000.940.000	
000127	Mesin Pencetak Pakan	934.920.000	0	0	0	0	0.00 %	934.920.000	
000128	Mesin Penepung	536.520.000	0	0	0	0	0.00 %	534.520.000	
000129	Tepung Ikan	113.000.000	0	0	0	0	0.00 %	113.000.000	
000130	Tepung Kedelai	73.500.000	0	0	0	0	0.00 %	73.500.000	
WA	Program Dukungan Manajemen	19.620.780.000	0	3.256.642.244	2.238.700.292	5.495.342.536	28.02 %	14.123.437.464	

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Gambar 3.21. Capaian realisasi belanja 053 pada TW I - 2026

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi belum optimalnya pengukuran capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPBL Lampung, antara lain:

1. Belum tersedianya data realisasi kinerja, sehingga capaian indikator belum dapat dihitung dan dievaluasi.
2. Keterlambatan dalam proses pengumpulan dan validasi data dukung, baik terkait dokumen perencanaan maupun hasil evaluasi kinerja.
3. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja, khususnya antara fungsi perencanaan, keuangan, dan pelaksana kegiatan.
4. Kemungkinan keterlambatan penginputan data pada sistem pelaporan, yang menghambat penyajian informasi kinerja secara tepat waktu.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-14) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan adalah :

1. Mempercepat proses penyusunan, pengumpulan, dan validasi data realisasi kinerja agar capaian indikator dapat segera dihitung.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja melalui rapat evaluasi dan monitoring berkala.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan, termasuk memastikan ketepatan waktu dalam penginputan data.
4. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan anggaran, dengan memperhatikan keselarasan antara program, kegiatan, output, dan alokasi anggaran.

SK. 6. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK LINGKUP BBPBL LAMPUNG

IKU 15. INDEKS PROFESIONALITAS ASN BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.45. Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 15

Sasaran Kegiatan-6		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung						
IKU-15		Indeks Profesionalitas ASN BBPBL Lampung (nilai)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	81,5	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Tim Kerja Dukungan Manajemen-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan I Tahun 2026, target Indeks Profesionalitas ASN BBPBL Lampung ditetapkan sebesar 81,5. Namun demikian, hingga akhir periode pelaporan, data realisasi atas indikator tersebut belum tersedia sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPBL Lampung dalam rangka pencapaian target IP ASN adalah :

1. Menyusun usul diklat pegawai 2026
2. Sosialisasi pelayanan publik
3. Mengikuti seminar teknis lainnya

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Perbandingan capaian antara Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dilakukan secara kuantitatif karena tidak tersedianya data realisasi pada kedua periode. Kondisi ini menyebabkan analisis tren peningkatan atau penurunan kinerja profesionalitas ASN belum dapat disusun.

Tabel 3.46. Data perbandingan capaian IP ASN lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	%
1.	BBPBL Lampung	81,5	-	-
2.	BPBAL Lombok	81,5	-	-
3.	BPBAL Ambon	81,5	-	-
4.	BPBAL Batam	81,5	-	-

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi penggunaan anggaran yang mendukung pencapaian Indeks Profesionalitas ASN BBPBL Lampung belum dapat disajikan karena data anggaran dan realisasinya belum tersedia. Kondisi ini mengakibatkan belum dapat dihitungnya tingkat penyerapan anggaran serta persentase capaian penggunaan anggaran pada periode pelaporan.

Belum tersedianya data tersebut menunjukkan bahwa proses pelaporan dan rekonsiliasi keuangan masih dalam tahap penyelesaian, baik pada tingkat unit kerja maupun pada sistem pelaporan yang digunakan. Selain itu, terdapat kemungkinan keterlambatan dalam penginputan data serta belum optimalnya koordinasi antar unit pengelola anggaran.

Ketiadaan informasi realisasi penggunaan anggaran berdampak pada belum dapat dilakukannya evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dalam mendukung peningkatan profesionalitas ASN, khususnya dalam kegiatan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan kinerja pegawai.

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Analisis terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian indikator ini belum dapat dilakukan secara komprehensif karena belum tersedianya data realisasi. Namun demikian, secara umum capaian Indeks Profesionalitas ASN dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan, kompetensi, kinerja, serta kedisiplinan ASN. Potensi kendala dapat berupa keterbatasan pengembangan kompetensi, belum optimalnya pemanfaatan sistem penilaian kinerja, serta keterlambatan dalam pemutakhiran data kepegawaian.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

1. Direncanakan akan melakukan sosialisasi dan himbauan untuk mengunggah sertifikat di MY ASN, yang direncanakan pada periode TW II - 2026

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi belum optimalnya pengukuran capaian IP ASN BBPBL Lampung, antara lain :

1. Keterlambatan dalam pengumpulan dan pemutakhiran data kepegawaian.
2. Belum optimalnya pengelolaan data pada sistem informasi kepegawaian.
3. Terbatasnya kegiatan pengembangan kompetensi ASN pada awal tahun anggaran.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-15) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan adalah :

1. Meningkatkan koordinasi antar unit pengelola kepegawaian dan kinerja.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung penyediaan data yang akurat dan tepat waktu.
3. Mendorong pelaksanaan program pengembangan kompetensi ASN secara lebih terencana dan berkelanjutan.

SK. 6. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK LINGKUP BBPBL LAMPUNG
IKU 16. NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN SATKER BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.47. Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 16

Sasaran Kegiatan-6		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung						
IKU-16		Nilai pengawasan kearsipan satker BBPBL Lampung (nilai)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	81	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Tim Kerja Dukungan Manajemen-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan I Tahun 2026, target Nilai Pengawasan Kearsipan Satker BBPBL Lampung ditetapkan sebesar 81. Namun demikian, hingga akhir periode pelaporan, realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut belum tersedia, sehingga tingkat capaian kinerja belum dapat dihitung dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Belum tersedianya data realisasi ini mengindikasikan bahwa proses penilaian pengawasan kearsipan masih dalam tahap penyelesaian atau validasi oleh pihak terkait. Kondisi tersebut berdampak pada belum dapat dilakukannya evaluasi secara komprehensif terhadap kualitas pengelolaan dan pengawasan kearsipan pada satuan kerja.

Dengan belum tersedianya data capaian, maka analisis terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan arsip, tingkat kepatuhan terhadap standar kearsipan, serta peningkatan kualitas tata kelola arsip belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan percepatan dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data hasil pengawasan kearsipan agar capaian kinerja dapat segera diukur secara akurat.

Pengelolaan arsip dinamis yang dilakukan BBPBL Lampung pada TW I – 2026 adalah :

1. Pengelolaan surat masuk sebanyak 279 surat
2. Pengelolaan surat keluar sebanyak 184 surat

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Perbandingan capaian antara Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dilakukan secara kuantitatif karena tidak tersedianya data realisasi pada kedua periode. Hal ini menyebabkan analisis tren peningkatan atau penurunan kinerja pengawasan kearsipan belum dapat disusun secara komprehensif.

Tabel 3.48. Data perbandingan capaian pengawasan kearsipan lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	%
1.	BBPBL Lampung	81	-	-
2.	BPBAL Lombok	81	-	-
3.	BPBAL Ambon	81	-	-
4.	BPBAL Batam	81	-	-

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi penggunaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengawasan kearsipan pada BBPBL Lampung belum dapat disajikan karena data anggaran dan realisasinya belum tersedia. Kondisi ini menyebabkan belum dapat dihitungnya tingkat penyerapan anggaran serta persentase capaian penggunaan anggaran pada periode pelaporan.

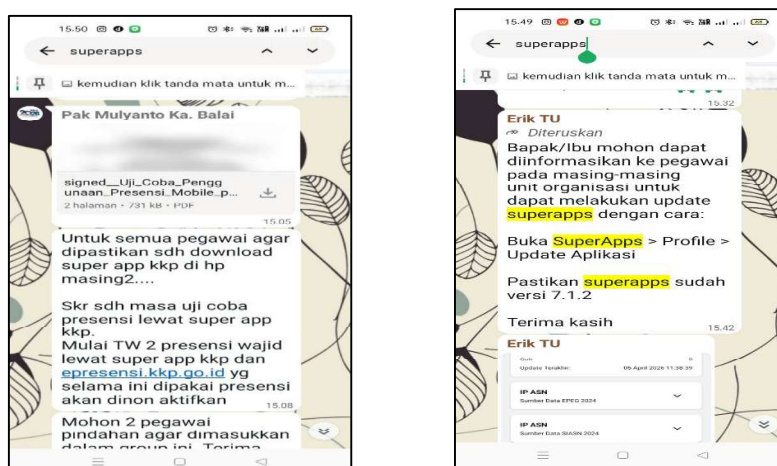
ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Analisis keberhasilan atau kegagalan capaian indikator ini belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena belum tersedianya data realisasi. Secara umum, capaian nilai pengawasan kearsipan dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan arsip, kepatuhan terhadap tata kelola kearsipan, ketersediaan sarana prasarana, serta kompetensi SDM pengelola arsip. Potensi kendala dapat berupa belum optimalnya penataan arsip, keterbatasan sarana pendukung, serta kurangnya pemutakhiran data kearsipan.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

1. Membuat pengumuman melalui WhatsApp grup ASN BBPBL Lampung bahwa seluruh pegawai untuk menginstal aplikasi superapps



Gambar 3.22. Pengumuman pemakaian superapp

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi belum optimalnya pengukuran capaian pengawasan kearsipan BBPBL Lampung, antara lain :

1. Belum optimalnya digitalisasi arsip
Kegiatan yang mendukung peningkatan nilai kearsipan (seperti pembinaan internal, penataan arsip, atau digitalisasi arsip) belum berjalan secara optimal pada Triwulan I.
2. Kurangnya pemahaman atau kapasitas SDM kearsipan
SDM pengelola arsip mungkin masih memerlukan peningkatan kapasitas terkait standar dan regulasi kearsipan yang berlaku.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-16) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan adalah :

1. Percepatan penataan dan pembenahan arsip
Melaksanakan penataan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan, meliputi klasifikasi, pemberkasan, penyimpanan, serta penyusunan daftar arsip agar siap dilakukan penilaian.
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola arsip
Mengikutsertakan petugas kearsipan dalam bimbingan teknis, pelatihan, atau pendampingan guna meningkatkan pemahaman terhadap standar pengelolaan arsip yang berlaku.

SK. 6. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK LINGKUP BBPBL LAMPUNG

IKU 17. PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP SATKER BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.49. Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 17

Sasaran Kegiatan-6		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung						
IKU-17		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BBPBL Lampung (nilai)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	77	77	100	129,87	-	-	-	-

Sumber : Tim Kerja Dukungan Manajemen-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 17 yaitu *Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan pada SIRUP* pada Satker BBPBL Lampung menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 77%, realisasi yang dicapai adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 129,87%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh rencana umum pengadaan yang telah disusun berhasil diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah serta menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan koordinasi yang efektif antar unit kerja.

Dengan demikian, pelaksanaan IKU-17 pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dikategorikan sangat berhasil, karena tidak hanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga melampaui ekspektasi kinerja yang telah direncanakan. Keberhasilan ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya guna mendukung tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan pemutakhiran RUP pengadaan PBJ BBPBL Lampung pada TW I tahun 2026 adalah

1. Paket Penyedia (Terumumkan & Draf)
Tercatat sebanyak 45 paket dengan total pagu Rp17.815.644.000.
 - Paket Strategis: Pengadaan bantuan Sistem Bioflok (Rp5,25 Miliar) dan Mesin Pakan (Rp1,36 Miliar) melalui E-Purchasing telah terdata.
 - Operasional: Paket langganan daya dan jasa serta distribusi benih untuk masyarakat telah terverifikasi dengan total di atas Rp3 Miliar.
2. Paket Swakelola
Berdasarkan rekapitulasi sistem, belum terdapat paket swakelola yang diumumkan pada periode ini (Total: 0).
3. Komitmen Produk Dalam Negeri
Tingkat kepatuhan terhadap penggunaan produk dalam negeri mencapai 100%, di mana seluruh paket yang terdata telah menandai opsi "Ya" pada kolom TKDN.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor 283/SJ.7/PL.410/IV/2024 dari Sekretariat Jenderal KKP tentang penyampaian hasil perhitungan indikator kinerja Rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP TW I tahun 2026, menerangkan bahwa capaian BBPBL Lampung Adalah sebesar 100%.

12

(04) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya – 16 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TERUMUMKAN	PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
04		DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	897,634,697,000	917,960,850,000			
1	239192	BBPB AIR PAYAU JEPARA	33,776,312,000	33,776,312,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	238734	BBPB AIR TAWAR SUKABUMI	26,301,351,000	26,301,351,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427706	BBPB LAUT LAMPUNG	17,815,644,000	17,815,644,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	445393	BUPRODUKSI PERIKANAN BUDI DAYA KARAWANG	126,396,102,000	126,396,102,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	567800	BPKL SERANG	3,287,862,000	3,287,862,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	567350	BPB AIR PAYAU SITUBONDO	48,941,145,000	48,941,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	567680	BPB AIR PAYAU TAKALAR	15,771,406,000	15,771,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	567385	BPB AIR PAYAU UJUNG BATEE	10,567,720,000	10,567,720,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567584	BPB AIR TAWAR MANDIANGIN	16,416,369,000	16,416,369,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	237657	BPB AIR TAWAR SUNGAI GELAM	19,225,478,000	19,225,478,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	538911	BPB AIR TAWAR TATELU	11,923,306,000	11,923,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	567720	BPB LAUT AMBON	14,326,630,000	14,326,630,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	567474	BPB LAUT BATAM	9,292,277,000	9,292,277,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	567762	BPB LAUT LOMBOK	13,441,592,000	13,441,592,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	445394	BPI UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	6,052,854,000	6,052,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	632462	SETDIJEN PERIKANAN BUDI DAYA	524,099,649,000	544,425,802,000	(20,326,153,000)	96.27%	Kurang Terumumkan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 3.23. Capaian RUP PJB BBPBL Lampung TW I - 2026

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Jika dibandingkan dengan periode Triwulan I Tahun 2025, meskipun tidak terdapat data pembanding (baseline), capaian tahun 2026 telah menunjukkan kinerja optimal karena seluruh rencana umum pengadaan (RUP) telah diumumkan melalui aplikasi SIRUP secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Dengan tidak tersedianya data capaian pada periode sebelumnya, maka analisis perbandingan kinerja secara kuantitatif tidak dapat dilakukan. Namun demikian, capaian pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik karena seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah diumumkan melalui SIRUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara kualitatif, capaian ini mencerminkan adanya peningkatan dalam tata kelola perencanaan pengadaan, khususnya dalam aspek kepatuhan terhadap kewajiban pengumuman RUP. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa proses perencanaan dan koordinasi internal telah berjalan lebih optimal dibandingkan periode sebelumnya.

Dengan demikian, meskipun tidak terdapat data pembanding secara langsung, capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dinilai sangat baik dan mencerminkan kinerja yang lebih optimal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di lingkungan BBPBL Lampung.

Tabel 3.50. Data perbandingan capaian RUP PBJ lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	%
1.	BBPBL Lampung	77	100	129,87
2.	BPBAL Lombok	77	100	129,87
3.	BPBAL Ambon	77	100	129,87
4.	BPBAL Batam	77	100	129,87

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Berdasarkan data yang tersedia, pada Triwulan I Tahun 2026 tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran yang secara langsung terkait dengan pencapaian IKU-17. Hal ini disebabkan karena indikator tersebut bersifat administratif dan lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sehingga tidak memerlukan dukungan anggaran khusus.

Dengan demikian, realisasi penggunaan anggaran untuk indikator ini tidak dapat diukur secara kuantitatif. Meskipun demikian, capaian kinerja yang mencapai 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa memerlukan tambahan pembiayaan.

Kondisi ini mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dimana target kinerja dapat dicapai secara optimal tanpa membebani anggaran, serta menunjukkan bahwa fungsi perencanaan dan pengelolaan pengadaan telah berjalan dengan baik di lingkungan BBPBL Lampung.

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 17 menunjukkan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 77%, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 129,87%. Dengan demikian, pelaksanaan indikator ini dapat dikategorikan sangat berhasil.

Keberhasilan tersebut didukung oleh perencanaan pengadaan yang telah disusun secara sistematis dan tepat waktu, sehingga seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah serta koordinasi yang efektif antar unit kerja turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja yang optimal.

Di samping itu, pemanfaatan sistem informasi yang baik dalam proses penginputan dan publikasi RUP juga menjadi faktor pendukung utama dalam memastikan seluruh data dapat tersampaikan secara tepat waktu dan akurat. Indikator ini juga tidak bergantung pada alokasi anggaran khusus, sehingga pelaksanaannya tidak menghadapi kendala dari sisi pembiayaan.

Dengan capaian yang telah melampaui target, tidak terdapat aspek kegagalan dalam pelaksanaan IKU ini pada Triwulan I Tahun 2026. Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

1. Penyesuaian Dokumen Perencanaan
Melakukan penyesuaian RUP dengan dokumen anggaran terbaru (DIPA/POK hasil revisi) agar nilai, jenis paket, dan sumber pendanaan tetap selaras.

Statistik Moner						
No	Kode	Nama Program	Pagu Program	Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih Persentase
1	HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	14,733,521,000	13,626,663,000	13,626,663,000	0 100.00%
2	WA	Program Dukungan Manajemen	4,340,590,000	4,188,981,000	4,188,981,000	0 100.00%

Gambar 3.24. Penyesuaian RUP dengan anggaran 2026

2. Pemutakhiran Data RUP di SIRUP

SIRUP LKPP - 13-03-2026								
1. Paket Penyedia								
1.1. Paket Penyedia Terumumkan								
No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	62920406	Belanja Bahan Layanan Pemantauan dan Evaluasi	APBN, APBN	Pesewaran (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya 1. Laporan Tahunan (5, Eksp. @ 650000) 2. Kalender (150, Eksp. @ 30000)	Pengadaan Langsung	7.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	62920621	Belanja Barang Persuratan	APBN	Pesewaran (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya 1. Formulir, Blanko, Map, Kop dan Barang Cetak lainnya (1, Paket, @ 6000000)	Pengadaan Langsung	6.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	62920622	Belanja Keperluan Rumah Tangga Kantor	APBN	Pesewaran (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya 1. Keperluan Rumah Tangga Kantor (12, Bln, @ 250000)	Pengadaan Langsung	3.000.000
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	62920620	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	APBN	Pesewaran (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya 1. Surat Dinas, Dokumen dan lain-lain (1, TH, @ 1750000)	Pengadaan Langsung	1.750.000
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	64817700	Honorarium PPPK Paruh Waktu	APBN	Pesewaran (Kab.)	Volume: (1, PKT, @ 305285000) TKDN: Ya 1. Pengadaan Pegawai Outsourcing (1, PKT, @ 305285000)	Pengadaan Langsung	305.285.000
6	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	64085956	Keperluan Perkantoran	APBN	Pesewaran (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya 1. Belanja Keperluan Perkantoran	Pengadaan Langsung	42.250.000

Gambar 3.25. Pemutakhiran data RUP PBJ

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi belum optimalnya pengukuran capaian pengawasan kearsipan BBPBL Lampung, antara lain :

1. Kemungkinan adanya perubahan atau revisi Rencana Umum Pengadaan (RUP) di tengah tahun anggaran yang dapat mempengaruhi konsistensi data pada aplikasi SIRUP.
2. risiko keterlambatan dalam pembaruan data apabila terjadi penyesuaian kegiatan, serta ketergantungan pada ketelitian dan ketepatan waktu penginputan oleh operator juga menjadi hal yang perlu diwaspadai.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-17) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan adalah :

1. Melakukan pemutakhiran data RUP secara berkala pada aplikasi SIRUP, khususnya apabila terdapat perubahan atau revisi kegiatan pengadaan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara periodik terhadap kesesuaian data RUP yang telah diumumkan.

SK. 6. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK LINGKUP BBPBL LAMPUNG

IKU 18. INDEKS PENGELOLAAN SDM SATKER BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.51. Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 18

Sasaran Kegiatan-6		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung						
IKU-18		Indeks pengelolaan SDM satker BBPBL Lampung (nilai)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	4	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Tim Kerja Dukungan Manajemen-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 18 yaitu *Indeks Pengelolaan SDM Satker BBPBL Lampung* belum dapat disajikan. Hal ini dikarenakan belum tersedianya data realisasi atas indikator dimaksud pada periode pelaporan Triwulan I.

Target indeks pengelolaan SDM Tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 4. Namun demikian, hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, proses pengukuran dan penilaian terhadap indeks tersebut belum dilaksanakan atau masih dalam tahap persiapan, sehingga nilai realisasi

belum dapat ditentukan. Penilaian indeks pengelolaan SDM pada umumnya dilakukan secara periodik dan memerlukan pengumpulan serta verifikasi data dukung yang komprehensif.

Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari perencanaan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Proses tersebut dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu :

1. Dokumen kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa Anjab dan ABK
2. Dokumen pengembangan kompetensi ASN, yang terdiri dari layanan tugas belajar, izin belajar, ujian dinas;
3. Dokumen layanan mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, kenaikan pangkat, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian;
4. Dokumen layanan ketatausahaan ASN, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan, dan
5. informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN.

Pemenuhan 5 komponen pada kegiatan pengelolaan SDM BBPBL Lampung adalah :

1. Dokumen kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa Anjab dan ABK
2. Dokumen pengembangan kompetensi ASN, yang terdiri dari layanan tugas belajar, izin belajar, ujian dinas; di BBPBL Lampung terdapat 4 orang tugas belajar (1 orang dibiayai oleh negara dan 3 orang biaya mandiri) dan 1 orang calon tugas belajar
3. Dokumen layanan mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, kenaikan pangkat, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; Di BBPBL Lampung terdapat pegawai yang mutasi 1 orang ke BPPKIL Serang dan menerima 3 orang pegawai dari Direktorat Air Payau, BPBL Batam dan BLUPPB Karawang. Kenaikan gaji berkala sebanyak 15 orang. Kenaikan pangkat 3 orang.
4. Dokumen layanan ketatausahaan ASN, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan. Kegiatan yang dilakukan oleh BBPBL Lampung untuk pengajuan cuti sebanyak 22 orang, pengusulan penerima SLKS
5. informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. Kegiatan yang dilakukan oleh BBPBL Lampung adalah melakukan rekapitulasi kehadiran, penghitungan tunjangan kinerja, dan pembaharuan data ASN.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Berdasarkan data capaian kinerja yang tersedia, baik pada Triwulan I Tahun 2025 maupun Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi nilai untuk IKU-18 *Indeks Pengelolaan SDM Satker BBPBL Lampung*. Dengan demikian, tidak terdapat data yang dapat digunakan untuk melakukan perbandingan capaian kinerja secara kuantitatif antar kedua periode tersebut.

Kondisi ini disebabkan oleh karakteristik indikator yang bersifat periodik dan memerlukan proses penilaian yang komprehensif, sehingga pengukuran indeks pengelolaan SDM umumnya tidak dilakukan pada awal tahun anggaran. Oleh karena itu, nilai capaian baru akan tersedia setelah proses evaluasi dan penilaian dilaksanakan pada periode selanjutnya.

Tabel 3.52. Data perbandingan capaian pengelolaan SDM lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	%
1.	BBPBL Lampung	4	-	-
2.	BPBAL Lombok	4	-	-
3.	BPBAL Ambon	4	-	-
4.	BPBAL Batam	4	-	-

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Berdasarkan data yang tersedia, pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi penggunaan anggaran yang secara langsung terkait dengan pencapaian IKU-18 *Indeks Pengelolaan SDM Satker BBPBL Lampung*. Selain itu, tidak terdapat informasi alokasi anggaran yang secara spesifik dikaitkan dengan indikator ini.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hingga akhir Triwulan I, kegiatan yang mendukung peningkatan indeks pengelolaan SDM belum direalisasikan atau masih dalam tahap perencanaan dan persiapan. Di samping itu, karakteristik indikator yang bersifat penilaian (indeks) memungkinkan bahwa capaian kinerja tidak secara langsung bergantung pada realisasi anggaran pada periode awal tahun.

Dengan demikian, realisasi penggunaan anggaran untuk IKU-18 pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat diukur. Meskipun demikian, diperlukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya guna mendukung pencapaian target indeks pengelolaan SDM yang telah ditetapkan.

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pemantauan kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 18 belum dapat diukur karena belum tersedianya data realisasi nilai indeks pengelolaan SDM. Dengan demikian, tingkat keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian indikator ini belum dapat ditentukan secara kuantitatif.

Kondisi tersebut disebabkan oleh karakteristik indikator yang bersifat periodik dan memerlukan proses penilaian yang komprehensif, sehingga pengukuran indeks pengelolaan SDM umumnya belum dilaksanakan pada awal tahun anggaran. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan indeks pengelolaan SDM masih dalam tahap perencanaan dan belum menunjukkan output yang dapat dinilai pada Triwulan I.

Meskipun demikian, belum tersedianya capaian pada Triwulan I tidak serta merta menunjukkan kegagalan kinerja, melainkan lebih disebabkan oleh mekanisme pengukuran indikator yang belum memasuki tahap penilaian. Oleh karena itu, kondisi ini masih dapat ditoleransi sepanjang pelaksanaan kegiatan pendukung dapat direalisasikan secara optimal pada triwulan berikutnya.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

1. Meningkatkan layanan mutasi yaitu dengan membuat pengumuman untuk mengecek PAK fungsional dalam rangka kenaikan pangkat/kenaikan jabatan



Gambar 3.26. Pengumuman terkait KP/KJ

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi belum optimalnya pengukuran capaian pengelolaan SDM BBPBL Lampung, antara lain :

1. Belum semua pegawai mengumpulkan PAK 2025 sehingga identifikasi pegawai yang memenuhi persyaratan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan belum maksimal.
2. SK Kenaikan Jabatan Ade Sutarman masih mengalami kendala pada persyaratan pendidikan yang diinput di aplikasi BKN,

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-18) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan adalah :

1. Mengumumkan ke semua pegawai khususnya Pejabat Fungsional untuk segera membuat PAK 2025 dan mengumpulkan pada GD yang telah disediakan.
2. Melakukan koordinasi antara timja SDMA DJPB, Timja Ortala, Biro SDMA dan BKN.

SK. 6. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK LINGKUP BBPBL LAMPUNG

IKU 19. PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SATKER DI BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.53. Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 19

Sasaran Kegiatan-6		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung						
IKU-19		Pelayanan keterbukaan infomasi public satker BBPBL Lampung (nilai)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	≥81	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Tim Kerja Dukungan Manajemen-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama (IKU-18) yaitu *Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BBPBL Lampung* pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat disajikan realisasinya. Target yang ditetapkan pada tahun 2026 adalah sebesar ≥81 dengan kategori baik. Belum tersedianya data realisasi pada periode Triwulan I disebabkan karena pengukuran indikator ini dilaksanakan secara periodik melalui mekanisme evaluasi oleh instansi yang berwenang, yang umumnya dilakukan pada pertengahan atau akhir tahun.

Meskipun demikian, berbagai upaya dalam rangka mendukung pencapaian target telah mulai dilaksanakan, antara lain melalui optimalisasi pengelolaan layanan informasi publik, pemutakhiran data dan dokumentasi informasi, serta peningkatan kualitas layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu, penyediaan sarana dan media informasi juga terus ditingkatkan guna mendukung keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan PPID di BBPBL Lampung selama periode Januari – Maret 2026 dalam Upaya keterbukaan informasi, maka melakukan pemutakhiran data dan dokumentasi, yaitu :

1. Surat Tugas PPID Tahun 2026
2. Alur Permintaan Informasi PPID 2026
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2026
4. Alur Pengajuan Keberatan Informasi 2026
5. Maklumat PPID 2026
6. Rincian Kertas Kerja TA. 2026
7. Renstra KKP 2025 - 2029
8. Laporan Kinerja BBPBL Lampung Tahun 2025
9. PK BBPBL Lampung
10. Renstra DJPB 2025 – 2029
11. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026
12. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

1.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-18) yaitu *Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BBPBL Lampung* belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025. Hal ini disebabkan karena pada kedua periode tersebut belum tersedia data realisasi, mengingat penilaian indikator dilakukan secara periodik dan tidak bersifat triwulanan.

Dengan demikian, analisis perbandingan capaian, baik dari sisi tingkat pencapaian maupun persentase kenaikan, belum dapat dilakukan pada Triwulan I. Namun demikian, upaya peningkatan kualitas layanan keterbukaan informasi publik tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari persiapan menghadapi evaluasi pada akhir periode penilaian

Tabel 3.54. Data perbandingan capaian keterbukaan informasi publik lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	%
1.	BBPBL Lampung	≥81	-	-
2.	BPBAL Lombok	≥81	-	-
3.	BPBAL Ambon	≥81	-	-
4.	BPBAL Batam	≥81	-	-

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi penggunaan anggaran terkait Indikator Kinerja Utama (IKU-18) yaitu *Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BBPBL Lampung* belum dapat disajikan secara spesifik terhadap capaian indikator. Hal ini disebabkan karena indikator tersebut bersifat komposit dan penilaiannya dilakukan secara periodik, sehingga keterkaitan langsung antara realisasi anggaran dan capaian kinerja belum dapat diukur pada tahap ini.

Meskipun demikian, pelaksanaan anggaran untuk mendukung kegiatan keterbukaan informasi publik tetap berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, antara lain melalui kegiatan pengelolaan layanan informasi, pemutakhiran data dan dokumentasi, serta penyediaan sarana pendukung pelayanan informasi publik. Realisasi anggaran pada Triwulan I difokuskan pada tahap persiapan dan penguatan sistem layanan informasi guna mendukung pencapaian target kinerja pada periode evaluasi selanjutnya.

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-18) yaitu *Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BBPBL Lampung* belum dapat dinilai tingkat keberhasilan maupun kegagalannya. Hal ini disebabkan karena indikator tersebut diukur melalui mekanisme evaluasi periodik yang tidak dilaksanakan secara triwulanan, sehingga data realisasi capaian belum tersedia pada awal tahun.

Meskipun demikian, dari sisi proses pelaksanaan kegiatan, upaya pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kegiatan pendukung seperti pengelolaan dan pemutakhiran informasi publik, peningkatan kualitas layanan PPID, serta penyediaan data dan dokumentasi telah mulai dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan persiapan penilaian.

Dengan demikian, pada Triwulan I belum terdapat indikasi kegagalan dalam pencapaian indikator, namun keberhasilan juga belum dapat dikonfirmasi secara kuantitatif. Keberhasilan pencapaian target sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan kegiatan dan kesiapan data dukung hingga periode evaluasi akhir tahun. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan agar target nilai keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

1. Dalam upaya penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu, maka dilakukan Forum Konsultasi Publik



Gambar 3.27. Kegiatan Forum Konsultasi Publik

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi belum optimalnya pengukuran capaian pengelolaan SDM BBPBL Lampung, antara lain :

1. Ketersediaan data dan dokumen pendukung belum optimal di awal tahun
Beberapa informasi publik dan dokumen pendukung masih dalam proses pengumpulan dan pembaruan.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-19) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan adalah :

1. Pemutakhiran informasi publik secara berkala
Melakukan update rutin terhadap daftar informasi publik (DIP), website, dan media lainnya agar selalu relevan dan mudah diakses.

SK. 6. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK LINGKUP BBPBL LAMPUNG

IKU 20. PERSENTASE LAYANAN PERKANTORAN SATKER BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.55. Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 20

Sasaran Kegiatan-6		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung						
IKU-20		Persentase layanan perkantoran satker BBPBL Lampung (persen)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	100	100	100	100	-	-	-	-

Sumber : Tim Kerja Dukungan Manajemen-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama (IKU-20) yaitu *Persentase Layanan Perkantoran Satker BBPBL Lampung* pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh layanan perkantoran telah terlaksana secara optimal sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan

Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran didukung melalui penyediaan anggaran yang digunakan untuk menunjang operasional perkantoran, termasuk layanan administrasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta dukungan teknis lainnya. Meskipun realisasi anggaran pada Triwulan I belum disajikan secara rinci, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif sesuai dengan perencanaan.

Layanan perkantoran yang dilakukan oleh BBPBL Lampung adalah layanan dukungan teknis dan pelayanan publik.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025, kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang stabil, dimana capaian pada kedua periode sama-sama mencapai 100%. Dengan demikian, tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian (0%), namun konsistensi ini mencerminkan keberlanjutan kualitas layanan perkantoran yang tetap terjaga dengan baik.

Tabel 3.56. Data perbandingan capaian layanan perkantoran lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	%
1.	BBPBL Lampung	100	100	-
2.	BPBAL Lombok	100	-	-
3.	BPBAL Ambon	100	-	-
4.	BPBAL Batam	100	-	-

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Realisasi penggunaan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 belum disajikan dalam data, namun pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran tetap berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk mendukung operasional perkantoran, termasuk layanan administrasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta dukungan teknis lainnya guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satker.

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Kebahagiaan pencapaian target sebesar 100% pada indikator ini menunjukkan bahwa pengelolaan layanan perkantoran telah berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini didukung oleh perencanaan kegiatan yang matang, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta koordinasi internal yang baik dalam mendukung kelancaran operasional perkantoran.

Meskipun capaian telah optimal, perlu tetap dilakukan upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan guna mempertahankan kinerja yang telah dicapai serta mengantisipasi potensi kendala di periode berikutnya.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

1. Menyusun monev SOP Pelayanan Publik dalam rangka meningkatkan pelayanan



Gambar 3.28. Monev SOP Pelayanan Publik

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi belum optimalnya pengukuran capaian pengelolaan SDM BBPBL Lampung, antara lain :

1. Potensi ketergantungan pada rutinitas administratif tanpa inovasi dalam peningkatan kualitas layanan.

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-20) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan adalah :

1. Mendorong inovasi dalam layanan administrasi perkantoran, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan transparansi layanan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan pelatihan terkait tata kelola administrasi yang baik.

SK. 6. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK LINGKUP BBPBL LAMPUNG

IKU 21. NILAI MINIMAL YANG DIPERSYARATKAN UNTUK PEMBANGUNAN UNIT KERJA YANG BERPREDIKAT MENUJU WBK

Tabel 3.57. Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 21

Sasaran Kegiatan-6		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung						
IKU-21		Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan unit kerja yang berpredikat menuju WBK (nilai)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	76	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Tim Kerja Dukungan Manajemen-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, indikator Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada BBPBL Lampung belum menunjukkan realisasi capaian, sementara target yang ditetapkan pada tahun 2026 adalah sebesar 76. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja pada periode pelaporan ini belum dapat dihitung.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan Zona Integritas masih berada pada tahap awal, khususnya dalam proses pemenuhan komponen dan pengumpulan eviden pada masing-masing area perubahan. Selain itu, penilaian terhadap indikator ini

umumnya dilakukan setelah terpenuhinya seluruh unsur yang dipersyaratkan, sehingga capaian belum dapat ditampilkan pada Triwulan I.

Pada tanggal 31 Maret 2026, tim WBK mengikuti Zoom Meeting dengan Topik Pembangunan ZI menuju WBK lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya. Dalam acara tersebut juga dilakukan pengenalan dan asistensi penggunaan Akun ZI. Seluruh proses penilaian ZI wajib menggunakan aplikasi tersebut. BBPBL Lampung mendapatkan 8 akun operator aplikasi ZI, seluruh dokumen diintegrasikan ke dalam aplikasi tersebut.

Berdasar Surat Tugas B.256/ITJ.3/KP.440/III/2026, Tim dari Inspektorat III telah melakukan pengawasan lainnya dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada BBPBL Lampung, mulai tanggal 30 Maret – 03 April 2026.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Berdasarkan data yang tersedia, capaian kinerja IKU-21 pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat direalisasikan (masih “-”), demikian pula data capaian pada Triwulan I Tahun 2025 yang tidak tersedia. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja secara time series antar periode Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dilakukan secara kuantitatif.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) sektor kelautan, pada umumnya capaian indikator pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada Triwulan I juga belum menunjukkan nilai akhir. Hal ini disebabkan oleh karakteristik indikator yang berbasis penilaian komprehensif terhadap pemenuhan komponen pembangunan Zona Integritas, yang biasanya dilakukan pada akhir periode atau setelah tahapan evaluasi internal dan eksternal selesai dilaksanakan.

Sebagian besar satker lingkup DJPB pada Triwulan I masih berada pada tahap:

- Pemenuhan dokumen dan eviden pada enam area perubahan;
- Pembangunan komitmen internal dan penancangan Zona Integritas;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi awal terhadap progres pembangunan WBK.

Dengan demikian, kondisi BBPBL Lampung yang belum memiliki realisasi nilai pada Triwulan I Tahun 2026 masih sejalan dengan pola capaian kinerja satker lain di lingkup DJPB. Perbedaan kinerja umumnya baru akan terlihat pada triwulan berikutnya, terutama setelah dilakukan penilaian internal (self-assessment) maupun evaluasi oleh tim penilai nasional.

Secara keseluruhan, belum adanya capaian pada Triwulan I tidak dapat diinterpretasikan sebagai rendahnya kinerja, melainkan sebagai bagian dari tahapan proses pembangunan Zona Integritas yang bersifat bertahap dan berkelanjutan. Oleh karena itu, fokus utama pada periode ini adalah memastikan kesiapan komponen penilaian guna mencapai target nilai yang telah ditetapkan pada akhir tahun.

Tabel 3.58. Data perbandingan capaian nilai minimal WBK lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	%
1.	BBPBL Lampung	76	-	-
2.	BPBAL Lombok	76	-	-
3.	BPBAL Ambon	76	-	-
4.	BPBAL Batam	76	-	-

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Berdasarkan data Triwulan I Tahun 2026, tidak terdapat alokasi anggaran maupun realisasi anggaran yang tercatat secara khusus pada IKU-21 (seluruh komponen anggaran bernilai “-”). Dengan demikian, realisasi penggunaan anggaran untuk indikator ini belum dapat diukur atau dianalisis secara kuantitatif.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada BBPBL Lampung tidak didukung oleh pos anggaran yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam berbagai kegiatan operasional dan dukungan manajemen lainnya. Kegiatan seperti penyusunan dokumen eviden, rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan internal umumnya melekat pada anggaran kegiatan yang telah ada.

Secara umum, belum adanya realisasi anggaran pada Triwulan I juga sejalan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, di mana proses pembangunan Zona Integritas masih berada pada tahap persiapan dan pemenuhan komponen, sehingga kebutuhan anggaran belum signifikan atau belum terealisasi secara administratif.

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, indikator ini belum menunjukkan realisasi dengan target tahunan sebesar 76, sehingga tingkat capaian belum dapat dihitung. Oleh karena itu, analisis keberhasilan atau kegagalan belum dapat dinilai secara kuantitatif, namun dapat dianalisis dari sisi proses pelaksanaan kegiatan.

Analisis Keberhasilan (Aspek Proses):

- Tahapan awal pembangunan Zona Integritas telah mulai dilaksanakan, terutama dalam hal perencanaan dan pemenuhan komponen pada masing-masing area perubahan.
- Adanya komitmen organisasi untuk mencapai predikat WBK yang ditunjukkan melalui penetapan target kinerja.
- Proses internalisasi dan persiapan dokumen eviden sebagai dasar penilaian telah mulai dilakukan.

Analisis Kegagalan/Kendala:

- Belum adanya realisasi nilai pada Triwulan I menunjukkan bahwa progres pembangunan Zona Integritas belum mencapai tahap penilaian.
- Pemenuhan eviden pada enam area perubahan kemungkinan belum lengkap atau belum terdokumentasi secara optimal.
- Monitoring dan evaluasi internal belum berjalan secara intensif untuk mengukur perkembangan capaian.
- Keterlibatan seluruh unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas masih perlu ditingkatkan.

Belum tercapainya realisasi pada Triwulan I tidak serta-merta menunjukkan kegagalan, melainkan mencerminkan bahwa indikator ini masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Keberhasilan pencapaian target sangat bergantung pada percepatan pemenuhan komponen, konsistensi implementasi, serta kesiapan dalam menghadapi proses evaluasi pada triwulan berikutnya.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

1. Melengkapi dokumen sesuai arahan atau hasil reuiu Inspektorat III pada tahun 2026



Gambar 3.29. Rapat pembahasan hasil reuiu Inspektorat III

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi belum optimalnya pengukuran capaian nilai minimal yang dipersyaratkan Pembangunan WBK BBPBL Lampung, antara lain :

1. Penggunaan aplikasi ZI merupakan akun yang baru dikenal oleh Tim WBK BBPBL Lampung, dan dengan waktu yang sangat terbatas dalam penginputan dokumen ke aplikasi tersebut menyebabkan beberapa dokumen terlewat diinput

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-21) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan adalah :

1. Melakukan penginputan dokumen WBK BBPBL Lampung sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat III sebagai tim mitra

SK. 6. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK LINGKUP BBPBL LAMPUNG

IKU 22. INDEKS LAYANAN PERPUSTAKAAN SATKER BBPBL LAMPUNG

Tabel 3.59. Capaian Sasaran Kegiatan 6, pada IKU 22

Sasaran Kegiatan-6		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung						
IKU-22		Indeks layanan perpustakaan satker BBPBL Lampung (indeks)						
TW I - Tahun 2026								
Realisasi						Anggaran 2026		
TW I - 2025	Target 2026	Target TW I - 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-	3	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Tim Kerja Dukungan Manajemen-BBPBL Lampung 2026

CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan data capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026, indikator Indeks Layanan Perpustakaan Satker BBPBL Lampung belum menunjukkan realisasi, dengan target yang telah ditetapkan sebesar 3. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja pada periode ini belum dapat dihitung.

Belum adanya realisasi pada Triwulan I mengindikasikan bahwa proses pengukuran indeks layanan perpustakaan belum dilaksanakan atau masih dalam tahap persiapan, seperti penyusunan instrumen penilaian, pengumpulan data, maupun pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan perpustakaan. Umumnya, indikator berbasis indeks memerlukan waktu dalam proses pengumpulan dan pengolahan data sebelum menghasilkan nilai capaian.

Selama periode Januari – Maret 2026, perpustakaan BBPBL Lampung memperoleh tambahan koleksi bahan pustaka sebanyak 45 buku yang berasal dari hibah, baik dari mahasiswa maupun dari pegawai BBPBL Lampung.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (TW I - 2025 dan SATKER LAUT DJPB)

Berdasarkan data yang tersedia, capaian kinerja IKU-22 pada Triwulan I Tahun 2026 belum menunjukkan realisasi (masih “-”), demikian pula data capaian pada Triwulan I Tahun 2025 tidak tersedia. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja antar periode Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dilakukan secara kuantitatif.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) sektor kelautan, kondisi tersebut pada umumnya serupa. Indikator berbasis indeks layanan perpustakaan biasanya belum menghasilkan nilai capaian pada Triwulan I, karena masih berada pada tahap:

- Penyusunan instrumen pengukuran indeks;
- Pengumpulan data dan pelaksanaan survei kepuasan pengguna;
- Pengolahan dan validasi data hasil survei.

Sebagian besar satker lingkup DJPB juga cenderung baru memperoleh nilai indeks pada triwulan berikutnya, setelah proses pengukuran selesai dilakukan secara komprehensif. Dengan demikian, belum adanya realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 di BBPBL Lampung masih sejalan dengan pola capaian kinerja satker lain di lingkup DJPB. Perbedaan capaian antar satker umumnya baru akan terlihat setelah proses pengukuran indeks dilakukan secara penuh dan menghasilkan nilai yang dapat dibandingkan.

Tabel 3.60. Data perbandingan capaian indeks layanan perpustakaan lingkup UPT laut

No.	UPT	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	%
1.	BBPBL Lampung	3	-	-
2.	BPBAL Lombok	-	-	-
3.	BPBAL Ambon	-	-	-
4.	BPBAL Batam	-	-	-

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Belum tercapainya realisasi pada Triwulan I bukan merupakan indikasi kegagalan, melainkan menunjukkan bahwa indikator masih berada pada tahap persiapan dan proses pengukuran. Keberhasilan pencapaian target sangat bergantung pada percepatan pelaksanaan survei, kelengkapan data, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan pada triwulan berikutnya.

Analisis Keberhasilan (Aspek Proses) :

- Telah adanya penetapan target indeks layanan perpustakaan sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas layanan.
- Kegiatan layanan perpustakaan tetap berjalan secara operasional dalam mendukung kebutuhan informasi internal.
- Tahapan awal pengukuran indeks, seperti perencanaan survei dan penyusunan instrumen penilaian, kemungkinan telah mulai dipersiapkan.

Analisis Kegagalan :

- Belum adanya realisasi nilai pada Triwulan I menunjukkan bahwa proses pengukuran indeks belum dilaksanakan atau belum selesai.
- Pengumpulan data dan pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan perpustakaan belum dilakukan secara optimal.
- Belum tersedianya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk mengukur kualitas layanan perpustakaan secara berkala.
- Keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan layanan perpustakaan dapat mempengaruhi kualitas layanan dan pengukuran indeks.
- Tidak adanya dukungan anggaran yang teridentifikasi secara spesifik dapat menghambat optimalisasi peningkatan layanan.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kendala pada triwulan sebelumnya (TW IV – 2025) adalah :

1. Mendapatkan tambahan koleksi bahan pustaka sebanyak 45 buku dari mahasiswa dan pegawai BBPBL Lampung



Gambar 3.30. Tambahan bahan pustaka

YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi belum optimalnya pengukuran capaian indeks layanan perpustakaan BBPBL Lampung, antara lain :

1. Tidak adanya anggaran dalam pengadaan buku/bahan Pustaka menyebabkan perpustakaan BBPBL Lampung hanya mendapatkan bahan pustaka tambahan hanya merupakan laporan PKL dari mahasiswa/siswa yang PKL/penelitian di BBPBL Lampung

RENCANA AKSI TRIWULAN SELANJUTNYA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian dan pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU-22) pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan adalah :

1. Karena Perpustakaan saat ini tidak mendapatkan lagi anggaran untuk pembelian bahan pustaka, sehingga hanya mengandalkan hadiah dari pegawai, peserta Praktek maupun stakeholder. Untuk itu Perpustakaan senantiasa mencari serta menyarankan kepada pegawai, peserta Praktek maupun stakeholder agar berkenan menyumbangkan bahan pustaka untuk keberlangsungan Perpustakaan.

3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Tabel 3.61. Capaian Realisasi Keuangan TW I - 2026

REALISASI CAPAIAN KINERJA KEUANGAN							
TW I - Tahun 2026							
TW I - 2025	Target TW I - 2026	realisasi	% Capaian	% Kenaikan	Target 2025	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)
6.298.911.869	15	15,22	101,46	-16,99	>95	34.354.301.000	5.228.108.683

CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan data yang tersedia, realisasi kinerja keuangan pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp5.228.108.683 dari total pagu anggaran sebesar Rp34.354.301.000, atau setara dengan 15,22% dari target Triwulan I yang ditetapkan sebesar 15%. Dengan demikian, capaian kinerja keuangan mencapai 101,46%, yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target yang direncanakan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp6.298.911.869, terjadi penurunan sebesar 16,99%. Penurunan ini mengindikasikan adanya perlambatan dalam penyerapan anggaran secara nominal, meskipun secara persentase capaian terhadap target tetap menunjukkan kinerja yang optimal.

Target kinerja keuangan tahunan yang ditetapkan adalah >95%, sehingga capaian pada Triwulan I ini masih berada dalam koridor yang wajar dan menunjukkan progres yang baik pada awal tahun anggaran.

Secara umum, realisasi kinerja keuangan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dikategorikan baik, karena:

- Persentase capaian telah melampaui target triwulanan.
- Penyerapan anggaran berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
- Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini masih dapat ditoleransi mengingat dinamika pelaksanaan kegiatan di awal tahun anggaran.

Tabel 3.62. Rincian realisasi anggaran TW I - 2026

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pegawai	15.280.190.000	3.263.588.590	21,36
2.	Barang	18.766.379.000	1.944.670.093	10,36
3.	Modal	307.732.000	19.850.000	6,45
	TOTAL	34.354.301.000	5.228.108.683	15,22

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-Lain	Transfer	
1	427706 DALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	PAGU	15.280.190.000	18.766.379.000	307.732.000	0	0	0	0	0	0	34.354.301.000
		REALISASI	3.263.588.590	1.944.670.093	19.850.000	0	0	0	0	0	0	5.228.108.683
		SISA	12.016.601.410	16.821.708.907	287.882.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15.22%
	GRAND TOTAL	PAGU	15.280.190.000	18.766.379.000	307.732.000	0	0	0	0	0	0	34.354.301.000
		REALISASI	3.263.588.590	1.944.670.093	19.850.000	0	0	0	0	0	0	5.228.108.683
		SISA	12.016.601.410	16.821.708.907	287.882.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15.22%

Gambar 3.31. Realisasi anggaran TW I – 2026 (sumber OM-SPAN)

3.3.1. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber dana pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dinilai dari kemampuan satuan kerja dalam merealisasikan anggaran secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan capaian yang ada, realisasi anggaran sebesar 15,22% dari target 15% menunjukkan bahwa penyerapan anggaran telah dilakukan secara tepat dan terukur, tanpa terjadi deviasi yang signifikan.

Capaian sebesar 101,46% mengindikasikan bahwa penggunaan dana telah dilakukan secara efisien, di mana pelaksanaan kegiatan mampu memenuhi bahkan sedikit melampaui rencana penyerapan yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan :

- Perencanaan anggaran yang cukup akurat dan realistis;
- Pengendalian pelaksanaan kegiatan yang berjalan efektif;
- Pemanfaatan sumber daya keuangan yang optimal pada awal tahun anggaran.
-

Namun demikian, jika dilihat dari sisi nominal, realisasi anggaran mengalami penurunan sebesar 16,99% dibandingkan Triwulan I Tahun 2025. Hal ini dapat mengindikasikan adanya upaya efisiensi belanja atau penyesuaian pola penyerapan anggaran yang lebih selektif dan berhati-hati di awal tahun.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber dana pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dikategorikan baik, dengan catatan bahwa :

- Penyerapan anggaran dilakukan sesuai kebutuhan riil kegiatan;
- Tidak terjadi pemborosan atau deviasi yang tidak terkendali;
- Perlu dilakukan percepatan secara bertahap pada triwulan berikutnya agar efisiensi tetap terjaga sekaligus mendukung pencapaian target kinerja tahunan.

Capaian kinerja yang tercermin dalam nilai NPSS sebesar 107,45 menunjukkan bahwa output/kinerja yang dihasilkan telah melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, persentase realisasi anggaran sebesar 101,46% terhadap target triwulanan mengindikasikan bahwa penyerapan anggaran berjalan sesuai rencana bahkan sedikit lebih tinggi.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran, diperoleh efisiensi anggaran sebesar 101,46%, yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Kinerja/output telah tercapai secara optimal dengan penggunaan anggaran yang terukur;
- Tidak terdapat pemborosan anggaran yang signifikan;
- Penggunaan sumber daya keuangan mampu menghasilkan capaian di atas target.

Tabel 3.63. Efisiensi Anggaran TW I - 2026

Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air tawar	34.354.301.000	5.228.108.683	107,45	15,22	101,46
Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut					
Terkelolanya sistem perikanan budi daya air payau					
Terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut					
Terkelolanya sistem prasarana dan sarana perikanan budi daya					
Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung					

Nilai efisiensi yang berada di atas 100% menunjukkan bahwa :

- Setiap unit anggaran yang digunakan mampu menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari yang direncanakan;
- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien;
- Terdapat optimalisasi dalam penggunaan sumber daya (value for money).

BAB IV KESIMPULAN

4.1. KESIMPULAN

Secara umum, capaian kinerja BBPBL Lampung pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang **cukup baik**, terutama pada indikator yang telah memiliki realisasi. Beberapa indikator bahkan telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada awal tahun.

Pada sasaran kegiatan perikanan budi daya ikan air laut, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, antara lain :

- Penyaluran benih ikan laut mencapai 101,75% dari target triwulanan;
- Pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan mencapai 304,00%, jauh melampaui target;
- Surveillance resistensi antimikroba mencapai 166,67%;
- Monitoring penyakit ikan mencapai 100% sesuai target.

Hal ini menunjukkan tingginya produktivitas kegiatan laboratorium dan distribusi benih kepada masyarakat.

Pada sasaran kegiatan perikanan budi daya rumput laut, realisasi penyaluran bibit mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga dapat dikategorikan optimal.

Pada sasaran kegiatan dukungan manajemen, beberapa indikator menunjukkan capaian yang sangat baik, antara lain:

- Pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan mencapai 116,28%;
- Pengumuman RUP pada SIRUP mencapai 129,87%;
- Layanan perkantoran mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola manajemen dan administrasi berjalan dengan baik dan mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan.

Efisiensi Kinerja (Keterkaitan Output dan Anggaran)

Jika dikaitkan dengan realisasi anggaran Triwulan I sebesar 15,22% dengan capaian kinerja yang rata-rata berada di atas target (bahkan hingga di atas 100%), maka dapat disimpulkan bahwa :

- Pelaksanaan kegiatan telah menghasilkan output yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang relatif terbatas;
- Terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya, khususnya pada kegiatan teknis seperti pengujian laboratorium dan pelayanan publik;

- Nilai capaian kinerja yang melebihi target menunjukkan adanya optimalisasi proses kerja dan pemanfaatan anggaran yang efektif.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dikategorikan baik dan efisien, dengan karakteristik :

- Sebagian besar indikator yang terealisasi telah mencapai bahkan melampaui target;
- Penggunaan anggaran masih relatif rendah namun mampu menghasilkan output yang tinggi;
- Efisiensi anggaran dan efektivitas kinerja berjalan seimbang.

4.2. PERMASALAHAN

Meskipun capaian kinerja tergolong baik, masih terdapat beberapa indikator yang belum terealisasi pada Triwulan I, seperti:

- Pengadaan peralatan laboratorium;
- Produksi induk dan benih ikan laut;
- Produksi pakan ikan;
- Penyaluran sarana prasarana;
- Beberapa indikator manajemen (SAKIP, IKPA, perencanaan, SDM, dll).

Hal ini mengindikasikan:

- Adanya kegiatan yang bersifat seasonal atau menunggu tahapan pelaksanaan berikutnya;
- Kemungkinan keterlambatan proses pengadaan atau administrasi di awal tahun.

4.3. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya, perlu dilakukan :

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum terealisasi, khususnya yang terkait pengadaan dan produksi;
2. Optimalisasi penyerapan anggaran secara bertahap agar selaras dengan capaian kinerja;
3. Penguatan perencanaan dan monitoring agar seluruh indikator dapat terealisasi sesuai target tahunan;
4. Menjaga efisiensi tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

**RENCANA KERJA TAHUNAN
BBPBL LAMPUNG 2026**

No	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU	Target	PAGU Anggaran (Rp)
1.	Pengelolaan budidaya rumput laut	Proses Bisnis	Terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut	Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung (kg)	9.463	446.692.000
2.	Pengelolaan budidaya ikan air payau	Proses bisnis	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air payau	Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) BBPBL Lampung (kg)	6.211	70.000.000
3.	Pengelolaan budidaya ikan air laut	Proses bisnis	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	Sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ikan air laut oleh BBPBL Lampung (sampel)	200	52.849.000
4.	Pengelolaan budidaya ikan air laut	Proses bisnis	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	Benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung (ekor)	1.324.831	5.458.322.000
5.	Pengelolaan budidaya ikan air laut	Proses bisnis	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	Sampel monitoring penyakit ikan laut yang diuji oleh BBPBL Lampung (sampel)	160	217.700.000
6.	Pengelolaan budidaya ikan air laut	Proses bisnis	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	Sampel surveillance resistensi antimikroba ikan air laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BBPBL Lampung (sampel)	75	44.173.000
7.	Pengelolaan budidaya ikan air laut	Proses bisnis	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	Calon induk unggul ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung (ekor)	250	57.397.000
8.	Pengelolaan budidaya ikan air laut	Proses bisnis	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	Benih ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung (ekor)	162.436	920.618.000
9.	Pengelolaan budidaya ikan air tawar	Proses bisnis	Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air tawar	Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BBPBL Lampung (unit)	1	70.500.000

No	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU	Target	PAGU Anggaran (Rp)
10.	Pengelolaan prasarana dan sarana perikanan budidaya	Proses bisnis	Terkelolanya sistem prasarana dan sarana perikanan budi daya	Sarana perikanan budi daya yang disalurkan ke Masyarakat oleh BBPBL Lampung (unit)	35	7.395.270.000
	Program dukungan manajemen	Penguatan internal	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung			19.620.780.000
11.				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker BBPBL Lampung (Persen)	86	
12.				Penilaian Mandiri SAKIP BBPBL Lampung (Nilai)	84,2	
13.				Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPBL Lampung (nilai)	92,1	
14.				Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPBL Lampung (nilai)	71,75	
15.				Indeks Profesionalitas ASN BBPBL Lampung (nilai)	81,5	
16.				Nilai Pengawasan kearsipan satker BBPBL Lampung (Nilai)	81	
17.				Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BBPBL Lampung (Persen)	77	
18.				Indeks Pengelolaan SDM satker BBPBL Lampung (Nilai)	4	
19.				Pelayanan keterbukaan informasi publik satker BBPBL Lampung (Nilai)	≥81	
20.				Persentase layanan perkantoran satker BBPBL Lampung (Persen)	100	

No	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU	Target	PAGU Anggaran (Rp)
21.				Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja yang berpredikat menuju WBK (nilai)	76	
22.				Indeks layanan perpustakaan satker BBPBL Lampung (Indeks)	3	

Bandar Lampung, 1 April 2026

Kepala,



Supito, S.Pi, M.Si



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR 473 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2025 – 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 905);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktorat Jenderal ini.

KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan:

- a. penyusunan penetapan kinerja, rencana kerja tahunan, dan rencana kerja dan anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- b. penyusunan rencana/program pembangunan daerah provinsi/kabupaten/kota di bidang perikanan budi daya;
- c. koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor dan/atau antar unit kerja bidang perikanan budi daya di pusat dengan di daerah provinsi/kabupaten/kota;
- d. pengendalian program dan kegiatan pengembangan di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
- e. penyusunan evaluasi program dan kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,
Ttd.
TB.HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



Tinggal Hermawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR 473 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
BUDI DAYA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun Renstra K/L 2025-2029.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan perikanan budi daya diperlukan Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025–2029 yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Renstra ini merupakan dokumen yang menjabarkan kebijakan dan optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan budi daya untuk meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional serta peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Dokumen ini akan menjadi acuan rencana pembangunan perikanan budi daya dalam lima tahun ke depan bagi pemangku kepentingan perikanan budi daya dan pihak-pihak terkait lainnya seperti Kementerian/Lembaga, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, pelaku usaha, asosiasi, praktisi, dan akademisi. Rencana ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.1. Kondisi Umum

Sebagai Langkah awal dalam merancang strategi pembangunan sub sektor perikanan budi daya 5 (lima) tahun ke depan, dilakukan evaluasi terhadap kondisi umum. Evaluasi tersebut difokuskan pada pencapaian Renstra periode sebelumnya guna menilai tingkat keberhasilan serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan selanjutnya.

1.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020–2024

Pembangunan perikanan budi daya tahun 2020–2024 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor perikanan budi daya terhadap sektor perikanan nasional dan meningkatkan produksi perikanan budi daya berkelanjutan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Perbenihan Ikan;
- b) Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan;
- c) Pengelolaan Produksi dan Usaha;
- d) Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan; dan
- e) Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Adapun target Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana uraian berikut:

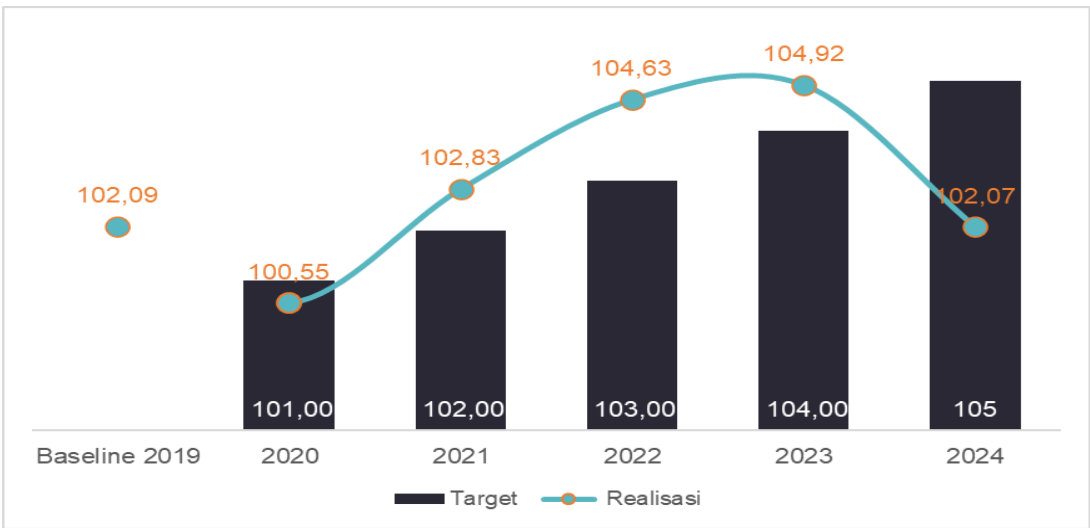
- a) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya dengan indikator:
 - 1) Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi) sebesar 101 pada tahun 2020 dan 105 pada tahun 2024; dan
 - 2) Rata-rata pendapatan pembudi daya Rp3.450.000,- pada tahun 2020 dan Rp3.700.000,- pada tahun 2024, sehingga terdapat kenaikan target Rp4.800.000 pada tahun 2024.
- b) Meningkatnya Ekonomi sektor perikanan budi daya dengan indikator:
 - 1) Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan budi daya sebesar Rp19,14 Milyar di tahun 2020 dan Rp23,77 Milyar di tahun 2024, sehingga terdapat kenaikan target pada tahun 2024 sebesar Rp49,98 Milyar;
 - 2) Korporasi Pembudi daya Ikan yang dikembangkan ditargetkan 10 unit di tahun 2023 dan 15 unit 2024; dan
 - 3) Tenaga Kerja yang terlibat di bidang perikanan budi daya dengan target 23.348 orang pada tahun 2022 dan 23.784 orang pada tahun 2024.
- c) Kawasan perikanan budi daya yang berkelanjutan dengan indikator kinerja:
 - 1) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan target level 4 pada tahun 2020 dan level 5 pada tahun 2022. Mulai tahun 2023 sudah tidak dilaksanakan di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya lagi.
 - 2) Percontohan pengelolaan klaster kawasan budi daya berkelanjutan dengan target 10 kawasan pada 2020 dan 50 kawasan pada tahun 2024.
- d) Meningkatnya produksi perikanan budi daya dengan indikator kinerja:
 - 1) Produksi perikanan budi daya sebesar 18,44 juta ton pada tahun 2020 dan 22,65 juta ton pada tahun 2024, sehingga terdapat kenaikan target 24,85 di 2024; dan
 - 2) Produksi ikan hias sebesar 1,87 miliar ekor pada tahun 2020 dan 2,33 miliar ekor pada tahun 2024, sehingga terdapat kenaikan 1,73 di 2024.
- e) Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya dengan indikator kinerja: persentase Sampel Residu yang memenuhi ketentuan dengan target 97% di tahun 2022 – 2024.
- f) Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan indikator:
 - 1) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebesar 72 di tahun 2020 dan 85 pada tahun 2024;
 - 2) Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi sebesar 6 unit kerja pada tahun 2020 dan 14 unit kerja pada tahun 2024;
 - 3) Batas tertinggi prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan nilai realisasi anggaran sebesar ≤ 1 pada tahun 2020 dan $\leq 0,5$ pada tahun 2024;
 - 4) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPB dengan nilai 85 pada tahun 2020 dan 84 pada tahun 2024;
 - 5) Tingkat Maturitas SPIP level 3 pada tahun 2020 dan level 3,3 pada tahun 2024;

- 6) Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 60 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024;
- 7) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 88 pada tahun 2020 dan 93,76 pada tahun 2024;
- 8) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan nilai 85 tahun 2020 dan 86 pada tahun 2024; dan
- 9) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan target 70 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024.

Dari Sasaran Strategis tersebut, capaian kinerja IKU Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2020-2024 sebagai berikut :

a) Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan oleh KKP dalam mengukur tingkat kesejahteraan pembudi daya ikan. NTPi menggambarkan rasio perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh pembudi daya atas hasil usahanya (It) dengan indeks harga yang dibayarkan oleh pembudi daya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya usaha budi daya (Ib). Dengan kata lain, NTPi menunjukkan kemampuan tukar hasil produksi perikanan budi daya terhadap kebutuhan hidup dan biaya usaha produksi, serta daya tukar penerimaan usaha pembudi daya terhadap kebutuhan hidup dan biaya usaha budi daya secara riil yang dialami oleh pembudi daya. Capaian NTPi ditunjukkan pada Gambar 1 sebagai berikut.

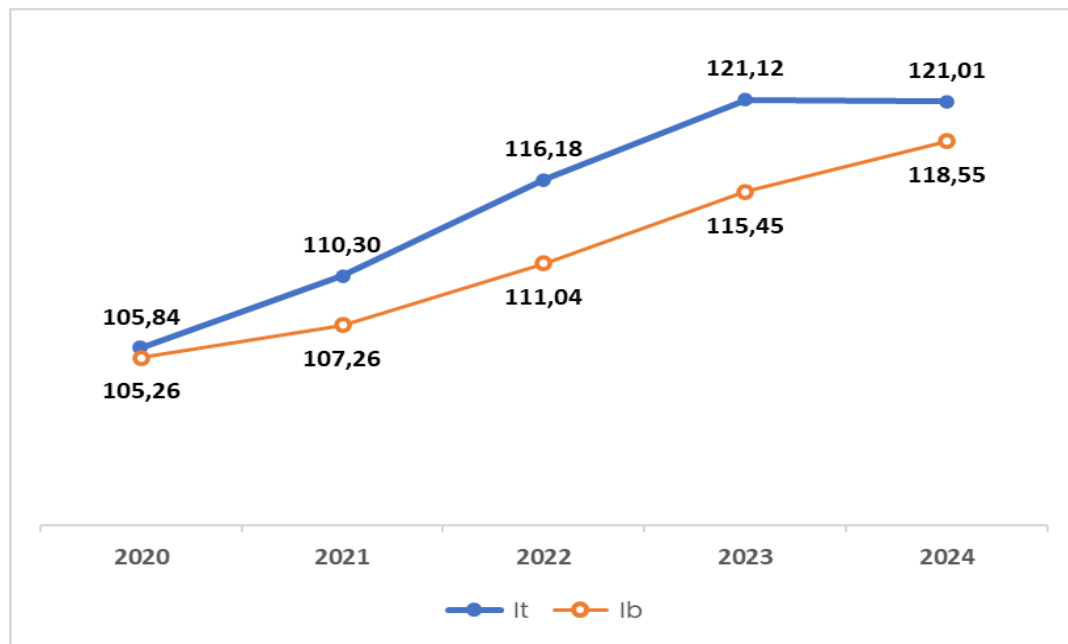


Gambar 1. Perkembangan NTPi Tahun 2020 – 2024
Sumber: BPS, 2025

Keterangan:

- Perhitungan NTPi Tahun 2019 menggunakan tahun dasar Tahun 2012
- Perhitungan NTPi Tahun 2020-2024 menggunakan tahun dasar Tahun 2018

Realisasi NTPi periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif, dengan pertumbuhan rata-rata 1,43% per tahun dari 2020 hingga 2023, namun terjadi penurunan sebesar -2,72% pada tahun 2024. Capaian NTPi tahun 2024 sebesar 102,07, masih di bawah target 105, menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan pembudi daya belum optimal sesuai target. Hal ini terjadi karena kenaikan pendapatan (Indeks Harga Diterima/It) tidak diimbangi secara signifikan oleh kenaikan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga (Indeks Harga Dibayar/Ib), sehingga daya tukar pembudi daya cenderung stagnan



Gambar 2. Perkembangan Indeks yang diterima (it) dan Indeks yang dibayarkan (ib) Tahun 2020 – 2024
Sumber: BPS, 2024

Penurunan NTPi didorong oleh dua faktor utama. Pertama, melonjaknya biaya produksi, terutama pakan yang mencapai 60–70% dari total biaya, dengan harga yang terus naik akibat ketergantungan pada bahan baku impor (tepung ikan, bungkil kedelai), fluktuasi nilai tukar, dan biaya logistik yang tinggi. Selain itu, biaya benih unggul, listrik, obat-obatan, dan probiotik juga semakin memberatkan. Kedua, pendapatan pembudi daya tertekan akibat lemahnya posisi tawar di rantai pasok, dominasi tengkulak, jatuhnya harga saat panen raya karena pasokan berlebih dan minimnya fasilitas penyimpanan, serta tuntutan pasar yang ketat terhadap ukuran dan kualitas yang menyebabkan ikan dengan kualitas tidak sesuai standar dihargai lebih rendah.

b) Rata-rata Pendapatan Pembudi daya Ikan

Peningkatan pendapatan pembudi daya merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan perikanan budi daya. Pendapatan pembudi daya ikan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga ikan, termasuk rumput laut. Realisasi pendapatan pembudi daya ikan pada tahun 2020 sebesar Rp3.544.245,- dan Rp5.130.000,- pada tahun 2024.

c) Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berasal dari pendapatan PNBP lainnya berupa hasil samping kegiatan pembudidayaan ikan, pemeriksaan/pengujian laboratorium, pekerjaan dan informasi, hasil penjualan hasil produksi non litbang lainnya, penggunaan sarana prasarana sesuai tugas dan fungsi, dan jasa lainnya di Balai-Balai budi daya lingkup DJPB, PNBP pengelolaan BMN dan pendapatan non anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021

Realisasi Nilai PNBP dari Perikanan Budi Daya sebesar Rp23,50 Milyar di tahun 2020 dan Rp117,04 Milyar di tahun 2024. Realisasi PNBP mengalami kenaikan rata-rata sebesar 120 persen dibanding target dikarenakan terdapat setoran PNBP tinggi di tiga satker Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang menjadi satker Badan Layanan Umum (BLU) yakni BBPBAP Jepara dan BLUPPB Karawang

dengan hasil panen kegiatan modelling budi daya udang vaname, serta BPBAP Situbondo dengan hasil penjualan benih lobster.

d) Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perikanan Budi Daya

Indikator tenaga kerja yang terlibat ini secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan sektor kelautan dan perikanan terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan, pemasaran, usaha garam, penyuluhan, dan karantina ikan. Khususnya jumlah tenaga kerja yang terlibat pada perikanan budi daya yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor kelautan dan perikanan. Sektor perikanan budi daya merupakan sektor yang melibatkan banyak keterlibatan dan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan peningkatan sektor perikanan budi daya sebanding dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Adapun penyerapan tenaga kerja di perikanan budi daya meliputi kegiatan pengelolaan budi daya ikan air tawar, pengelolaan budi daya ikan air payau, pengelolaan budi daya ikan air laut dan pengelolaan budi daya rumput laut.

Selama kurun waktu 2022-2024, tenaga kerja yang terlibat di bidang perikanan budi daya mencapai 45.813 orang tahun 2022, 45.892 pada tahun 2023 dan 32.509 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022, jumlah tenaga kerja yang terlibat di bidang perikanan budi daya mengalami penurunan, hal ini terjadi karena indikator ini bergantung pada jumlah Bantuan Pemerintah yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

e) Korporasi Pembudi daya Ikan yang Dikembangkan

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah menginisiasi pengembangan korporasi Pembudi daya Ikan sejak tahun 2023 sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat posisi ekonomi pembudi daya dan mendorong transformasi struktur usaha dari skala mikro/kecil menjadi entitas yang lebih modern dan berkelanjutan. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024, yang mencakup target pembentukan 350 Korporasi Petani dan Nelayan. Sejak dimasukkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada 2023, program ini menunjukkan progres positif: terbentuk 10 korporasi pada tahun 2023 di sentra produksi utama seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku, kemudian meningkat menjadi 15 korporasi tambahan pada 2024 dengan ekspansi ke wilayah baru seperti Kalimantan Timur dan Bali. Setiap korporasi umumnya terdiri atas 20 - 50 pembudi daya, sehingga secara total telah melibatkan ratusan pembudi daya ikan di seluruh Indonesia. Korporasi ini dibentuk dalam bentuk badan hukum seperti koperasi atau kelompok usaha bersamadengan mayoritas kepemilikan modal berada di tangan pembudi daya sendiri, sebagai upaya mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pengembangan korporasi dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen usaha, teknis budi daya, pasca panen, hingga pemasaran, dengan dukungan kolaborasi antar unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) untuk fasilitasi akses pembiayaan. Hasilnya, korporasi mampu meningkatkan efisiensi produksi hingga 15–20% melalui pembelian sarana produksi secara kolektif, memperkuat posisi tawar dalam negosiasi harga, serta memperluas akses ke pasar domestik dan ekspor. Selain itu, pembudi daya juga mengalami peningkatan

kapasitas manajerial, keterampilan teknis, dan adopsi teknologi modern. Dengan capaian ini, korporasi pembudi daya ikan menjadi salah satu pilar strategis dalam mendorong kemandirian, produktivitas, dan kesejahteraan pembudi daya menuju sektor perikanan budi daya yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

- f) Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Indikator ini ditetapkan sampai dengan tahun 2021 saja karena terdapat perubahan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dimana mulai tahun 2022 Kegiatan pengembangan SKPT dialihkan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Capaian Tingkat Kemandirian SKPT sampai dengan tahun 2021 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah 3,67 dari target 4 di 3 lokasi yaitu Kota Sabang, Sumba Timur, dan Rote Ndao. Target Tingkat Kemandirian SKPT tidak tercapai karena tidak ada pembangunan fisik dan pandemi COVID-19 sehingga telah menyebabkan kegiatan pengembangan SKPT terhambat termasuk kegiatan pendampingan dan koordinasi.

- g) Percontohan Pengelolaan Klaster Kawasan Budi Daya Berkelanjutan

Pengelolaan klaster kawasan budi daya berkelanjutan merupakan salah satu pendekatan strategis dalam pembangunan perikanan budi daya yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan keberlanjutan lingkungan. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan kawasan dengan memadukan aspek teknologi budi daya, manajemen usaha, serta tata kelola sumber daya yang ramah lingkungan.

Klaster budi daya dikembangkan sebagai model pengelolaan tambak terpadu yang melibatkan para pembudi daya secara kolektif dalam satu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan skala ekonomi, akses pasar yang lebih baik, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana produksi.

Sejak dimulainya program pada tahun 2020, jumlah kawasan klaster budi daya terus mengalami peningkatan signifikan sebagai hasil dari revitalisasi tambak tradisional dan pembangunan infrastruktur budi daya modern. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan penerapan konsep pengelolaan kawasan yang berbasis Klaster dan integrasi rantai pasok. Setiap Klaster umumnya mencakup area seluas 5–50 hektare dengan partisipasi ratusan pembudi daya. Capaian setiap Klaster dikembangkan dengan prinsip pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, meliputi: (i) Penggunaan benih unggul dan pakan berkualitas; (ii) Sistem pengairan terpadu dan ramah lingkungan; (iii) Monitoring kualitas air dan kesehatan ikan secara berkala; (iv) Pendampingan teknis dan pelatihan intensif kepada pembudi daya; (v) Penguatan kelembagaan usaha dan kemitraan dengan industri pengolahan.

Pembangunan Klaster selama tahun 2020-2024 telah tercapai sebanyak 50 Klaster di 12 Provinsi. Dampak positif Pengembangan Klaster antara lain: (i) Meningkatnya produktivitas kawasan perikanan budi daya hingga 30–50%; (ii) Meningkatkan kualitas produk perikanan budi daya melalui penerapan *good aquaculture practices*; (iii) Meningkatkan manajemen pengelolaan kawasan perikanan budi daya sehingga mengurangi risiko penurunan kualitas lingkungan; dan (iv) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudi daya ikan.

- h) Produksi Perikanan Budi Daya

Produksi perikanan budi daya nasional selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang stabil, meskipun masih memerlukan

percepatan untuk mencapai target produktivitas yang lebih tinggi. Berdasarkan data hasil validasi tahun 2024, berikut adalah capaian volume produksi perikanan budi daya dari tahun 2020 hingga 2024:

Tabel 1. Capaian Volume Produksi Perikanan Budi Daya Tahun 2020 - 2024

Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	14.845.015	14.648.310	14.776.057	15.361.425	15.754.612
Udang	881.599	953.177	918.550	941.646	958.463
Rumput Laut	9.618.421	9.092.031	9.234.268	9.753.410	9.853.604
Bandeng	811.883	780.763	779.706	772.709	792.864
Kerapu	9.478	13.422	12.240	11.352	16.063
Kakap	5.418	8.464	8.642	7.746	10.563
Ikan Mas	560.669	651.238	508.724	483.365	524.781
Nila	1.172.633	1.300.529	1.356.654	1.368.542	1.563.327
Lele	993.768	1.041.422	1.101.625	1.136.619	1.158.418
Patin	327.146	332.023	340.444	348.379	383.209
Gurami	152.669	149.170	159.572	153.939	161.402
Ikan Lainnya	311.331	388.816	355.632	383.717	331.918

Sumber: Portaldata KKP, Oktober 2025

Data capaian produksi Tahun 2024 berbeda dengan apa yang termuat dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 yakni sebesar 17,18 Juta ton, karena data tersebut masih bersifat sementara dari Portaldata KKP yang belum divalidasi. Adapun data pada tabel di atas merupakan data yang bersumber dari Portaldata KKP yang sudah divalidasi secara nasional per bulan Oktober tahun 2025.

Rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budi daya selama periode tahun 2020–2024 tercapai sebesar 1,52% per tahun. Peningkatan Produksi ini menunjukkan tren peningkatan yang positif, hal ini sejalan dengan tujuan pelaksanaan berbagai program yang telah dilaksanakan pada 2020 - 2024.

Kontribusi terbesar perikanan budi daya berasal dari komoditas rumput laut. Produksi perikanan budi daya Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan terutama karena peningkatan produksi rumput laut yang didorong dengan semakin meluasnya penggunaan bibit rumput laut hasil kultur jaringan. Di samping itu, beberapa komoditas lain mengalami peningkatan produksi yang didorong telah mulai beroperasinya beberapa proyek prioritas perikanan budi daya seperti Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen dan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang.

Gambaran produksi berbagai komoditas pada kurun waktu 2020-2024 diuraikan sebagaimana berikut:

1) Udang

Produksi udang nasional selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 2,2% per tahun. Pada tahun 2024, produksi udang mencapai 47,99% dari target, meskipun belum optimal akibat tumpang tindih tata ruang lahan budi daya dan penurunan akses pasar ekspor, khususnya ke Amerika Serikat. Namun, produksi tetap meningkat dibanding tahun sebelumnya, seiring bergulirnya program terobosan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, seperti Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di

Kebumen. Upaya peningkatan produksi dan nilai usaha udang dilakukan melalui rehabilitasi infrastruktur tambak, bantuan sarana budi daya, pengembangan klaster berbasis manajemen kawasan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha, peningkatan teknologi budi daya ramah lingkungan, serta pendampingan teknis yang intensif dan masif, didukung kolaborasi lintas sektor untuk memperlancar akses infrastruktur, permodalan, dan pasar.

2) Kerapu

Produksi ikan kerapu menunjukkan tren positif dari tahun 2020 hingga 2024, dengan capaian sebesar 16.063 ton pada 2024 atau 25,5% dari target 63.052 ton. Tidak tercapainya target tersebut sebagian besar disebabkan oleh penyesuaian alokasi produksi pada penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Untuk mendorong peningkatan produksi budidaya kerapu, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melaksanakan beberapa program diantaranya penyediaan benih bermutu melalui UPT dan unit pembenihan skala rumah tangga, serta mendorong pengembangan kawasan budi daya laut melalui bantuan KJA di daerah potensial, yang turut memperluas klaster budi daya kerapu secara nasional.

3) Kakap

Produksi ikan kakap tumbuh rata-rata 8,57% per tahun selama 2020–2024, namun hanya mencapai 14,9% dari target tahunan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh penambahan target produksi dari kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sehingga target produksi ikan Kakap hasil budi daya mengalami peningkatan dari target sebelumnya. Terbatasnya ketersediaan benih bermutu, serta berkurangnya tambak tradisional karena beralih ke sistem intensif menjadi faktor penyebab lain tidak tercapainya target produksi ikan Kakap. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendorong pengembangan benih ikan kakap di UPT, serta memberikan bantuan KJA laut di daerah potensial, guna memperluas akses teknologi dan mendorong pertumbuhan budi daya kakap berbasis kawasan.

4) Bandeng

Produksi bandeng mengalami kenaikan 2,61% pada tahun 2024, meski sempat turun akibat pandemi pada 2020–2022. Target produksi belum tercapai karena terbatasnya sentra pembenihan dan ekspor nener yang mengurangi ketersediaan benih dalam negeri. Untuk meningkatkan produksi, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menerapkan strategi pengembangan klaster budi daya bandeng, mengembangkan *broodstock* berkualitas, mendorong teknologi efisien berbasis lingkungan, serta menjalin kemitraan dengan *stakeholder* guna memperkuat klaster dan rantai nilai budi daya bandeng.

5) Patin

Produksi patin mengalami kenaikan rata-rata 4,09 selama 2020–2024, meski sempat turun akibat pandemi pada 2020–2022. Belum tercapainya produksi ikan patin di tahun 2023 antara lain disebabkan kendala pemasaran ikan patin pada beberapa sentra produksi di Indonesia, selain itu tingkat efisiensi produksi masih rendah. Pangsa pasar ikan patin saat ini sebagian besar mengandalkan pasar lokal dalam bentuk ikan segar, adapun pasar ekspor dalam bentuk fillet terkendala tingginya harga ikan patin di pasar lokal. Untuk itu perlu didorong pengembangan ikan patin melalui *integrated farming* yang terinteraksi hulu-hilir, kerja sama sinergi baik lintas sektoral, swasta maupun stakeholders lain. Kerja sama diarahkan dalam rangka penciptaan peluang pasar baru seperti Arab Saudi dan daerah Timur

Tengah lainnya, diversifikasi produk, pengembangan input teknologi dan pengembangan kawasan budi daya ikan patin secara terintegrasi.

6) Nila

Produksi ikan nila meningkat rata-rata 7,58% per tahun, dengan capaian 63,5% dari target pada 2024. Belum tercapainya target disebabkan adanya kebijakan penataan KJA di perairan umum. Untuk meningkatkan produksi ikan nila, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendorong produksi nila dengan sistem bioflok dan mengembangkan budi daya nila di tambak yang dikenal sebagai budi daya ikan nila salin. Kegiatan lain guna mendorong produksi ikan nila antara lain pengembangan kampung budi daya nila, budi daya intensif berbasis bioflok dan *running water system*, penggunaan pakan mandiri.

7) Ikan Mas

Produksi ikan mas mengalami peningkatan 8,57% pada tahun 2024, dengan target yang belum tercapai karena kebijakan pembatasan kegiatan perikanan budi daya seperti KJA di perairan umum dan penurunan preferensi masyarakat dalam mengonsumsi ikan mas. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk terus mendorong pemulihan produksi ikan mas melalui intensifikasi teknologi budi daya dan pakan lokal, penguatan kemitraan usaha, pengembangan minapadi, serta perluasan akses pasar dan peningkatan nilai tambah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

8) Lele

Produksi ikan lele tumbuh rata-rata 3,92% per tahun dengan kinerja yang cukup stabil sejak 2021, seiring dengan pemulihan pasca-pandemi. Keberhasilan ini didukung oleh kemudahan proses budi daya ikan lele dan permintaan lokal yang tinggi. Untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendorong penggunaan induk unggul dan benih bermutu, penerapan teknologi bioflok dan kolam terpal, dan penggunaan pakan mandiri berbasis bahan baku lokal. Bersamaan dengan itu juga dikembangkan dan dilakukan perluasan pasar lokal dan ekspor.

9) Gurame

Produksi gurame tumbuh rata-rata 1,5% per tahun menunjukkan kinerja yang positif. Angka capaian produksi tahun 2024 belum mencapai target produksi dengan capaian sebesar 24,7% dari target 653.800 ton. Meningkatnya produksi ini terutama disebabkan karena nilai ekonomis ikan gurame yang cukup tinggi dan pemasarannya yang masih terbuka. Produksi Gurame masih didominasi pada beberapa sentra-sentra produksi yang sudah ada, sedangkan di sisi lain kapasitas usaha yang dijalankan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan produksi gurame dapat dioptimalkan melalui segmentasi usaha budi daya gurame dan upaya untuk mengatasi permasalahan penyakit ikan gurame.

10) Rumput Laut

Rumput laut memberikan kontribusi terbesar terhadap volume produksi perikanan budi daya nasional rata-rata sebesar 63,08% dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,69% per tahun pada periode tahun 2020-2024. Kontribusi volume terbesar ini disebabkan oleh siklus budi daya rumput laut yang lebih banyak dalam satu tahun, jumlah pembudi daya yang lebih banyak, karena penerapan teknologi sederhana, dan memerlukan modal kecil, serta akses pasar yang luas. Pembangunan laboratorium kultur jaringan di sentra budi daya rumput laut juga mendorong penggunaan bibit rumput laut kultur jaringan yang lebih luas yang secara langsung berperan dalam peningkatan produksi rumput laut nasional.

Untuk lebih mendorong produksi rumput laut, Pemerintah melaksanakan program hilirisasi rumput laut untuk meningkatkan permintaan rumput laut, meningkatkan nilai tambah produk turunan rumput laut dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru. Selain mengembangkan komoditas unggulan seperti *Eucheuma Cottonii* dan *Gracillaria* sp., pemerintah juga mengembangkan spesies rumput laut lain seperti *Eucheuma spinosum*, *Ulva* sp., *Sargassum* sp. dan *Caulerpa* sp. yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap produksi rumput laut nasional.

Capaian produksi perikanan budi daya secara keseluruhan selama periode 2020–2024 didukung oleh kebijakan strategis seperti industrialisasi perikanan budi daya, penguatan *broodstock center*, dan pengembangan sistem produksi berkelanjutan berbasis klaster, yang menjadi fondasi transformasi sektor ini menuju produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan yang lebih inklusif.

Walaupun produksi perikanan budi daya pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,52% per tahun, namun produksi ini belum dapat mencapai target nasional yang ditetapkan. Pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 hingga 2022 berdampak langsung terhadap produksi perikanan budi daya selama periode 2020-2024. Selama masa pandemi aktivitas budi daya terganggu akibat keterbatasan akses dan distribusi sarana produksi, operasional budi daya serta kendala pemasaran.

Berbagai upaya pemulihan produksi perikanan budi daya pasca COVID-19 telah dilakukan pemerintah diantaranya penguatan sistem produksi secara menyeluruh. Pada tahun 2023 upaya tersebut menunjukkan keberhasilan dengan terjadinya peningkatan produksi perikanan budi daya pada beberapa komoditas unggulan. Tren peningkatan ini diharapkan dapat terus berlanjut di masa yang akan datang dengan dukungan berbagai program pemerintah.

i) Produksi ikan hias

Ikan hias merupakan komoditas perikanan budi daya yang memiliki nilai tambah tinggi dan potensi ekonomi menjanjikan. Berdasarkan Sensus Pertanian BPS 2023, ikan hias memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan sektor budi daya. Komoditas ini terbagi menjadi ikan hias air tawar dan air laut, dengan ikan hias air tawar sebagai jenis yang paling banyak dibudidayakan karena mudah dikembangkan, membutuhkan modal kecil, serta lahan dan media yang sederhana bahkan dapat memanfaatkan wadah bekas layak pakai. Pada tahun 2024, produksi ikan hias mencapai 1,52 miliar ekor atau 88,12% dari target 1,73 miliar ekor, menunjukkan tren peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi didukung oleh semakin tingginya permintaan global terhadap ikan hias asli Indonesia, seperti arwana yang kini mulai menembus pasar Amerika dan Eropa. Pemulihan pasca-pandemi juga turut mendorong pertumbuhan sektor ini, termasuk peningkatan ekspor yang mengangkat posisi Indonesia sebagai pengeksport ikan hias terbesar kedua di dunia (data Trademap 2023). Untuk memperkuat pengembangan sektor ini, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah menetapkan beberapa wilayah sebagai kampung ikan hias, seperti di Bogor, Karawang, Blitar, dan Kediri, dengan komoditas unggulan seperti koi, mas koki, dan cupang. Program ini diharapkan mendorong inovasi, pengembangan strain lokal non-invasif, serta pemasaran ikan hias endemik yang eksotis dan diminati pasar internasional.

Tabel 2. Capaian Volume Produksi Ikan Hias Tahun 2020 - 2024

Tahun	Volume Produksi (Juta Ekor)	Nilai Produksi (Rp Miliar)
2020	1.498	7.376
2021	1.607	7.657
2022	1.477	6.712
2023	1.510	6.683
2024	1.586	7.022
Kenaikan Rata-Rata (%)	1,62	-0,97

j) Persentase Jumlah Sampel Residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu).

Jaminan mutu dan keamanan pangan suatu produk perikanan budidaya saat ini sudah merupakan persyaratan dalam perdagangan dan keberlanjutan produksi perikanan budi daya yang harus dipenuhi. Dalam upaya menghadapi persaingan yang cukup ketat di pasar global maka peningkatan daya saing produk perikanan budi daya harus dapat dilakukan, salah satunya dengan mengendalikan kandungan residu pada produk perikanan budi daya. Kegiatan pengendalian residu produk perikanan budi daya di Indonesia diimplementasikan melalui sistem pengendalian residu nasional yang dituangkan dalam Rencana Monitoring Residu Nasional-*National Residue Monitoring Plan* (NRMP). Capaian sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 100%.

k) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

- 1) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan capaian tahun 2024 sebesar 86,80%;
- 2) Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari dengan capaian tahun 2024 sebanyak 15 satker;
- 3) Batas tertinggi prosentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan capaian tahun 2024 sebesar 0,06%;
- 4) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPB dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 84,054;
- 5) Tingkat Maturitas SPIP dengan capaian tahun 2024 pada level 3,3;
- 6) Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi dengan capaian tahun 2024 sebesar 93,33;
- 7) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan capaian tahun 2024 sebesar 92,50;
- 8) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya capaian tahun 2024 sebesar 86,99; dan
- 9) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan capaian tahun 2024 sebesar 82,56.

1.1.2. Penghargaan yang Diraih Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2020-2024

Penghargaan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya merupakan sebuah capaian positif atas kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Selama periode tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menerima berbagai macam antara lain yaitu:

- a. Tahun 2021
 - 1) BBPBAP Jepara meraih predikat Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- b. Tahun 2022
 - 1) BPKIL Serang sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Predikat Pelayanan Prima Tahun 2022 untuk Pelayanan Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- c. Tahun 2023
 - 1) Juara 1 dan 2 Juara video dokumenter Program Prioritas pada Lomba Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (AJSB) 2023;
 - 2) BLUPPB Karawang sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Predikat Pelayanan Prima Tahun 2023;
 - 3) BPKIL Serang sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Ramah kelompok Rentan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023;
 - 4) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai unit organisasi berpredikat Informatif dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023; dan
 - 5) Direktorat Pakan dan Obat Ikan sebagai Unit Pelayanan Publik dengan Kategori Kualitas Tertinggi (Zona Hijau) pada penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2023.
- d. Tahun 2024
 - 1) Juara 1 video dokumenter Program Prioritas pada Lomba Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (AJSB) 2024;
 - 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai unit organisasi berpredikat Informatif dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024; dan
 - 3) BPKIL Serang sebagai unit organisasi berpredikat terbaik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KKP tahun 2024.

1.1.3. Kerja Sama yang sudah dilakukan

Pelaksanaan kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya didukung oleh berbagai kegiatan kerja sama selama periode tahun 2020-2024. Kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan untuk mendukung kegiatan prioritas meliputi kerja sama luar negeri dan antarlembaga dalam rangka pengembangan perikanan budi daya.

- a. *Support to upscaling and adoption of innovations and best practices for sustainable intensification and expansion of aquaculture in Asia (TCP/RAS/3808)*

Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI) atau Gerakan Swasembada Pakan adalah program nasional yang bertujuan menyediakan pakan ikan murah berbasis bahan lokal bagi pembudi daya ikan air tawar, khususnya ikan patin (*Pangasius*), guna mengurangi ketergantungan pada pakan impor atau komersial. Program ini didukung oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bekerja sama dengan FAO melalui *Technical Cooperation Programme*, dengan lokasi percontohan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sejak tahun 2022 ditetapkan sebagai Kampung Budidaya Ikan Patin.

Proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas teknis produsen pakan skala kecil dalam merancang formulasi pakan, memperluas produksi, meningkatkan kualitas pakan, menerapkan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), serta menyelesaikan hambatan teknis dalam efisiensi

produksi pakan lokal. Hasilnya, ketersediaan pakan berkualitas dan hemat biaya meningkat, sehingga mendorong efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan pembudi daya.

Beberapa keluaran utama proyek meliputi:

- 1) pengumpulan data tentang ketersediaan, biaya, dan potensi bahan pakan lokal serta kebutuhan nutrisi spesies budidaya;
- 2) penyempurnaan formulasi pakan ikan patin berbasis bahan lokal;
- 3) pengembangan model percontohan budidaya patin dengan pakan mandiri yang sesuai standar CPPIB;
- 4) diseminasi pengetahuan dan praktik budidaya berkelanjutan; dan
- 5) penyusunan panduan kebijakan untuk mendukung intensifikasi perikanan budidaya yang berkelanjutan di tingkat regional dan nasional.

b. Kerja Sama Sinergitas Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya di Kabupaten Kebumen

Dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan budi daya khususnya untuk komoditas udang, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk melakukan sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya kawasan perikanan budi daya.

Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi:

- 1) peningkatan produksi komoditas perikanan budi daya;
- 2) pengembangan dan penerapan teknologi perikanan budi daya;
- 3) pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan budi daya;
- 4) pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah di Kabupaten Kebumen; dan
- 5) kontribusi bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Kebumen dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Objek dari kegiatan kerja sama ini adalah lahan seluas kurang lebih 100 hektar yang terletak di Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Klirong di Kabupaten Kebumen. Salah satu bentuk capaian kerja sama ini yaitu terbangunnya tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Maret 2023.

c. Kerja sama antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan *The Departement of Health and Social Care of The United Kingdom of Great Britain and Northen Ireland* tentang Kemitraan *Flemming Fund* untuk Resistensi Antimikroba pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan di Indonesia

Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR) dengan pendekatan *One Health* merupakan langkah nyata Indonesia dalam mengatur penggunaan antimikroba secara bijak, sejalan dengan rencana aksi global AMR yang telah disepakati dunia. Rencana ini dirancang bersama oleh empat kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai bagian dari implementasi tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bekerja sama dengan *Department of Health and Social Care* (DHSC) Inggris dalam proyek "*The Fleming Fund Partnership for Antimicrobial Resistance Control on Aquaculture in Indonesia*". Proyek ini bertujuan memperkuat sistem pemantauan AMR dan penggunaan antimikroba (AMU) di sektor perikanan budi daya melalui pendekatan multisektoral.

Fleming Fund, yaitu program bantuan pemerintah Inggris, mendukung 25 negara di Afrika dan Asia dalam mengatasi AMR, termasuk Indonesia. Proyek di Indonesia berlangsung selama dua tahun (10 Maret 2020–31 Maret 2023) dengan total hibah sebesar £909.456. Kegiatannya mencakup perbaikan desain surveilans, renovasi, dan pengadaan peralatan laboratorium di Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang (BPKIL), peningkatan kapasitas teknisi laboratorium, ahli epidemiologi, dan analisis genomik, serta penguatan koordinasi antarsektor terkait AMR. Kerja sama ini secara langsung mendukung pencapaian target dalam Rencana Aksi Nasional AMR 2020–2024, khususnya di sektor perikanan budi daya.

1.2. Kegiatan Terobosan Tahun 2020 – 2024

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan terobosan dalam kurun waktu 2020-2024. Kegiatan terobosan tersebut secara langsung dapat diterima manfaatnya oleh pembudi daya dan diharapkan dapat mempunyai dampak dalam peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan budi daya.

1.2.1. Kampung Perikanan Budi Daya

Membangun kampung-kampung pembudidayaan ikan berbasis kearifan lokal dengan mengembangkan komoditas unggulan menjadi salah satu program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga 2024 dan merupakan salah satu implementasi kebijakan Ekonomi Biru Kelautan dan Perikanan. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 111 Tahun 2023 telah ditetapkan 210 kabupaten/kota sebagai lokasi Kampung Perikanan Budidaya. Mulai dari pengembangan sistem perbenihan yang fokus pada produksi varian komoditas unggul yang potensial dikembangkan dan menjamin sistem logistik benihnya secara efisien. Kemudian pengembangan sistem produksi yang fokus pada penciptaan efisiensi produksi, dan produktivitas budidaya serta memenuhi prinsip budidaya ikan yang baik. Upaya ini meliputi pengembangan inovasi teknologi yang aplikatif, efisien dan adaptif, pengembangan pakan mandiri yang efisien, dan penerapan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Selanjutnya penguatan kapasitas SDM para pelaku dan kelembagaan di sentra-sentra produksi, serta mendorong pengembangan sistem bisnis terintegrasi (*integrated aquaculture business*) di sentra produksi untuk menjamin efisiensi dan market.

Intervensi yang telah dilakukan pemerintah untuk mendukung pengembangan kampung perikanan budidaya diantaranya melalui bantuan pemerintah, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kelautan dan Perikanan, sinergi dengan instansi/lembaga termasuk lembaga pembiayaan usaha, serta mobilisasi penyuluh dan petugas dinas. Semangat dan produktivitas pembudi daya, dukungan *stakeholders*, serta sinergi program kegiatan pihak terkait sangat menentukan capaian perkembangan perikanan budi daya di kampung perikanan budi daya.

Untuk mengoptimalkan pembangunan perikanan budi daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri global di lokasi kampung perikanan budidaya ke depan, maka program dan kegiatan selanjutnya diarahkan pada mekanisasi dan otomatisasi, sistem budi daya terintegrasi dan multi usaha, serta pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia.

1.2.2. Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan

Program modeling budi daya rumput laut di tiga lokasi yaitu Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Maluku Tenggara dengan masing-masing seluas 50 hektar diarahkan pada sistem pengelolaan budidaya

rumput laut yang terintegrasi dan mengimplementasikan konsep ekonomi biru, sehingga akan mampu meningkatkan produksi maupun produktivitas untuk mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan usaha budidaya.

Potensi lahan untuk pengembangan budi daya rumput laut di lokasi tersebut masih sangat signifikan. Rote Ndao, dari 32.000 hektar area potensial, tingkat pemanfaatannya baru mencapai 6,9%; sedangkan di Wakatobi, pemanfaatan telah mencapai 70% dari total potensi area seluas 5.000 hektar. Program ini berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) yang meliputi penyediaan lahan untuk modelling, sarana, dan infrastruktur pendukung serta penyiapan industri hilirisasi rumput laut. Strategi modelling diciptakan untuk meningkatkan produksi sekaligus mengembangkan hilirisasi rumput laut di dalam negeri dengan menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama kegiatan budidaya di sektor hulu. Dalam implementasinya, modeling budi daya rumput laut Wakatobi telah menghasilkan sekitar 120 ton rumput laut basah.

1.2.3. Budi Daya Nila Salin Berbasis Kawasan

Pembangunan modeling budi daya ikan nila salin berbasis kawasan (80 hektar) ditujukan sebagai etalase atau contoh bagi pelaku usaha budi daya ikan nila salin dan investor dalam pengembangan budi daya ikan nila salin di Indonesia. Modeling budi daya ikan nila salin ini merupakan sistem budi daya ikan nila salin dalam satu kawasan, dengan satu pengelolaan yang terpadu yang mencakup berbagai aspek untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan dan ekosistemnya, serta memastikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Pembangunan dan penataannya dilaksanakan sesuai dengan konsep keberlanjutan, seperti pemisahan saluran *intake* dan outletnya, penyediaan tandon dan manajemen sistem pengairan yang terpadu.

Modeling ikan nila salin diharapkan dapat meningkatkan produktivitas budi daya menjadi sebesar 87 ton per hektar per siklus. Produktivitas tersebut jauh lebih tinggi dari produktivitas tambak nila salin tradisional yang hanya sekitar 0,6 ton per hektar per tahun. Produksi modeling budi daya ikan nila salin diharapkan dapat mencapai sekitar 7.020 ton per siklus atau senilai Rp 210,6 miliar dengan asumsi harga jual ikan nila salin Rp30.000 per kg.

1.2.4. Budi Daya Kepiting Berbasis Kawasan

Modeling budi daya Kepiting dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur di lahan seluas 30 hektar. Konsep pembangunan modeling budi daya kepiting adalah pembangunan kawasan budi daya kepiting yang terintegrasi, yang terdiri dari unit *hatchery*, *nursery*, pembesaran kepiting, budidaya pakan alami/kerang, dan pasca panen. Pembangunan Modeling budi daya kepiting ini dilaksanakan dengan menerapkan IPAL, saluran inlet, dan outlet terpisah dan pengaturan kotak pemeliharaan.

Modeling ikan nila salin diharapkan dapat meningkatkan produktivitas budi daya menjadi sebesar 14 ton per hektar per tahun. Produktivitas tersebut jauh lebih tinggi dari produktivitas budi daya kepiting tradisional yang hanya sekitar 500 kg per hektar per tahun. Dengan modeling budi daya kepiting ini diharapkan dapat menjadi contoh/diseminasi bagi para pembudi daya dan pelaku usaha, dalam rangka revitalisasi tambak yang kurang produktif untuk mendukung peningkatan ekonomi lokal dan mendukung peningkatan ekspor kepiting Indonesia.

1.2.5. Budi Daya Lobster Berbasis Kawasan

Pembangunan modeling budi daya lobster merupakan tindak lanjut implementasi terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.). Pembangunan modeling ini merupakan salah

satu strategi pemerintah untuk memperkuat peran Indonesia dalam pengelolaan lobster. Konsep pembangunan modeling budi daya lobster ini adalah mengintegrasikan kegiatan pendederan dan pembesaran lobster, serta lokasi budi daya kekerangan (kerang coklat) sebagai sumber pakan lobster dalam suatu kawasan. Selain itu di modeling ini menerapkan IPAL dan peningkatan teknologi budi daya lobster.

Modeling budi daya lobster dibangun di lokasi BPBL Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dimana Batam merupakan daerah sumber pakan yang sangat mendukung keberhasilan untuk budi daya lobster.

1.2.6. Major Project Revitalisasi Udang dan Bandeng

Program Revitalisasi Udang dan Bandeng merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan dan peningkatan ekspor. Dengan fokus pada peningkatan produktivitas, kualitas produk, dan keberlanjutan lingkungan, proyek ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan berbagai lembaga riset seperti BRIN.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembangunan dan revitalisasi kawasan tambak udang dan bandeng dengan capaian 42 klaster terdiri dari 9 klaster bandeng dan 33 klaster udang yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota.

Tabel 3. Capaian Revitalisasi Tambak Sentra Produksi Udang dan Bandeng Tahun 2020 - 2024

Uraian	Capaian (Klaster)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Revitalisasi Tambak Udang	5	2	16	8	2
Revitalisasi Tambak Bandeng	-	-	-	5	4
Jumlah	5	2	16	13	6

1.2.7. Milenial Shrimp Farming (MSF)

Program *Millenial Shrimp Farming* (MSF) atau Tambak Milenial merupakan salah satu terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendorong peningkatan produksi udang nasional sekaligus menarik minat generasi muda agar terlibat dalam pembangunan industri perikanan budi daya. Konsep ini menggabungkan pendekatan ramah lingkungan, efisiensi produksi, dan penerapan teknologi digital, sehingga menjamin keberlanjutan program hingga generasi mendatang.

Sebagai percontohan, instalasi MSF telah dibangun di dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yaitu di BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo. Tambak MSF di BBPBAP Jepara memanfaatkan teknologi *Oxy-Mix Fine Bubble* yang menghasilkan *nano* dan *micro bubbles* dari udara bebas maupun oksigen cair untuk menjaga kestabilan kadar oksigen. Sementara itu, di BPBAP Situbondo dikembangkan inovasi seperti *oxibam* dan sistem *hyper density* yang mampu meningkatkan padat tebar hingga 1.000 ekor/m³. Teknologi ini memungkinkan produktivitas mencapai 80–90 ton per hektar dalam masa pemeliharaan 60–70 hari.

Selain teknologi aerasi, MSF juga memanfaatkan digitalisasi melalui pencatatan data teknis secara real time, meliputi kualitas air, pakan, biomass, hingga pertumbuhan harian. Proses ini dapat dipantau dari ruang kontrol maupun melalui perangkat digital, sehingga efisiensi operasional meningkat dan risiko penyakit dapat diminimalkan. Integrasi teknologi dengan aplikasi *smart farming* semakin memudahkan petambak milenial dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Meskipun masih menghadapi tantangan seperti penurunan kualitas air baku dan ancaman penyakit, program MSF menunjukkan hasil yang menjanjikan. Konstruksi tambak yang fleksibel, produktivitas tinggi, serta keuntungan ekonomis yang lebih besar menjadi daya tarik utama. Keberhasilan tambak milenial di Jepara dan Situbondo dapat menjadi rujukan dan inspirasi bagi generasi muda untuk terjun ke sektor budi daya udang, seperti yang telah diterapkan di beberapa lokasi.

1.2.8. Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)

Kegiatan PITAP telah berjalan dengan efektif untuk mencapai tujuannya, sebagaimana Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan PITAP, yaitu untuk meningkatkan peran serta dan pendapatan masyarakat di lokasi PITAP serta merehabilitasi prasarana irigasi tambak. Hal ini dibuktikan dengan hasil kajian dampak PITAP di 4 (empat) kabupaten penerima bantuan PITAP tahun 2023 yang telah menyerap tenaga kerja di lokasi kegiatan sebanyak 84.618 orang dengan nilai upah yang dibayarkan sebesar Rp2.938.677.000. Selain berdampak langsung kepada pekerja harian, saluran tambak yang direhabilitasi dalam kegiatan PITAP berdampak pada peningkatan produksi dan juga pendapatan pada pembudi daya ikan di lokasi kegiatan PITAP.

Berdasarkan hasil kajian dampak pelaksanaan kegiatan PITAP, terdapat peningkatan produksi perikanan pada lokasi penerima manfaat seperti Kabupaten Bekasi (107,55%), Kabupaten Brebes (107,64%), Kabupaten Kendal (55,85 %) dan Kabupaten Karawang (32,69%).

Pendapatan pembudi daya ikan yang tergabung dalam Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA) pada lokasi kajian dampak pelaksanaan kegiatan PITAP tahun 2023 mengalami peningkatan pendapatan signifikan yaitu di Kabupaten Brebes dengan pendapatan sebesar 151,93%, Kabupaten Bekasi rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 99,20%, Kabupaten Kendal rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 54,83% dan diikuti oleh Kabupaten Karawang dengan rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 21,66%.

Luas lahan yang terairi pada lokasi kajian dampak pelaksanaan PITAP tahun 2023 mencapai 1.930 hektar. Meningkatnya luas lahan yang terairi tersebut, memberikan dampak positif dalam berbagai aspek, diantaranya aspek teknis, aspek sumber daya manusia, aspek finansial, dan aspek lokasi dan lingkungan.

Keberhasilan kegiatan PITAP merupakan wujud dari peran aktif POKLINA, kelembagaan yang mengelola jaringan irigasi yang ada. Oleh karenanya, diperlukan upaya penumbuh kembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan POKLINA agar menjadi wadah kelembagaan masyarakat yang kuat dalam pengelolaan saluran irigasi perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

1.2.9. Program Induk Udang Vaname Unggul Nusa Dewa

Program Induk Udang Vaname Unggul Nusa Dewa yang diluncurkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Oktober 2022 menjadi tonggak penting dalam upaya swasembada induk udang nasional. Program ini menunjukkan progres signifikan dengan capaian produktivitas tinggi melalui uji performa multilokasi. Induk udang vaname unggulan hasil pemuliaan ini memiliki kelebihan tumbuh lebih cepat, toleran penyakit, dan mampu bersaing dengan produk internasional. Target utamanya adalah menopang produksi udang nasional serta mengurangi ketergantungan impor. Pengembangan dilakukan melalui penyempurnaan sumber daya genetik, pembentukan *multiplication center*, serta pengujian di berbagai lokasi budi daya. BPIU2K Karangasem telah mendistribusikan 16.800 ekor induk Nusa Dewa pada 2024, dengan total distribusi 2022–2024 mencapai 42.548 ekor yang tersebar di sembilan provinsi. Selain itu, empat UPT DJPB yakni BPBP

Ujung Batee, BPBAP Takalar, BBPBAP Jepara, dan BPBAP Situbondo turut mendukung penyebaran induk unggul ini.

Varian Nusa Dewa telah dikembangkan menjadi lima *line*, yaitu: *Fast Growth* (pertumbuhan cepat), *Balance* (pertumbuhan seimbang dan tahan penyakit), Resisten WSSV, Toleran AHPND, serta *Plant Based Protein* (adaptif terhadap pakan berbasis nabati). Keunggulan ini menjawab kebutuhan pembudi daya sekaligus menekan biaya produksi. Selain Kementerian Kelautan dan Perikanan, 42 pelaku usaha swasta ikut mengembangkan Nusa Dewa di berbagai daerah, menandakan kepercayaan industri terhadap produk nasional. Dari sisi inovasi, Nusa Dewa dikembangkan dengan platform *molecular breeding* dan telah memperoleh HAKI untuk marka molekuler resisten WSSV, serta ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 181 Tahun 2023.

Lebih jauh, Nusa Dewa telah menyelesaikan *whole genome sequence* (WGS) sehingga menjamin keaslian genetik. Capaian ini menjadi bukti nyata upaya Indonesia menuju kemandirian dalam pemuliaan induk udang, serta penggerak utama kebangkitan industri perudangan nasional.

1.2.10. Pengembangan *Broodstock Center*

Broodstock Center adalah unit yang dikembangkan untuk menghasilkan induk unggul untuk menghasilkan benih bermutu. Kegiatan pengembangan induk unggul telah dikembangkan di beberapa UPT seperti BBPBAT Sukabumi, BBPBAP Jepara, dan BPIUUK Karangasem untuk pengembangan udang vanname.

Guna memenuhi kebutuhan induk ikan air tawar di Sumatera, Ditjen Perikanan Budi Daya membangun instalasi *Broodstock Center* di 3 lokasi yaitu Kabupaten Mesuji, Musi Rawas dan Dharmasraya.

1.3. Potensi Dan Permasalahan

1.3.1. Potensi

a. Wilayah Perairan yang Luas

Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang lebih dari 108.000 km dan luas laut mencapai 6,4 juta km². Wilayah daratannya yang kaya akan sungai, danau, waduk, serta persawahan memberikan peluang besar bagi pengembangan perikanan budi daya baik di air tawar, payau, maupun laut (KKP, 2024).

Berdasarkan data FAO (2023), Indonesia merupakan produsen perikanan budi daya terbesar kedua di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Produksi perikanan budi daya nasional pada tahun 2024 mencapai 24,85 juta ton, menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,65% per tahun selama periode 2020–2024. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budi daya global yang berada di kisaran 21% per tahun, menurut proyeksi FAO (2023).

b. Komoditas Unggulan yang Beragam

Komoditas perikanan budi daya di Indonesia sangat beragam, dengan kurang lebih 30 jenis ikan dan biota air lainnya yang dikembangkan secara komersial. Dari jumlah tersebut, 12 komoditas utama ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan perikanan budi daya, yaitu: Udang vaname (*Litopenaeus vannamei*), Kerapu (*Cromileptes altivelis*), Kakap Putih (*Lates calcarifer*), Bandeng (*Chanos chanos*), Patin (*Pangasius sp.*), Nila (*Oreochromis niloticus*), Ikan mas (*Cyprinus carpio*), Lele (*Clarias sp.*), Gurame (*Osphronemus gouramy*), Rumput laut (*Kappaphycus sp.*; *Eucheuma sp.*; *Gracilaria sp.*; *Sargassum sp.*), Kepiting bakau (*Scylla serrata*) dan Ikan hias (*Scleropages formosus*, *Betta sp.*, *Astronotus ocellatus*, dll.). Di samping 14 komoditas utama di atas Indonesia juga

mengembangkan komoditas ikan lokal endemik dan komoditas ikan lainnya yang memiliki potensi ekonomi.

c. Lahan Budi Daya Potensial yang Luas dan Beragam

Luas lahan potensial untuk pengembangan perikanan budi daya di Indonesia mencakup wilayah perairan darat, pesisir, dan laut lepas yang terdiri dari potensi budi daya air tawar seluas lebih dari 2,83 juta hektar, budi daya air payau seluas 2,88 juta hektar dan budi daya laut seluas 12,12 juta hektar.

Pemanfaatan lahan budi daya ikan air tawar mencapai 211.799 hektar atau baru termanfaatkan sebesar 7,48 persen yang digunakan untuk budi daya dengan wadah budi daya kolam tanah, kolam beton, karamba, jaring apung (KJA), keramba jaring tancap (KJT) di waduk, danau, dan sungai. Pemanfaatan budi daya air payau baru sekitar 0,84 juta hektar yang dimanfaatkan secara aktif atau sebesar 29,25 persen yang menggunakan tambak tradisional, tambak semi-intensif dan tambak intensif di kawasan pesisir. Pemanfaatan budi daya air laut baru sekitar 1,5 persen atau 181 ribu hektar yang meliputi keramba jaring apung (KJA) laut dan wadah budi daya laut lainnya. Perikanan budi daya berdasarkan data tersebut masih sangat berpeluang untuk dikembangkan lebih baik karena tingkat pemanfaatan lahannya baru mencapai 6,89 persen dari total potensinya sebesar 17,92 juta hektar.

d. Penguasaan Teknologi Perikanan Budi Daya

Teknologi budidaya ikan di Indonesia saat ini masih sangat beragam, mulai dari sistem tradisional hingga sistem super intensif. Perbedaan tingkat teknologi ini ditentukan oleh input produksi, padat modal, dan kompleksitas manajemen operasional. Sebagian besar pembudi daya masih menggunakan teknologi sederhana atau semi-intensif, sementara adopsi teknologi intensif dan super intensif masih terbatas pada skala usaha menengah dan besar. Kesenjangan adopsi ini mengindikasikan adanya potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui penguasaan teknologi yang lebih maju.

Pengembangan teknologi modern seperti *recirculating aquaculture system* (RAS), sistem bioflok, dan otomatisasi pemantauan kualitas air (suhu, oksigen terlarut, pH, salinitas, dan kekeruhan) berbasis digital telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan air, serta mengurangi dampak lingkungan. Teknologi ini juga mendukung praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sejalan dengan tuntutan pasar global yang semakin peduli terhadap aspek *traceability* dan *eco-labeling* produk akuakultur.

Penerapan teknologi budidaya modern bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan usaha terhadap perubahan iklim, penyakit, dan fluktuasi harga input produksi. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan teknis, insentif investasi, kemitraan dengan sektor swasta, serta ekosistem inovasi yang mendorong transfer teknologi ke tingkat usaha kecil dan menengah. Dengan penguatan penguasaan teknologi, sektor perikanan budi daya Indonesia dapat bertransformasi menuju industri yang lebih efisien, adaptif, dan kompetitif di pasar global.

e. Sumber Daya Manusia yang Memadai

Sumber daya manusia adalah kunci dalam seluruh proses produksi perikanan budi daya, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pascaproduksi. SDM yang terampil dan berkualitas dapat mendorong adopsi teknologi, meningkatkan produktivitas, dan keberlanjutan usaha perikanan budi daya.

Jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar merupakan usia produktif merupakan potensi dalam pengembangan perikanan budi daya.

Jumlah penduduk ini juga didukung dengan keberadaan berbagai institusi yang mendorong tersedianya tenaga kerja bidang perikanan budi daya yang ahli, terdidik, terlatih, dan terampil.

Besarnya jumlah penduduk usia produktif di Indonesia merupakan pendorong bagi pemerintah untuk lebih mengembangkan sektor perikanan budi daya yang dapat membuka lapangan kerja. Keterlibatan generasi muda dalam perikanan budi daya akan mempercepat transformasi perikanan budi daya lebih berbasis pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Transformasi ini akan merubah perspektif generasi muda terhadap sub sektor perikanan budi daya menjadi industri yang menguntungkan dan berkelanjutan.

f. Jumlah Penduduk yang Besar dan Strategis bagi Pasar Domestik

Pemenuhan kebutuhan protein ikan yang sebelumnya dipenuhi dari kegiatan perikanan tangkap akan bergeser pada perikanan budi daya. pergeseran ini terjadi disebabkan oleh berbagai permasalahan pada perikanan tangkap seperti isu lingkungan, penurunan sumber daya ikan, dan isu kedaulatan. Hal ini ditunjang dengan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Ditjen PDSPKP KKP menunjukkan bahwa tilapia atau ikan nila memiliki tingkat serapan tertinggi pada tahun 2024 mencapai 1.32 juta ton. Tingkat serapan berikutnya adalah lele (0,59 juta ton), dan bandeng (0,52 juta ton).

Pola konsumsi masyarakat terkonsentrasi pada jenis ikan yang lebih mudah ditemukan dan tersedia sepanjang waktu. Salah satu pilihan utama masyarakat untuk konsumsi protein harian adalah ikan budi daya seperti bandeng, nila dan lele.

g. Pasar Ekspor yang Terbuka dan Meningkatkan

Indonesia memiliki posisi strategis dalam pasar global perikanan budi daya, dengan produksi mencapai 6,37 juta ton pada tahun 2024 atau sekitar 6,7% dari total produksi akuakultur dunia. Komoditas unggulan seperti udang, nila, lele, dan bandeng berkontribusi besar terhadap volume produksi nasional, sementara rumput laut menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar kedua dunia, dengan produksi 10,81 juta ton atau 29,6% dari total produksi global.

Lima komoditas "*champion*" perikanan budi daya—udang, nila salin, kepiting, rumput laut, dan lobster—menunjukkan potensi ekonomi yang besar dengan total nilai pasar global mencapai lebih dari USD 109 miliar. Udang menempati posisi teratas dengan nilai pasar USD 64,8 miliar dan pangsa pasar Indonesia sebesar 6,1% pada 2023, menempatkan Indonesia sebagai eksportir udang kelima terbesar di dunia dengan nilai ekspor mencapai USD 1,73 miliar. Nila atau tilapia, meskipun sebagian besar untuk konsumsi domestik, mencatat nilai ekspor sebesar USD 81,77 juta dan terus meningkat. Sementara itu, rumput laut menegaskan kekuatan Indonesia sebagai eksportir kedua terbesar secara global dengan kontribusi signifikan terhadap pasar dunia.

Namun demikian, potensi besar ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa komoditas seperti lobster dan kepiting memiliki nilai pasar tinggi (masing-masing USD 8,7 miliar dan USD 12,47 miliar), tetapi pangsa pasar Indonesia masih terbatas. Untuk memperluas ekspor, dibutuhkan penguatan kualitas produk, sistem sertifikasi, efisiensi logistik rantai pasok, serta promosi pasar non-tradisional. Dengan strategi peningkatan daya saing dan keberlanjutan, sektor perikanan budi daya Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok akuakultur global.

1.3.2. Permasalahan

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan budi daya yang besar, masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat dan menjadi tantangan pertumbuhan sektor ini. Berdasarkan data terbaru hingga 2024, tantangan beserta dampak yang dihadapi, antara lain:

a. Ketersediaan dan Keterbatasan Distribusi Induk Unggul dan Benih Bermutu

Ketersediaan induk dan benih unggul masih menjadi tantangan utama dalam perikanan budi daya Indonesia. Produksi induk dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, khususnya untuk komoditas seperti udang vannamei yang masih bergantung pada impor. Upaya pemerintah membangun Broodstock Center belum sepenuhnya mampu mengurangi ketergantungan ini. Di sisi lain, akses terhadap benih berkualitas masih terbatas, terutama di daerah sentra produksi terpencil. Banyak pembudi daya masih menggunakan benih dari sumber yang tidak tersertifikasi, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kelangsungan hidup, pertumbuhan tidak seragam, dan meningkatnya risiko penyakit dan mortalitas.

Kualitas benih sangat bergantung pada kualitas induk. Tanpa induk yang sehat dan tersertifikasi, mustahil menghasilkan benih unggul secara konsisten. Benih bermutu penting untuk efisiensi usaha, mempercepat panen, mengurangi biaya pakan, dan menghasilkan produk budi daya yang memenuhi standar pasar.

Sebaliknya, penggunaan benih yang tidak bermutu menurunkan produktivitas, meningkatkan biaya produksi, dan menurunkan daya saing produk akuakultur nasional. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan induk, sertifikasi mutu, dan sistem distribusi benih menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan sektor ini.

Masalah utama bibit rumput laut di Indonesia adalah ketergantungan pada bibit hasil perbanyakan vegetatif; yaitu potongan tanaman yang diambil berulang kali dari induk yang sama. Praktik ini menyebabkan menurunnya kualitas genetik bibit dan membuatnya lebih rentan terhadap penyakit. Bibit yang lemah daya tahannya mudah terserang stres lingkungan, seperti perubahan suhu, salinitas, atau pencemaran. Meskipun teknologi modern seperti seleksi marka molekuler dan kultur jaringan sudah tersedia untuk menghasilkan bibit unggul, penerapannya di kalangan pembudi daya masih sangat terbatas karena minimnya pelatihan dan infrastruktur pendukung yang mendorong adopsi teknologi tersebut.

b. Tingginya Harga Pakan dan Pakan Berkualitas Rendah

Tingginya harga pakan menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan perikanan budi daya di Indonesia. Pakan menyumbang 60–70% dari total biaya produksi, dan mayoritas bahan bakunya masih bergantung pada impor seperti bungkil kedelai, tepung ikan, dan minyak nabati. Ketergantungan ini menyebabkan industri pakan sangat sensitif terhadap dinamika harga global. Kenaikan harga yang terus terjadi memaksa banyak pembudi daya skala kecil beralih ke pakan murah yang kualitas nutrisinya rendah.

Penggunaan pakan berkualitas rendah berdampak negatif terhadap performa produksi, antara lain pertumbuhan ikan yang lambat, konversi pakan yang buruk, dan tingginya residu pakan yang mencemari lingkungan perairan. Kombinasi antara harga pakan yang mahal dan harga jual hasil panen yang fluktuatif mengurangi margin keuntungan dan meningkatkan risiko usaha. Hal ini berdampak langsung terhadap rendahnya minat investasi, sulitnya akses pembiayaan, dan lemahnya daya saing produk budi daya di pasar ekspor yang mensyaratkan standar mutu tinggi.

Upaya pemerintah seperti menjembatani kepentingan antara produsen dan pembudi daya serta mendorong inovasi pakan alternatif telah dilakukan, namun belum cukup menyelesaikan masalah di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi terintegrasi untuk mengembangkan pakan lokal berkualitas, memperkuat rantai pasok domestik, dan menstabilkan harga pakan. Keberhasilan sektor perikanan budi daya sangat bergantung pada tersedianya pakan yang terjangkau, efisien, dan ramah lingkungan sebagai fondasi utama produktivitas dan keberlanjutan usaha.

c. Penyakit Ikan, Kualitas Lingkungan dan Perubahan Iklim

Penyakit ikan akibat virus, bakteri, jamur, dan parasit masih menjadi tantangan besar dalam perikanan budi daya di Indonesia. Serangan penyakit dapat menyebabkan kematian massal dalam waktu singkat, menimbulkan kerugian ekonomi, dan menurunkan produktivitas nasional. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya penerapan biosekuriti di lapangan, serta terbatasnya fasilitas tanggap darurat dan tenaga teknis di daerah. Upaya seperti vaksinasi, penggunaan probiotik, dan monitoring kesehatan belum dilakukan secara konsisten dan merata.

Permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan kualitas lingkungan perairan yang terus menurun. Minimnya implementasi regulasi lingkungan dan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah menyebabkan pencemaran air baku dan meningkatnya risiko kontaminasi pada produk budi daya. Selain itu, penggunaan pakan berlebih dan kepadatan tebar yang tinggi tanpa didukung pengolahan limbah melalui IPAL telah memicu akumulasi limbah organik dan eutrofikasi, yang memperburuk kondisi ekosistem perairan dan mempercepat penyebaran penyakit.

Dampak perubahan iklim juga memperberat tekanan terhadap sistem budi daya. Kenaikan suhu air, fluktuasi salinitas, serta pola hujan dan cuaca ekstrem meningkatkan stres fisiologis ikan dan menurunkan imunitasnya. Tanpa pengelolaan kualitas air yang ketat, sistem budidaya menjadi semakin rentan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola lingkungan melalui penerapan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), pembangunan dan penggunaan IPAL, serta pendekatan kawasan terpadu menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan, keberlanjutan, dan daya saing sektor perikanan budi daya.

d. Alih Fungsi Lahan dan Ketidakpastian Peruntukan Ruang Budi Daya

Perubahan peruntukan ruang dan lemahnya pengendalian tata guna lahan menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan kegiatan perikanan budi daya. Alih fungsi lahan dari zona budi daya menjadi zona lain seperti pariwisata, permukiman, industri, dan komersial telah menyebabkan berkurangnya ketersediaan ruang yang diperuntukkan secara khusus bagi kegiatan budi daya perikanan. Perubahan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya menghambat minat investasi dan kontinuitas usaha.

Ketidakpastian alokasi ruang ini diperparah oleh lemahnya penegakan regulasi pemanfaatan ruang serta kurangnya koordinasi antar sektor di tingkat daerah. Dalam banyak kasus, zona budi daya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah digeser atau dikurangi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha perikanan. Akibatnya, pelaku budi daya menghadapi risiko tumpang tindih dengan aktivitas sektor lain dan minimnya jaminan perlindungan ruang produksi.

Selain itu, perubahan peruntukan dan kegiatan non-perikanan di sekitar kawasan budi daya sering menimbulkan dampak lingkungan, seperti peningkatan cemaran dan degradasi kualitas air. Hal ini terjadi karena minimnya kontrol terhadap aktivitas eksternal yang berpotensi

mengganggu keseimbangan ekosistem budi daya. Tanpa kepastian ruang dan perlindungan terhadap kawasan produksi, keberlanjutan dan efisiensi sektor perikanan budi daya akan semakin terancam.

e. Keterbatasan Prasarana dan Sarana Pendukung Budi Daya

Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung merupakan faktor penting dalam menunjang produktivitas dan efisiensi usaha perikanan budi daya. Namun di banyak wilayah sentra produksi, masih dijumpai berbagai keterbatasan infrastruktur dasar seperti keterbatasan sumber air, saluran irigasi yang dangkal dan tidak terhubung dengan baik, jalan produksi yang rusak atau belum tersedia, serta akses terhadap listrik yang belum stabil atau bahkan belum terjangkau. Kondisi ini menghambat kelancaran distribusi input dan output budidaya, meningkatkan biaya operasional, serta menurunkan daya saing pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah.

Selain itu, sarana teknis budi daya seperti wadah budi daya (tambak, kolam, keramba), peralatan panen, sistem aerasi, dan instalasi pendukung lainnya sering belum memenuhi standar teknis yang layak. Banyak pembudi daya masih menggunakan peralatan konvensional yang tidak efisien, mudah rusak, dan tidak ramah lingkungan. Kurangnya standarisasi terhadap peralatan dan mesin budi daya juga menyebabkan variasi produktivitas yang tinggi antar pelaku usaha, serta menyulitkan dalam proses pelatihan, pendampingan, maupun pembiayaan berbasis teknologi.

Upaya modernisasi sarana prasarana budidaya juga masih menghadapi hambatan dalam aspek regulasi, pembiayaan, dan integrasi lintas sektor. Penerapan teknologi seperti sistem resirkulasi, efisiensi energi, dan pemantauan kualitas air berbasis sensor masih belum tersebar luas. Keterbatasan infrastruktur pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan budi daya juga menyebabkan peningkatan risiko pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan dan standarisasi prasarana-sarana budidaya secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendorong efisiensi usaha, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan transformasi sistem budi daya ke arah yang lebih produktif dan berkelanjutan.

f. Kelembagaan dan Akses Permodalan Terbatas

Kelembagaan usaha perikanan budi daya di Indonesia masih didominasi oleh pembudi daya skala kecil yang menjalankan usaha secara perorangan, tidak tergabung dalam kelembagaan formal yang kuat, dan belum memiliki struktur organisasi, sistem usaha, maupun jejaring pasar yang memadai. Posisi kelembagaan pembudi daya umumnya lemah, baik dari sisi representasi, daya tawar, maupun kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Hal ini menyebabkan skala usaha sulit ditingkatkan, kapasitas produksi tidak efisien, dan rentan terhadap risiko usaha, serta fluktuasi harga.

Kondisi tersebut diperparah oleh terbatasnya akses terhadap permodalan, terutama dari lembaga keuangan formal. Banyak pelaku usaha tidak memiliki agunan, legalitas usaha, atau kelayakan administrasi yang dipersyaratkan perbankan. Akibatnya, pengembangan usaha sangat bergantung pada bantuan pemerintah atau hibah jangka pendek yang tidak berkelanjutan. Ketergantungan ini memperkuat siklus stagnasi usaha dan memperlemah kemandirian pembudi daya, baik dari aspek keuangan, produksi, maupun kelembagaan.

Untuk memperkuat keberlanjutan usaha, diperlukan upaya peningkatan kapasitas teknis dan manajerial pelaku budi daya agar mampu mengelola usaha secara modern dan profesional. Penguatan kelembagaan dalam bentuk koperasi, kelompok usaha bersama, atau korporatisasi pembudi daya juga menjadi krusial untuk meningkatkan

efisiensi, akses pasar, dan kelayakan pembiayaan. Tanpa intervensi yang sistematis dan kolaboratif, transformasi sektor budi daya menuju sistem usaha yang berdaya saing akan sulit terwujud.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

2.1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2025-2029 sejalan dengan Visi Presiden serta Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai unit kerja yang berperan sentral dalam pembangunan subsektor perikanan budi daya, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendukung transformasi ekonomi biru melalui praktik budi daya yang efisien, adaptif terhadap perubahan iklim, dan inklusif bagi pelaku usaha skala kecil. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya turut mendorong peningkatan kapasitas produksi, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan penyediaan pangan akuatik berkualitas untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan mandat dan peran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menetapkan visi jangka menengah tahun 2025–2029 sebagai berikut:

“Perikanan Budi Daya yang Maju, Berkelanjutan, dan Tangguh untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat.”

Penjelasan elemen visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Maju: Mewakili transformasi sektor perikanan budi daya menuju sistem yang modern dan efisien, melalui peningkatan penggunaan teknologi, digitalisasi proses produksi, inovasi kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Berkelanjutan: Menunjukkan komitmen terhadap praktik budi daya yang menjaga keseimbangan ekologi, memperhatikan daya dukung lingkungan, dan menjamin keberlangsungan usaha dari sisi sosial maupun ekonomi.
- Tangguh: Menggambarkan ketahanan sektor budi daya dalam menghadapi dinamika global dan tantangan lokal, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga input, risiko penyakit ikan, dan gangguan rantai pasok. Visi ini mencerminkan daya adaptasi, resiliensi, dan stabilitas sistem budidaya secara menyeluruh.
- Ketahanan pangan dan kesejahteraan Masyarakat: Menjadi tujuan utama pembangunan, yaitu menjadikan subsektor perikanan budi daya sebagai sumber protein hewani yang aman dan bergizi serta sebagai pendorong ekonomi rakyat, khususnya di wilayah pesisir dan perdesaan.

2.2. Misi

Mengacu pada mandat tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana kebijakan teknis di bidang perikanan budi daya, serta dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan visi Presiden melalui Asta Cita 2025–2029, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berkomitmen melaksanakan misi pembangunan yang sejalan dengan Misi Asta Cita ke-2, 4, dan 5, yaitu:

1. Mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Mendukung Asta Cita ke-2 dan 5)
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas (Mendukung Asta Cita ke-4)

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menetapkan misi sektoral tahun 2025–2029 sebagai arah pelaksanaan program dan strategi pembangunan subsektor perikanan budi daya yang mencerminkan keberpihakan terhadap produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan pelaku utama. Misi ini menjadi landasan dalam perumusan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang terukur.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025–2029 adalah:

1. Meningkatkan produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan sebagai kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian pelaku utama perikanan budi daya.
3. Mengembangkan sistem usaha perikanan budi daya yang adaptif, efisien, dan berbasis teknologi.
4. Memperkuat tata kelola subsektor perikanan budi daya yang profesional, transparan, dan digital.

2.3. Tujuan

Sebagai penjabaran langsung dari misi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025–2029, ditetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan subsektor perikanan budi daya. Tujuan ini mendukung pencapaian visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, transformasi ekonomi biru, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025–2029:

1. Meningkatkan volume, efisiensi, dan kesinambungan produksi perikanan budi daya dalam rangka memperkuat penyediaan protein akuatik nasional secara berkelanjutan, berbasis kawasan produktif dan teknologi ramah lingkungan.
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya tahan usaha pembudi daya melalui penguatan kelembagaan, dukungan sarana produksi, akses pembiayaan, dan peningkatan kapasitas usaha berbasis potensi lokal.
3. Mengembangkan sistem usaha budidaya yang responsif terhadap tantangan iklim dan teknologi melalui penyediaan input produksi berkualitas, penerapan inovasi budidaya modern, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana berstandar.
4. Mewujudkan tata kelola subsektor perikanan budi daya yang akuntabel, efisien, dan berbasis data dengan memperkuat sistem perencanaan, pengawasan, digitalisasi layanan publik, dan kinerja Badan Layanan Umum sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

2.4. Sasaran Program

Sasaran program pembangunan perikanan budi daya merupakan kondisi yang diinginkan untuk dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai suatu hasil dan dampak (*outcome*) dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: SP1. Meningkatnya produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan; SP2. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi pembudidaya; dan SP3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan perikanan budi daya, dengan uraian sebagai berikut:

2.4.1. Sasaran Program pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah: meningkatnya produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan dengan indikator kinerja:

- a. Volume produksi rumput Laut dengan target 11,64 juta ton di 2025 dan 14,14 juta ton di 2029;

- b. Volume produksi ikan budi daya dengan target 6,75 Juta Ton di 2025 dan 8,52 Juta Ton di 2029; dan
- c. Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan (NTPi) dengan target 103,25 di 2025 dan 104,25 di tahun 2029.

2.4.2. Sasaran Program ke-dua (SP-2) yang akan dicapai adalah: meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi pembudi daya, dengan indikator kinerja: jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya dengan target 10 unit di 2026 dan 15 unit di 2029.

2.4.3. Sasaran Program ke-tiga (SP-3) yang akan dicapai adalah: tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan perikanan budi daya, dengan Indikator Kinerja: Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yaitu: 86 di tahun 2025 dan 88 di tahun 2029.

Sasaran Program di atas mendukung pencapaian dua Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni SS-2: Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan dan SS-5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas. Berdasarkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah disusun indikasi risiko yang menjadi dasar penguatan Manajemen Risiko lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyusunan indikasi risiko ini dilakukan melalui proses identifikasi untuk mengenali dan menentukan potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran strategis, sehingga langkah mitigasi dapat dirumuskan secara lebih terarah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 4. Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis KKP terkait Perikanan Budi Daya Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Strategis		Indikasi Risiko
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Peningkatan dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan wabah penyakit ikan
		2	Peningkatan harga input dan sarana produksi perikanan
		3	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap regulasi kelautan dan perikanan
		4	Belum optimalnya adopsi teknologi pada sektor kelautan dan perikanan
		5	Keterbatasan konektivitas dan infrastruktur dasar yang memadai di pesisir dan pulau-pulau kecil
		6	Perubahan kebijakan nasional atau daerah terkait tata ruang, rencana zonasi dan pemanfaatan ruang laut
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	1	Belum tuntasnya penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang mengakibatkan tidak proporsionalnya beban kerja dan ketidakjelasan alur koordinasi dan tanggung jawab
		2	Belum meratanya kesadaran dan komitmen ASN terhadap nilai integritas serta kesiapan dalam menghadapi perubahan sistem dalam transformasi tata kelola pemerintahan
		3	Belum tuntasnya penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang mengakibatkan tidak proporsionalnya beban kerja dan ketidakjelasan jalur koordinasi dan tanggung jawab

No	Sasaran Strategis		Indikasi Risiko
		4	Belum meratanya kesadaran dan komitmen ASN terhadap nilai integritas serta kesiapan dalam menghadapi perubahan sistem dan transformasi tata kelola pemerintahan
		5	Belum optimalnya tingkat implementasi budaya birokrasi berkAKHLAK

Sumber : Renstra KKP 2025 - 2029

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan KKP terkait pelaksanaan Prioritas Nasional yang merupakan Misi Asta Cita dari Presiden dan wakil Presiden. Strategi pembangunan perikanan budi daya sesuai dengan RPJMN 2025-2029 tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Prioritas Nasional Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas terkait Perikanan Budi Daya dalam RPJMN 2025-2029

No	Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1	PN 2-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada pangan	Pengembangan pangan akuatik (<i>Blue Food</i>)
		Pembangunan Rendah Karbon	Penurunan Emisi Karbon berbasis Lahan
		Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	1. Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru 2. Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern dan Berkelanjutan
2	PN-5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut

RPJMN 2025–2029 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 memuat Indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu proyek atau program strategis yang berdampak besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan, khususnya Program Prioritas Presiden seperti Terobosan (Terbaik) Cepat. PSN difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, berperan aktif dalam mendukung pencapaian PSN dengan menjalankan program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas, pemerataan pembangunan, dan daya saing sektor kelautan dan perikanan. Indikasi PSN yang telah ditetapkan melalui RPJMN 2025-2029 salah satunya adalah: Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Kawasan Pantura (Pantai Utara) Jawa yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana KKP dan swasta. Program ini bertujuan untuk memulihkan kawasan budi daya yang mengalami degradasi, meningkatkan produktivitas tambak melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, serta memberdayakan Pembudi daya melalui pendampingan, akses permodalan, dan penguatan klaster usaha. Selain itu proyek ini juga mendukung penyediaan protein ikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Indikasi PSN tersebut diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan

Kedelapan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Program Strategis Nasional (PSN) Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029

No	Daftar Program Strategis Nasional	Keterangan Program Strategis Nasional
1.	Program Revitalisasi Tambak Pantura di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
2.	Program Pengembangan Budi Daya udang Terintegrasi (<i>Integrated Shrimp Farming</i>) di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi biru yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam implementasinya ekonomi biru dijalankan secara terukur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan.

Kerangka pikir pembangunan ekonomi biru didasarkan pada empat aspek utama:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Sistem Utama Pembangunan Nasional, dimana sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi *engine growth* pertumbuhan ekonomi. Posisinya sebagai motor penggerak pembangunan nasional diharapkan mampu berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional, menggeliatkan ekonomi regional dan mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan lintas sektor.
2. Ekologi sebagai Panglima, dimana ekonomi biru memprioritaskan pada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Perlindungan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam memberikan ruang hidup bagi sumber daya di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan sumber pangan akuatik secara berkelanjutan.
3. Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*), dimana ekonomi biru merupakan solusi untuk menjawab tantangan pasar domestik dan global. Dengan peningkatan produk yang memiliki daya saing kompetitif dan komparatif sesuai dengan preferensi konsumen yang terus berubah secara dinamis. Sehingga diharapkan dapat menguatkan rantai pasok produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.
4. Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi untuk menjawab perubahan yang cepat dan dinamis pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial, peran teknologi, inovasi, dan digitalisasi menjadi kunci untuk akselerasi implementasi ekonomi biru. Dengan pengembangan inovasi teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akses informasi secara akurat, otomatisasi, *up to date*, dan *real-time*, serta mendorong nilai tambah pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Selain itu, ekonomi biru juga berlandaskan empat pendekatan pembangunan yaitu: (i) tematik, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah; (ii) holistik, dengan mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan; (iii) integratif, melalui sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan (iv) spasial, pembangunan berbasis ruang dan wilayah, untuk memastikan pemerataan, keterpaduan antar wilayah, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya. Empat

pendekatan ekonomi biru dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan pendekatan dan kerangka pikir ekonomi biru ditetapkan lima arah kebijakan strategis KKP, yaitu:

3.1.1. Memperluas Kawasan Konservasi Laut

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem pesisir, laut dan perairan umum, mencegah degradasi lingkungan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dampak positif dari kebijakan ini antara lain adalah terlindunginya habitat, menjaga struktur ekosistem, meningkatkan kemampuan penyerapan karbon, terlindunginya keanekaragaman hayati, dan meningkatkan potensi sumber daya ikan.

3.1.2. Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota

PIT merupakan penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona PIT, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak positif dari kebijakan ini adalah terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan yang legal, diatur, dan dilaporkan, menjaga stok sumber daya ikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.3. Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan

Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui praktik budi daya perikanan yang memperhatikan lingkungan dengan memastikan terjaganya keseimbangan ekosistem. Produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan menjadi peran kunci dalam penyediaan pangan akuatik selain perikanan tangkap. Hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi perikanan budi daya dalam negeri diprioritaskan pada 5 (lima) komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi yaitu udang, tilapia, rumput laut, kepiting, dan lobster.

3.1.4. Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir, mencegah aktivitas ilegal, kerusakan lingkungan, dan mendukung pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan agar pemanfaatan ruang laut berlangsung secara tertib, sesuai daya dukung lingkungan, serta mampu mencegah konflik kepentingan antarpemangku kepentingan. Selain melindungi ekosistem, kebijakan ini juga mendorong pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan.

3.1.5. Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan

Sampah plastik di laut menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem laut, sumber daya perikanan, dan kesehatan masyarakat pesisir. Sebagian besar sampah plastik berasal dari aliran sungai, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, pelabuhan, serta aktivitas di laut. Untuk mengatasi persoalan ini, KKP menginisiasi laut bebas sampah melalui gerakan partisipasi nelayan, yaitu pendekatan kolaboratif yang melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan dalam pembersihan laut. Kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk menjaga kebersihan laut, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah plastik.

Dari kelima arah kebijakan tersebut, kebijakan nomor 3 yaitu pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan merupakan fokus utama Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat peran perikanan budi daya sebagai lumbung pangan akuatik yang dapat memenuhi kebutuhan protein nasional secara berkelanjutan. Dengan mendorong adopsi teknologi modern ramah lingkungan, standarisasi proses produksi, dan penguatan klaster-klaster budidaya unggul. Kebijakan ini akan meningkatkan kapasitas produksi, nilai tambah produk, dan daya saing di pasar domestik serta internasional.

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Perikanan Budi Daya

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berperan sentral dalam mewujudkan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ketiga, yaitu “Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan”. Sebagai sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan, perikanan budi daya diarahkan menjadi tulang punggung penyediaan pangan bergizi masa depan (*blue food*) yang dapat diproduksi secara berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Pemerintah secara aktif mendorong ekspansi dan transformasi perikanan budi daya sebagai solusi strategis untuk meningkatkan produksi pangan akuatik, mengurangi tekanan terhadap stok ikan liar akibat *overfishing*, serta menciptakan lapangan kerja produktif di kawasan pesisir dan pedesaan. Dalam konteks ekonomi biru (*blue economy*), sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia protein hewani, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk menjalankan arah kebijakan pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, dilakukan strategi-strategi berikut:

3.2.1. Meningkatkan Produktivitas Perikanan Budi Daya Secara Berkelanjutan

Strategi untuk meningkatkan produktivitas perikanan budi daya secara berkelanjutan difokuskan pada komoditas ekspor unggulan seperti udang, rumput laut, lobster, kepiting, nila, dan komoditas ekspor penting lainnya, serta komoditas perikanan budi daya yang dikonsumsi masyarakat untuk mendukung program swasembada pangan antara lain dilakukan melalui:

- a. mengalokasikan kawasan pengembangan perikanan budi daya dalam dokumen tata ruang;
- b. melakukan revitalisasi kawasan perikanan budi daya sebagai model penerapan perikanan budi daya produktif dan berkelanjutan di Pantura Jawa dan kawasan sentra produksi lainnya;
- c. membangun kawasan budi daya terintegrasi khususnya di Indonesia Timur dan lokasi potensial lainnya sebagai pusat pertumbuhan baru bagi industri perikanan;
- d. membangun modeling kawasan produksi budi daya berbasis komoditas unggulan seperti udang, tilapia, rumput laut, kepiting, lobster, kakap putih, ikan hias, dan komoditas unggulan lainnya termasuk modeling penyediaan benih, penyediaan induk unggul, dan pakan mandiri;
- e. membangun dan merehabilitasi infrastruktur serta prasarana dan sarana perikanan budi daya berkelanjutan seperti saluran irigasi, jalan produksi, wadah budi daya serta peralatan dan mesin;
- f. meningkatkan layanan kesehatan ikan dan lingkungan yang didukung dengan peralatan dan sistem monitoring yang handal;
- g. mendorong kemandirian produksi pakan berbasis bahan baku lokal untuk menekan biaya produksi; dan

- h. mengoptimalkan produksi ikan hias untuk meningkatkan nilai tambah perikanan budi daya.

3.2.2. Meningkatkan Akses dan Adopsi Teknologi di Bidang Budi Daya Perikanan

Peningkatan adopsi teknologi dalam sektor perikanan budi daya menjadi kunci utama untuk mewujudkan sistem produksi yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk menjawab tantangan produktivitas, keterbatasan lahan dan air, serta tuntutan pasar global terhadap praktik budi daya yang ramah lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan terintegrasi yang mencakup penerapan teknologi budi daya, pengolahan pakan, dan sistem otomasi berbasis digital. Adapun strategi yang dapat ditempuh meliputi:

- a. pengembangan teknologi budi daya modern dan efisien, seperti: *Recirculating Aquaculture System* (RAS) untuk sistem tertutup yang hemat air dan lahan, Sistem bioflok untuk meningkatkan kepadatan tebar dan efisiensi pakan, Penguatan sarana dan prasarana pendukung teknologi tersebut di tingkat pembudi daya;
- b. peningkatan kemandirian pakan, dengan cara: mendorong adopsi teknologi pembuatan pakan skala kecil bagi pembudi daya, memproduksi pakan buatan berkualitas tinggi yang terjangkau dan sesuai kebutuhan nutrisi ikan, pengembangan formulasi pakan lokal yang berbasis bahan baku lokal; dan
- c. penerapan otomatisasi dan digitalisasi budi daya berbasis *Internet of Things* (IoT), antara lain: Penggunaan sensor digital untuk memantau suhu, oksigen terlarut, salinitas, pH, dan kekeruhan air secara *real-time*; sistem pengingat dan pengendalian otomatis untuk pemberian pakan dan aerasi, integrasi *dashboard* pemantauan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

3.2.3. Menciptakan Ekosistem Usaha Perikanan Budi Daya yang Adil dan Efisien

Strategi untuk menciptakan ekosistem usaha perikanan budi daya yang dapat meningkatkan nilai tukar pembudi daya dengan menjaga struktur biaya tetap efisien dan wajar antara lain dilakukan melalui:

- a. membangun kampung perikanan merah putih tematik komoditas perikanan budi daya sebagai sentra produksi pangan dan lumbung pangan desa yang disesuaikan dengan preferensi konsumsi ikan masyarakat lokal;
- b. meningkatkan perlindungan bagi pembudi daya ikan diantaranya melalui fasilitasi pra-sertifikasi lahan perikanan budi daya, peningkatan akses pelaku usaha untuk mendapatkan insentif pupuk, serta meningkatkan akses pembudi daya terhadap jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan nasional;
- c. meningkatkan kapasitas, kemitraan, dan kelembagaan pelaku usaha budi daya, termasuk pengembangan koperasi untuk memperkuat posisi tawar di setiap sentra produksi;
- d. memfasilitasi akses pembiayaan usaha pembudi daya dengan memanfaatkan teknologi digital;
- e. Penyediaan sarana dan/atau prasarana produksi sebagai stimulus usaha khususnya bagi pembudi daya ikan skala kecil;
- f. Pemberdayaan bagi pembudi daya ikan dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, pembinaan untuk penyiapan sertifikasi perikanan budi daya, serta peningkatan kapasitas dan kelembagaan pelaku usaha budi daya; dan
- g. meningkatkan kapasitas Badan Layanan Umum (BLU) dan kualitas dalam penyelenggaraan layanan teknis seperti penyediaan input produksi,

pengujian sampel laboratorium, penyediaan ikan konsumsi dan layanan teknis lainnya yang didukung dengan sistem informasi dalam rangka mewujudkan modernisasi BLU.

3.2.4. Penguatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, strategi arah kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya diarahkan tidak hanya pada peningkatan kinerja program kelautan dan perikanan, tetapi juga pada penguatan Reformasi Birokrasi sebagai fondasi utama pelaksanaannya. Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjadi instrumen strategis dalam memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan dapat terlaksana secara efisien, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Strategi untuk penguatan tata kelola reformasi lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dilakukan melalui:

- a. meningkatkan sinergi perencanaan strategis lintas sektor dan lintas unit organisasi termasuk penguatan perencanaan dan pelaksanaan di sub sektor perikanan budi daya, mendorong keterpaduan antara perencanaan program, penganggaran, dan pengukuran kinerja organisasi agar selaras dengan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan nasional, serta meningkatkan kolaborasi pendanaan inovatif non-APBN;
- b. mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran melalui perbaikan sistem pengendalian intern, serta optimalisasi pemanfaatan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib dan efisien;
- c. penguatan organisasi, tata kerja yang efektif dan efisien, penyederhanaan sistem kerja, dan penataan jabatan;
- d. meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, perjanjian nasional, serta produk hukum lainnya dan penyediaan informasi hukum yang responsif;
- e. meningkatkan komunikasi publik yang efektif, transparan, dan partisipatif, serta memperluas kerja sama internasional melalui diplomasi perikanan yang proaktif, sejalan dengan kepentingan nasional;
- f. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dukungan layanan internal meliputi urusan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, persuratan dan kearsipan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. mengembangkan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan strategis organisasi, serta mendorong partisipasi penyedia barang/jasa yang kompetitif dan berintegritas; meningkatkan pengelolaan data statistik dan informasi yang andal, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti untuk mendukung efisiensi layanan publik;
- h. menganalisis dan merumuskan rekomendasi strategis berdasarkan data dan fakta yang valid (*evidence-based policy*) serta melaksanakan integrasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mendiseminasikan rekomendasi kebijakan yang memberikan dampak dan manfaat di bidang perikanan budi daya; dan
- i. mengoptimalkan kinerja dan pendapatan BLU 2025-2029 melalui rasionalisasi target kinerja layanan teknis dan keuangan (pendapatan) pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) sesuai dengan dinamika kebijakan dan dukungan anggaran Rupiah Murni (RM).

Selain beberapa strategi utama di atas, kebijakan pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan akan

didukung oleh *enablers* atau pihak lain terkait yang dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain:

3.2.5. Penguatan Sistem Jaminan Mutu Perikanan Budi Daya

Strategi untuk penguatan sistem jaminan mutu produk perikanan budi daya antara lain dilakukan melalui:

- a. menjamin kualitas mutu produk perikanan budi daya yang memenuhi standar keamanan pangan (*Food Safety Standard*);
- b. meningkatkan keberterimaan produk perikanan budi daya di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan penanganan kasus mutu;
- c. menguatkan layanan pengujian mutu dan layanan inspeksi produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir; dan
- d. menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir.

3.2.6. Meningkatkan Ekspor, Konsumsi Dalam Negeri, Hilirisasi, Investasi, dan Logistik Perikanan Budi Daya

Strategi untuk meningkatkan investasi, hilirisasi, logistik, dan akses pasar perikanan budi daya berkelanjutan antara lain dilakukan melalui:

- a. meningkatkan ekspor komoditas perikanan budi daya bernilai ekonomis tinggi;
- b. secara aktif terlibat dalam upaya negosiasi tarif dagang produk perikanan budi daya termasuk mendorong diplomasi ekonomi dan penyelesaian sengketa dagang;
- c. mengatasi hambatan non-tarif produk perikanan budi daya melalui kerja sama, diplomasi perdagangan, dan pemenuhan persyaratan pasar;
- d. menurunkan tarif pada produk ekspor perikanan budi daya ekonomis tinggi melalui perjanjian kerja sama dengan negara mitra strategis;
- e. diversifikasi pasar dan perluasan perdagangan ekspor produk perikanan budi daya melalui kesepakatan perdagangan bilateral maupun multilateral;
- f. hilirisasi dan industrialisasi perikanan budi daya untuk meningkatkan nilai tambah berdasarkan prinsip nir-limbah serta penyediaan prasarana dan sarana;
- g. meningkatkan konsumsi ikan budi daya berbasis preferensi konsumsi lokal melalui edukasi dan kampanye gizi ikan kepada masyarakat, dan diversifikasi produk olahan termasuk penanganan *stunting* serta membangun model kuliner pangan berbasis ikan budi daya;
- h. meningkatkan akses pasar dalam negeri melalui modeling outlet pemasaran ikan dan pemasaran digital (*e-commerce* ikan segar/olahan);
- i. mengembangkan sentra atau pusat industri pengolahan ikan budi daya skala mikro kecil;
- j. memperkuat distribusi, ketersediaan, dan aksesibilitas produk perikanan budi daya melalui implementasi sistem logistik ikan nasional termasuk dukungan terhadap penyediaan menu ikan pada program MBG;
- k. meningkatkan investasi dalam negeri melalui fasilitasi perizinan dan kemudahan berusaha, penyiapan peluang informasi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor, promosi investasi, dan pendampingan realisasi investasi; dan
- l. meningkatkan kelas usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan melalui fasilitasi literasi keuangan, akses pembiayaan, kemitraan usaha, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

3.2.7. Penguatan Pengawasan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan

Strategi untuk penguatan pengawasan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan dilakukan melalui:

- a. meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan dan penegakan hukum serta menyelenggarakan kampanye digital melalui media sosial untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha perikanan budi daya;
- b. melibatkan masyarakat secara aktif dan memperkuat kapasitas Pokmaswas melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan sarana dalam pengawasan perikanan budi daya;
- c. mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang cepat tanggap, terintegrasi secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring), untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran perikanan budi daya secara efektif;
- d. menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan indikator skala usaha dan riwayat pelanggaran serta mendorong penerapan kepatuhan sukarela pada unit usaha budi daya ikan;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berbasis digital, citra *drone*, dan sistem digitalisasi untuk pemantauan kawasan budi daya, termasuk deteksi dini terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas ilegal;
- f. memperkuat intelijen pengawasan melalui pemanfaatan *open-source intelligence* (OSINT) dan *crowd data crawling* guna memperoleh informasi pelanggaran perikanan budi daya secara lebih komprehensif;
- g. melaksanakan pengawasan terpadu terhadap perizinan berusaha berbasis risiko pada kegiatan usaha perikanan budi daya air payau dan laut dengan melibatkan instansi terkait;
- h. memperkuat sistem ketertelusuran perikanan budi daya serta melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB);
- i. meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran di subsektor perikanan budi daya, dengan tetap mengedepankan prinsip *ultimum remedium*; dan
- j. meningkatkan kapasitas dan jumlah pengawas perikanan melalui rekrutmen, pendidikan, pelatihan, serta penguasaan teknologi guna memperkuat fungsi pengawasan perikanan budi daya.

Penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan, meningkatkan efisiensi pendanaan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Seluruh kebijakan pembangunan harus holistik, terintegrasi, serta selaras dengan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden 2025–2029, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, dan komitmen global Indonesia seperti WTO, UNCLOS 1982, serta ketentuan *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO).

Dalam perencanaan pembangunan, pengarusutamaan berperan penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya mengejar target sektoral, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas dan melindungi lingkungan. Melalui pendekatan ini, program pembangunan diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian ekosistem, sehingga hasil pembangunan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga mendukung keadilan antargenerasi dan ketahanan nasional menghadapi tantangan global.

Pengarusutamaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Renstra KKP 2025-2029, menggunakan 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan. Tujuan dari

pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas manfaat dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan pembangunan perikanan budi daya tahun 2025-2029 meliputi:

1) Gender dan Inklusi Sosial

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi untuk memasukkan pertimbangan gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dalam upaya mendukung pelaksanaan PUG, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pedoman ini dimaksudkan untuk membimbing setiap unit kerja dalam menyusun rencana pembangunan yang responsif gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Untuk mempercepat implementasi PUG di sektor ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, DJPB menerapkan sejumlah strategi, yaitu:

- a. penguatan tujuh prasyarat PUG, meliputi: komitmen pimpinan, kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, kelembagaan yang kuat, penyediaan sumber daya, data yang terpilah berdasarkan gender, penggunaan alat analisis gender, serta keterlibatan masyarakat secara inklusif;
- b. penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. pembuatan profil gender untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan gender di sektor perikanan budi daya;
- d. pemenuhan hak anak serta fasilitasi kelompok rentan dalam layanan sektor perikanan budi daya; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di bidang perikanan budi daya.

2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* terdiri atas 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Pelaksanaan TPB/SDGs memerlukan integrasi yang kuat antar berbagai dimensi pembangunan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga dimensi ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu dari lainnya. Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya akan memperkuat komitmen dalam mencapai target TPB/SDGs ke-14, yaitu Ekosistem Laut (*Life Below Water*), yang mencakup sejumlah isu strategis antara lain:

- a. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan pengendalian terhadap perubahan iklim;
- b. melestarikan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- c. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budi daya air, dan pariwisata berkelanjutan; dan
- d. menyediakan akses untuk pembudi daya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir.

3) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital bertujuan memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital. Strateginya mencakup penguatan ekosistem, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan big data. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendukung transformasi digital di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, upaya ini diwujudkan melalui layanan digital terintegrasi, penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM digital, kerja sama layanan digital, penerapan *one data* SPBE, perizinan online, serta penguatan usaha perikanan budi daya melalui *e-commerce*.

4) Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon di sektor perikanan budi daya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas produksi yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara produktivitas produksi dan daya lingkungan bagi generasi mendatang. Implementasi pembangunan rendah karbon pada kegiatan perikanan budi daya berupa serangkaian upaya untuk menurunkan potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari aktivitas perikanan budi daya.

Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kelautan dan perikanan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025, yang mencakup salah satunya penerapan NEK dalam kegiatan Pembudidayaan ikan. Pelaksanaan NEK di sektor perikanan budi daya difokuskan pada praktik budi daya ikan ramah lingkungan, efisiensi energi dan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), inovasi teknologi rendah emisi melalui efisiensi pakan dan pengelolaan air buangan, serta pengelolaan karbon biru (seperti ekosistem mangrove dan lamun yang terkait dengan kawasan budi daya). Upaya ini juga mencakup pengolahan dan pemasaran hasil budi daya berkelanjutan.

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, pelaku usaha budi daya, lembaga riset, dan masyarakat didorong melalui adopsi teknologi ramah lingkungan, penerapan praktik budi daya berkelanjutan, serta pembiayaan usaha dan investasi hijau. Dengan demikian, perikanan budi daya tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga kesehatan ekosistem darat dan pesisir.

5) Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim menjadi strategi penting dalam sub sektor perikanan budi daya untuk mengurangi ancaman dari dampak perubahan iklim. Secara umum potensi dampak perubahan iklim terhadap perikanan budi daya adalah ancaman penurunan produktivitas dan pendapatan. Selain itu, perubahan iklim dalam jangka panjang berdampak langsung pada kerusakan tambak dan fasilitas budi daya akibat banjir, abrasi, atau kenaikan muka air laut, fluktuasi suhu dan salinitas air yang mengganggu pertumbuhan ikan, asidifikasi, perubahan cuaca yang berakibat pada perubahan siklus budi daya serta meningkatnya risiko serangan penyakit ikan yang sensitif terhadap perubahan iklim.

Untuk mengatasi hal tersebut, penerapan pembangunan berketahanan iklim di sektor perikanan budi daya mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penguatan infrastruktur perikanan budi daya yang tahan iklim, adopsi teknologi budi daya ramah iklim (seperti resirkulasi dan tambak berkelanjutan), perbaikan tata kelola dan akses pendanaan iklim, serta peningkatan

kapasitas pembudi daya dan instansi terkait dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan pendekatan ini, sektor perikanan budi daya diharapkan mampu bertahan, beradaptasi, sekaligus tetap produktif di tengah tantangan perubahan iklim.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam mencapai tujuan bernegara. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendorong harmonisasi regulasi, yakni menghilangkan tumpang tindih peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya antar kementerian/Lembaga, maupun dengan peraturan di tingkat daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merupakan implementasi *omnibus law*.

Pada periode 2025-2029 kerangka regulasi yang berkaitan dengan perikanan budi daya yang akan disusun/direvisi sebagaimana terdapat pada Lampiran 4.

3.4. Kerangka Kelembagaan

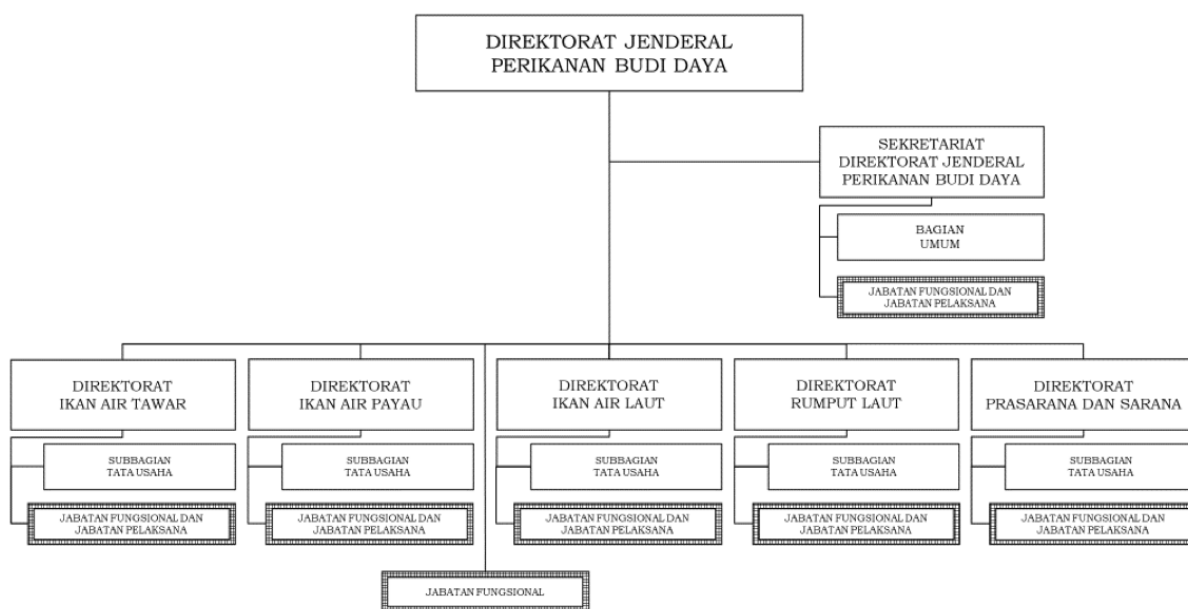
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat organisasi dan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan Pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana Pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan Pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan

- pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Direktorat Teknis serta 15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis (3 satker BLU dan 12 satker PNBP) yang tersebar di wilayah Republik Indonesia dengan gambaran struktur Organisasi sebagaimana berikut:



Gambar 3. Bagan Susunan Organisasi Ditjen Perikanan Budi Daya.

Mempertimbangkan perkembangan dinamika organisasi dan beban kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta kondisi geografis terkait dengan rentang kendali UPT Perikanan Budi Daya, maka pada tahun 2025-2029 diperlukan rasionalisasi penataan organisasi UPT Perikanan Budi Daya melalui peningkatan eselonering dan penyesuaian tugas fungsi UPT eksisting serta pembentukan beberapa UPT baru di lokasi potensial di Indonesia.

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, pengelolaan sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat krusial. SDM yang berkualitas dan tersedia dalam jumlah yang memadai merupakan pondasi utama dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan yang telah dirumuskan. Secara kualitas, pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya harus memiliki kompetensi yang relevan dengan *core business* perikanan budi daya. Namun tidak hanya kompetensi teknis saja yang dibutuhkan, tetapi dibutuhkan pula diantaranya kemampuan manajerial, kepemimpinan, digitalisasi dan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional maupun dinamika global yang saat ini telah menjadi suatu keharusan di tengah tuntutan digitalisasi layanan publik dan penguatan tata kelola berbasis data. Sementara itu, dari sisi kuantitas, kebutuhan pegawai juga harus disesuaikan dengan beban kerja dan kompleksitas tugas-tugas di unit kerja. Oleh karena itu, perencanaan SDM berbasis data (analisis jabatan, analisis

beban kerja, peta jabatan) menjadi kunci untuk memastikan distribusi pegawai yang efektif.

Selama ini, pengelolaan SDM di sektor publik sering kali berfokus pada aspek administratif, seperti pengangkatan, penempatan, dan penggajian. Namun, untuk menjawab tantangan zaman dan mendorong efektivitas birokrasi, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya perlu bertransformasi ke arah pendekatan *human capital-based management* yang menekankan pada optimalisasi potensi individu sebagai aset organisasi. Sebagaimana investasi dalam infrastruktur fisik, investasi dalam pengembangan modal manusia juga memiliki dampak jangka panjang. Selain itu, membangun *organizational learning culture* menjadi bagian penting dari pengembangan *human capital*. Organisasi yang terus belajar adalah organisasi yang mampu bertahan, berinovasi, dan berkembang dalam situasi apapun.

Pengelolaan SDM berbasis *human capital* merupakan investasi strategis yang harus dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Fokus pengelolaan tidak hanya terbatas pada jumlah pegawai yang dibutuhkan, tetapi juga pada kualitas kompetensi yang mereka miliki, nilai tambah yang diberikan bagi organisasi, serta kemampuan untuk berkembang sesuai tantangan zaman. Dengan pendekatan ini, SDM Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan besar kementerian, sekaligus memperkuat posisi sektor kelautan dan perikanan di tingkat nasional maupun global.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, diperlukan SDM aparatur memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja guna pencapaian target kinerja organisasi. Saat ini Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya didukung dengan jumlah SDM aparatur sebanyak 1.250 pegawai (data per 1 September 2025), yang terdiri atas 1.065 PNS dan 154 PPPK, dengan sebaran Tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 7. Sebaran Tingkat Pendidikan ASN DJPB Per September 2025

Tingkat Pendidikan	S3	S2	S1/D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD
Jumlah (orang)	8	223	528	156	2	309	10	14

Berdasarkan tabel tersebut, sebanyak 759 orang atau 60,72% pegawai telah memiliki Pendidikan minimal sarjana, sehingga dapat dikategorikan dalam jenjang keahlian. Sebanyak 491 orang atau 39,28% pegawai memiliki Pendidikan SD sampai D3 dikategorikan pada jenis jabatan keterampilan. Pada tahun 2025, terdapat tambahan pegawai sebanyak 574 orang sehingga total ASN Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya bertambah menjadi 1.639 orang.

Penambahan jumlah ASN tersebut masih jauh dibandingkan kebutuhan SDM aparatur berdasarkan hasil analisis beban kerja yang telah dilakukan. Berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan, terdapat kebutuhan SDM aparatur sebanyak 4.309 formasi dalam berbagai jabatan untuk lima tahun ke depan. Sehingga terdapat kekurangan sebanyak 1.400 orang pegawai.

Beberapa tantangan dalam tata kelola SDM aparatur antara lain: implementasi manajemen talenta untuk rencana suksesi jabatan kritikal yang belum optimal, karena masih terbatas pada tahap identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta sehingga belum menghasilkan penetapan Kelompok Rencana Suksesi dan penempatan talenta yang efektif, GAP kompetensi pada HCDP belum terpetakan secara akurat akibat pemetaan talenta yang belum menyeluruh, sehingga pengukurannya masih mengandalkan penilaian subjektif atasan dan rekan kerja yang berpotensi bias, berdampak pada belum

teridentifikasinya kebutuhan pengembangan kompetensi secara tepat, pengembangan kompetensi melalui tugas belajar juga belum optimal karena terbatasnya informasi dan literasi mengenai jenis pendidikan yang selaras dengan kebutuhan organisasi; serta belum dilakukannya identifikasi sertifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan kritis, padahal kebijakan manajemen karier ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan mensyaratkan sertifikasi keahlian tertentu untuk menduduki jabatan tersebut.

Untuk menjawab tantangan tata kelola SDM seperti implementasi manajemen talenta yang belum optimal, kesenjangan (gap) kompetensi yang belum terpetakan secara akurat, serta keterbatasan dalam pengembangan kapasitas dan sertifikasi pemenuhan kebutuhan SDM periode 2025–2029 dirancang secara sistematis berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK), proyeksi peningkatan volume kerja, pembentukan unit kerja baru, bezetting, dan dinamika mutasi pegawai. Strategi ini mencakup tiga pendekatan utama:

- 1. Rekrutmen ASN melalui CPNS dan PPPK
 - a. CPNS: Diutamakan untuk memenuhi jabatan fungsional pendukung program prioritas DJPB, regenerasi akibat purna tugas dan mutasi, serta disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan ketersediaan anggaran.
 - b. PPPK: Fokus pada penyelesaian status tenaga non-ASN sesuai amanat peraturan (termasuk PPPK paruh waktu), pengembangan karier PPPK eksisting, serta perekrutan tenaga profesional non-PNS untuk memperkuat pelaksanaan program strategis.
- 2. Mobilitas Talenta

Memanfaatkan skema mutasi antar instansi atau antar unit kerja sebagai respons cepat terhadap kebutuhan SDM di jabatan kritis, dengan dasar penilaian kompetensi yang objektif dan selaras dengan profil jabatan.
- 3. Penyesuaian dengan Kebutuhan Organisasi

Seluruh skema pemenuhan SDM dikaitkan erat dengan peta kompetensi, rencana suksesi, dan identifikasi sertifikasi jabatan kritis, sehingga tidak hanya menutup kebutuhan kuantitas, tetapi juga meningkatkan kualitas dan kesiapan SDM dalam mendukung transformasi organisasi jangka menengah.

Pemenuhan kebutuhan ASN melalui pengadaan ASN dengan fokus jabatan core bisnis organisasi, dan mobilitas talenta melalui mutasi masuk dari instansi lain sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Rencana Pemenuhan ASN 2025 - 2029 melalui mekanisme Pengadaan ASN dan Mutasi dari Instansi Lain

Pengangkatan Pertama*)										Mutasi dari instansi lain*)				
CPNS					PPPK									
2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
31	45	45	39	35	543	254	39	137	289	5	10	10	10	10

*) rencana bersifat sementara, implementasi menyesuaikan kebijakan nasional pengadaan ASN

Strategi optimalisasi manajemen talenta dimulai dengan menyelesaikan proses identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta secara menyeluruh. Langkah ini penting agar dapat ditetapkan kelompok rencana suksesi dan dilakukan penempatan talenta secara tepat. Pemetaan talenta yang lengkap juga menjadi dasar untuk mengukur kesenjangan (gap) kompetensi pada HCDP pegawai menggunakan metode yang objektif, sehingga jenis pengembangan kompetensi yang dibutuhkan baik secara individu maupun organisasi dapat ditentukan dengan akurat.

Selain itu, identifikasi sertifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan kritis menjadi fokus utama dalam tata kelola SDM aparatur. Hal ini sejalan dengan kebijakan manajemen karier ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan yang

-

mensyaratkan sertifikasi keahlian tertentu untuk menduduki jabatan kritis. Upaya ini mencakup penetapan kompetensi inti tiap jabatan kritis serta identifikasi sertifikasi dan pelatihan teknis yang relevan guna mendukung pelaksanaan tugas secara efektif.

BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik dan mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*Outcome*) dari suatu program. Rumusan program mengacu pada konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang disusun berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Pendekatan program tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I, tapi lebih mencerminkan tugas fungsi kementerian/Lembaga. Program dapat bersifat lintas unit Eselon I dalam satu K/L atau bersifat lintas K/L.

Terdapat dua program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yaitu:

- a. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan; dan
- b. Program Dukungan Manajemen.

Adapun indikator kinerja masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Indikator Kinerja Program Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 - 2029

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Meningkatnya produksi perikanan budi daya					
	Produksi perikanan budi daya (ikan)	6,75	7,15	7,58	8,04	8,52
	Produksi perikanan budi daya (rumput laut)	11,64	12,22	12,83	13,47	14,14
2.	Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi)	103.25	103.5	103.75	104	104.25
3.	Korporasi Perikanan Budi Daya	-	10	10	13	15
Program Dukungan Manajemen						
1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Persen)	85	86	87	88	89
2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Persen)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Persen)	81	82	83	84	85
4.	Nilai Pembangunan Integritas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	76	77	78	79	80
5.	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Jenderal	84,00	84,20	84,40	84,60	84,80

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Perikanan Budi Daya (Nilai)					
6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	92,00	92,10	92,15	92,20	92,20
7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50
8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
9.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Indeks)	81	87,50	88	88,50	89
10.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (persen)	96	97	98	99	100
11.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100	100	100	100	100
12.	Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	80	81	82	83	84
13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Persen)	76	77	78	79	80
14.	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Persen)	65	85	85	85	85
15.	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	77	78	79	80	81

Adapun target produksi perikanan budi daya berdasarkan komoditas utama adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Target Produksi Perikanan Budi Daya berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2025 – 2029

No.	KOMODITAS	TAHUN					LAJU KENAIKAN (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	
TOTAL		18 393 000	19 380 000	20 420 000	21 517 000	22 665 000	5,36
1	Udang	1.258.000	1.356.000	1.459.000	1.570.000	1.689.000	7,64
2	Rumput Laut	11.640.000	12.222.000	12.833.000	13.475.000	14.140.000	4,98
3	Bandeng	946.000	993.000	1.044.000	1.098.000	1.154.000	5,09
4	Kerapu	20.000	21.000	23.000	24.000	24.000	4,72
5	Kakap	12.000	12.000	13.000	15.000	16.000	7,60
6	Kekerangan	44.000	46.000	47.000	48.000	50.000	3,25
7	Ikan Mas	614.000	650.000	688.000	727.000	769.000	5,79
8	Nila	1.555.000	1.660.000	1.776.000	1.894.000	2.019.000	6,75
9	Lele	1.271.000	1.354.000	1.445.000	1.541.000	1.640.000	6,58
10	Patin	355.000	362.000	370.000	379.000	387.000	2,18
11	Gurame	211.000	223.000	235.000	247.000	261.000	5,46
12	Kepiting	22.000	23.000	25.000	26.000	27.000	5,27
13	Lobster	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	8,78
14	Lainnya	444.000	456.900	460.800	471.700	487.600	2,37
Ikan		5.495.000	5.802.000	6.128.000	6.472.000	6.836.000	5,61
Rumput Laut		11.640.000	12.222.000	12.833.000	13.475.000	14.140.000	4,98
Udang		1.258.000	1.356.000	1.459.000	1.570.000	1.689.000	7,64

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan perikanan budi daya 2025–2029 serta mencapai sasaran utama, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai, berkelanjutan, dan dikelola secara transparan serta akuntabel. Sumber pendanaan berasal dari berbagai pihak, meliputi APBN, APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), sektor swasta, lembaga perbankan dan non-perbankan, serta masyarakat dan dunia usaha melalui kemitraan dan investasi. Jenis sumber anggaran yang digunakan mencakup Rupiah Murni (RM), PNBP, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), Pinjaman Luar Negeri, Hibah, Rupiah Murni Pendamping (RMP), dan sumber lain seperti dana CSR, dana desa, atau dana kolaboratif yang sesuai ketentuan.

Target pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) 2025-2029 perlu memperhatikan evaluasi capaian kinerja layanan teknis dan keuangan 2023-2024. Untuk itu Rencana Strategi Bisnis (RSB) BLU perlu dirasionalkan sesuai dengan dinamika kebijakan dan ketersediaan dukungan anggaran Rupiah Murni (RM).

Prinsip yang diacu adalah bahwa penggunaan dana yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya harus fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan nilai nyata bagi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budi daya. Dengan pendekatan ini, pendanaan tidak hanya mendukung pertumbuhan sektor, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kemajuan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah pesisir dan pedesaan.

Adapun kerangka pendanaan pembangunan perikanan budi daya menurut program dan kegiatan Prioritas Nasional (PN) yang bersumber dari APBN sebagaimana disajikan di lampiran II.

BAB V PENUTUP

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan, berdaya saing, dan inklusif guna mendukung ketahanan pangan nasional dan global, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi biru. Melalui Rencana Strategis Tahun 2025–2029, pembangunan sektor ini akan dijalankan dengan pendekatan strategis berbasis keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini didukung oleh kebijakan yang kondusif, regulasi yang adaptif, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, sehingga mampu mengakselerasi transformasi sektor perikanan budi daya menjadi pilar utama pembangunan nasional.

Untuk memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya akan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029. Evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan untuk ; (i)menilai kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan, (ii)mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja program dan kegiatan, (iii)menelaah penerapan manajemen risiko pembangunan nasional; dan (iv)menilai penerapan pembiayaan inovatif pemerintah dan pembiayaan non-pemerintah.

Dengan demikian pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi instrumen yang tidak hanya mengarahkan kebijakan dan program, tetapi juga memastikan bahwa capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dalam lima tahun ke depan terukur, akuntabel dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,
Ttd.
TB.HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



Tinggal Hermawan

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR 473 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
BUDI DAYA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2025-2029

NO	
1.	Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan Per Program, Per Kegiatan, dan Per Output Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029
2.	Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/PSN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029
3.	Kerangka Regulasi Pembangunan Perikanan Budi Daya Tahun 2025-2029

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,
Ttd.
TB.HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



Tinggal Hermawan

1. MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN PER PROGRAM, PER KEGIATAN DAN PER OUTPUT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN 2025 – 2029

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KO DE	URAIAN	INDIKATOR	SATU AN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								1.052.839,7	4.374.449	8.192.980	6.989.900	2.334.347
	Program Dukungan Manajemen								356.225,1	357.902	527.427	532.876	541.895
	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan perikanan budi daya	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	86,0	86,5	87,0	87,5	88,0					
2348	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya								356.225,1	357.902	527.427	532.876	541.895
SK	01-Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya												
ISK 1		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	Persen	85	86,00	87,00	88,00	89,00					
ISK 2		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	Persen	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5					
ISK 3		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	Persen	81	82,00	83,00	84,00	85,00					
ISK 4		Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	76	77,00	78,00	79,00	80,00					
ISK 5		Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	84	84,20	84,40	84,60	84,80					
ISK 6		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	92	92,10	92,15	92,20	92,20					
ISK 7		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	81,5	81,75	82,00	82,25	82,50					
ISK 8		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9					
ISK 9		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	Indeks	81	81,50	82,00	82,50	83,00					
ISK 10		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya (persen)	Persen	96	92,00	98,00	99,00	100,00					
ISK 11		Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00					
ISK 12		Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	80	81,00	82,00	83,00	84,00					
ISK 13		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan	Persen	76	77,00	78,00	79,00	80,00					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Budi Daya (Persen)											
ISK 14		Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	Persen	65	66,00	85,00	85,00	85,00					
ISK 15		Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	Nilai	77	78,00	79,00	80,00	81,00					
CAN	Sarana Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi			53		15	15	15					
001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	53		15	15	15					
051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		unit	53		15	15	15					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan	1.647	1.582	1.990	1.990	1.990					
956	Layanan BMN	Jumlah Layanan BMN	Layanan	5									
Z06	Layanan BMN	Jumlah Layanan BMN	Layanan		1	1	1	1					
957	Layanan Hukum	Jumlah Layanan Hukum	Layanan	1									
958	Layanan Hubungan Masyarakat	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	20									
Z02	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan		1	1	1	1					
Z03	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	Layanan		15	15	15	15					
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Jumlah Layanan Manajemen Organisasi	Layanan	1									
962	Layanan Umum	Jumlah Layanan Umum	Layanan	16	16	16	16	16					
963	Layanan Data dan Informasi	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	39	6	6	6	6					
994	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan										
001	Gaji dan Tunjangan Pegawai satker lingkup DJPB		Orang	1.549	1.527	1.935	1.935	1.935					
002	Operasional Kantor dan Pemeliharaan di satker lingkup DJPB		Satker	16	16	16	16	16					
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit	1	1	1	1	1					
951	Layanan Sarana Internal	Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1					
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang	1.607	1.527	1.935	1.935	1.935					
954	Layanan Manajemen SDM	Jumlah Layanan Manajemen SDM	Orang	1.607									
Z11	Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil	Jumlah Layanan Manajemen SDM	Orang		1.527	1.935	1.935	1.935					
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen	178	158	158	158	158					
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Layanan Perencanaan dan Anggaran	Layanan	58									
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	66									
Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan		17	17	17	17					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	Layanan		141	141	141	141					
955	Layanan Manajemen Keuangan	Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	54									
Z26	Layanan Manajemen Keuangan	Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Layanan		12	13	13	14					
Z27	Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	Jumlah Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	Layanan		12	13	13	14					
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	16		16	16	16					
AEC	Kerja Sama		Dokumen	3	3	3	3	3					
001	Kerja Sama bidang perikanan budi daya	Jumlah Kerja Sama bidang perikanan budi daya	Dokumen	3	3	3	3	3					
AEA	Koordinasi		Dokumen		2	2	2	2					
001	Koordinasi Pengelolaan Manajerial	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Manajerial	Dokumen		2	2	2	2					
	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan								696.614,5	4.016.547	7.665.553	6.457.024	1.792.452
SP1	Meningkatnya produksi perikanan budi daya	Volume Produksi Ikan Budi Daya (Juta Ton)	Juta Ton	18	19	20	22	23					
ISP1		01. Volume Produksi Ikan	Juta Ton	7	7	8	8	9					
ISP2		02. Volume Produksi Rumput Laut	Juta Ton	12	12	13	13	14					
ISP3		03. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai	103	104	104	104	104					
SP2	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi Pembudidaya (DJPB)												
		01.Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya	Unit		10	10	13	15					
7021	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut								22.989,0	30.140	168.800	43.875	119.600
SK	Terkelolanya Sistem Budi Daya Rumput Laut												
ISK1		Jumlah Sarana/Kawasan budi daya rumput laut yang dikembangkan dan disalurkan ke masyarakat	Unit	171	201	310	311	704					
ISK2		Jumlah Kawasan budi daya rumput laut yang dibangun dan direvitalisasi	Unit		1	11	6	6					
ISK3		Jumlah Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat	Unit	37.500	62.231	60.000	60.000	80.000					
ISK4		Jumlah Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina penerapan Sertifikasi	Unit	14	20	200	300	400					
ISK5		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut yang disusun	Rekomendasi kebijakan	6	10	10	10	10					
ISK6		Jumlah Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut yang dikembangkan	Unit		6	6	6	6					
BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga												
001	Unit Budi Daya yang dibina penerapan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	01-Jumlah Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Lemba ga	14									
QAB	Pelayanan Publik kepada				20	200	300	400					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	lembaga												
002	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya rumput laut	01-Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya rumput laut	Lemba ga		20	200	300	400					
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			6	-	-	-	-					
001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Rumput Laut	Rekom endasi Kebijak an	6									
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			-	3	10	10	10					
001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Rumput Laut	Rekom endasi Kebijak an		3	10	10	10					
QED	Bantuan Tanaman			37.500	62.231	60.000	60.000	80.000					
001	Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	Unit	37.500	62.231	60.000	60.000	80.000					
QEG	Bantuan Peralatan / Sarana			171	201	310	311	704					
001	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	Unit	170	200	300	310	700					
002	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas	01-Jumlah Infrastruktur Kawasan Budidaya Rumput Laut yang dibangun	Unit	1	1	1	1						
003	Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun bagi masyarakat	01-Jumlah Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun bagi masyarakat	Unit					1					
004	Kampung Perikanan Budi Daya Rumput Laut yang dikembangkan	01-Jumlah Kampung Perikanan Budi Daya Rumput Laut yang dikembangkan	Unit			9		3					
RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan			-	1	11	6	6					
001	Kawasan budidaya rumput laut terintegrasi	01-Jumlah Kawasan budidaya rumput laut terintegrasi	Unit			3	-	-					
002	Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun bagi masyarakat	01-Jumlah Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun bagi masyarakat	Unit		1	2							
003	Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut yang dikembangkan	01-Jumlah laboratorium kultur jaringan rumput laut yang dikembangkan	Unit			6	6	6					
7022	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau								550.414,7	3.747.135	6.786.911	5.585.361	812.295
SK	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau												
ISK1		Jumlah Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke masyarakat	ekor	43.041.521	110.611.709	56.020.010	61.521.223	67.022.236					
ISK2		Jumlah Kampung Budi Daya Ikan Air Payau yang dikembangkan	Unit	-	-	2	3	3					
ISK3		Jumlah Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Ikan Konsumsi Air Payau/Udang yang diproduksi UPT	Unit	39.656.298	88.818.869	53.108.500	59.359.000	65.710.000					
ISK4		Jumlah Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT	Unit	94.670	106.102	116.712	128.383	500.000					
ISK5		Jumlah Unit Usaha budi daya ikan air payau yang dilakukan pembinaan	Unit	207	380	586	614	640					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		sertifikasi											
ISK 6		Jumlah Sampel ikan air payau/pakan ikan/obat ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	sampel	5.003	9.421	10.363	11.399	12.539					
ISK 7		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	Rekomendasi Kebijakan	6	10	10	10	10					
ISK 8		Jumlah Sampel monitoring residu, monitoring penyakit ikan dan surveillance AMR ikan air payau yang diuji	sampel	596	1.270	1.800	2.100	2.400					
ISK 9		Jumlah Kawasan budi daya ikan air payau/udang yang dibangun atau direvitalisasi	Unit	1	1	11	11	15					
ISK 10		Jumlah Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat	unit	25									
ISK 11		Jumlah Infrastruktur Budi Daya Udang yang dibangun	Unit	7	7	7							
BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga			207	-	-	-	-					
001	Unit Pembenihan Ikan yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	01-Jumlah Unit Pembenihan Ikan yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	Lembaga	15									
002	Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	01-Jumlah Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Lembaga	185									
003	Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	01-Jumlah Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	Lembaga	7									
QA B	Pelayanan Publik kepada lembaga			-	380	586	614	640					
004	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau	01-Jumlah Unit Usaha, yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau	Lembaga		380	586	614	640					
BJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit			5.003	9.421	10.363	11.399	12.539					
U01	Sampel Residu Ikan Air Payau Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Residu Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	228									
U02	Sampel Kualitas Air Ikan Air Payau Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Kualitas Air Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	3.127									
U03	Sampel Patologi Ikan Air Payau Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Patologi Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	198									
U04	Sampel Mikrobiologi Ikan Air Payau Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Mikrobiologi Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	680									
U05	Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Payau Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	675									
U06	Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Payau	01-Jumlah sampel nutrisi pakan Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	38									
U07	Sampel Obat Ikan Air Payau	01-Jumlah sampel obat ikan Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	27									
U08	Sampel Mutu Pakan Ikan Air Payau	01-Jumlah sampel mutu pakan Ikan Air Payau yang diuji	Sampel	30									
001	Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Payau	01-Jumlah Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Payau	Sampel		9.234	10.157	11.173	12.290					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
003	Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	01-Jumlah Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	Lembaga	7									
QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga			-	200	100	100	100					
004	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut	01-Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut	Lembaga		200	100	100	100					
BJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit			1.993	1.842	2.494	2.743	3.019					
U01	Sampel Residu Ikan Air Laut Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Residu Ikan Air Laut yang diuji	sampel	54									
U02	Sampel Kualitas Air Ikan Air Laut Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Kualitas Air Ikan Air Laut yang diuji	Sampel	1.314									
U03	Sampel Patologi Ikan Air Laut Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Patologi Ikan Air Laut yang diuji	Sampel	88									
U04	Sampel Mikrobiologi Ikan Air Laut Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Mikrobiologi Ikan Air Laut yang diuji	sampel	324									
U05	Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Laut Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Laut yang diuji	sampel	196									
U06	Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Laut	01-Jumlah sampel nutrisi pakan Ikan Air Laut yang diuji	sampel	17									
001	Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut	01-Jumlah Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut	sampel		1.842	2.494	2.743	3.019					
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			6	-	-	-	-					
001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Air Laut	Rekomendasi Kebijakan	6									
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			-	3	10	10	10					
001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Air Laut	Rekomendasi Kebijakan		3	10	10	10					
QEG	Bantuan Peralatan / Sarana			20	-	-	-	-					
001	Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Sarana budi daya Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat	Unit	20									
002	Kampung Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut yang dikembangkan	01-Jumlah kampung Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut yang dikembangkan	Unit			2	3	3					
QEL	Bantuan Hewan			1.949.063	5.009.127	2.245.000	2.415.000	2.600.000					
U03	Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	ekor	174.574	448.658	250.000	300.000	350.000					
U04	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	ekor	1.774.489	4.560.469	1.995.000	2.115.000	2.250.000					
QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit			145	556	165	175	200					
U01	Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	01-Jumlah Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	Sampel	70	340	80	85	100					
U02	Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/ AMR) yang diuji	01-Jumlah Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba (AMU/ AMR) yang diuji	sampel	75	216	85	90	100					
RAL	RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan			384.654	1.151.752	1.205.000	1.435.000	1.728.000					
001	Calon Induk Unggul Kepiting yang diproduksi	01-Jumlah Calon Induk Kepiting yang diproduksi	Unit	89	5.747	2.000	3.000	5.000					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
002	Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	01-Jumlah Calon Induk Ikan Air Laut yang diproduksi	Unit	10.037	5.612	65.000	75.000	85.000					
003	Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	01-Jumlah pakan ikan yang diproduksi di UPT	Unit	13.927		-	-	60.000					
004	Benih Kepiting yang diproduksi	01-Jumlah Benih Kepiting yang diproduksi	Unit	189.790	341.622	400.000	500.000	600.000					
005	Benih Ikan Laut yang diproduksi	01-Jumlah Benih Ikan Air Laut yang diproduksi	Unit	170.811	773.771	400.000	500.000	600.000					
007	Ikan Konsumsi air laut hasil budi daya yang diproduksi	01-Jumlah Ikan Konsumsi air laut hasil budi daya yang diproduksi	Unit		25.000	338.000	357.000	378.000					
RB Q	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan			1	3	3	3	3					
001	Kluster Komoditas Unggulan Air Laut berbasis kawasan	01-Jumlah Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan yang dikembangkan	Unit	1	3	3	3	3					
7024	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar								80.697,3	49.957	149.994	206.806	211.659
SK	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar												
ISK 1		Jumlah Produksi Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Ikan Konsumsi Ikan Air Tawar di UPT	Unit	7.622.161	3.254.926	12.932.501	14.048.401	15.171.100					
ISK 2		Jumlah Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	ekor	27.163.652	69.730.072	30.564.800	32.368.900	34.373.000					
ISK 3		Jumlah Pakan Ikan Air Tawar yang diproduksi untuk operasional UPT	Unit	147.806	107.122	117.834	129.618	400.000					
ISK 4		Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air tawar	Unit	375	410	455	505	540					
ISK 5		Jumlah Sampel ikan air tawar, pakan dan obat ikan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	sampel	2.960	2.342	4.140	4.558	5.013					
ISK 6		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	6	3	10	10	10					
ISK 7		Jumlah Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	Unit	-	15	21	21	21					
ISK 8		Jumlah Sampel monitoring residu, monitoring penyakit ikan dan Surveillance AMU/AMR ikan air tawar yang diuji	unit	325	1.379	1.850	2.050	2.200					
ISK 9		Jumlah Sarana/Kampung Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	unit	230	-	4	6	6					
ISK 10		Jumlah Kawasan Komoditas Unggulan Air Tawar yang dibangun atau direvitalisasi	unit	-	2	-	2	7					
ISK 11		Jumlah Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar yang dibangun	unit	-	3	3	3	3					
ISK 12		Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi	Produk	38	-	-	-	-					
ISK 13		Jumlah Perikanan budi daya yang berkelanjutan dan bebas	Unit	2	1	1	1	-					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		konversi											
BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga			375	-	-	-	-					
001	Unit Pembenihan Ikan yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	01-Jumlah Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	Lembaga	70									
002	Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	01-Jumlah Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Lembaga	293									
003	Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	01-Jumlah Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	Lembaga	12									
QA B	Pelayanan Publik kepada lembaga			-	380	455	505	540					
001	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air tawar	01-Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air tawar	Lembaga		380	455	505	540					
BJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit			2.960	2.342	4.140	4.558	5.013					
U01	Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Tawar	01-Jumlah sampel nutrisi pakan Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	52									
U02	Sampel Obat Ikan Air Tawar	01-Jumlah sampel obat ikan Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	27									
U03	Sampel Mutu Pakan Ikan Air Tawar	01-Sampel Mutu Pakan Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	49									
U04	Sampel Residu Ikan Air Tawar Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Residu Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	213									
U05	Sampel Kualitas Air Ikan Air Tawar Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Kualitas Air Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	1.917									
U06	Sampel Patologi Ikan Air Tawar Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Patologi Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	89									
U07	Sampel Mikrobiologi Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Mikrobiologi Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	450									
U08	Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Tawar Layanan UPT	01-Jumlah Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	163									
001	Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Tawar	01-Jumlah Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Tawar	sampel		2.300	3.837	4.224	4.646					
002	Sampel Pakan dan obat Ikan Air Tawar	01-Jumlah Sampel Pakan dan obat Ikan Air Tawar	sampel		42	303	334	367					
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			6	-	-	-	-					
001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Air Tawar	Rekomendasi Kebijakan	6									
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			-	3	10	10	10					
001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Air Tawar	Rekomendasi Kebijakan		3	10	10	10					
QEG	Bantuan Peralatan / Sarana			230	-	4	6	6					
001	Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Sarana Budidaya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	Unit	230									
002	Kampung Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar yang dikembangkan	01-Jumlah Kampung Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar yang dikembangkan	Unit			4	6	6					
QEL	Bantuan Hewan			27.163.652	69.730.072	30.564.800	32.368.900	34.373.000					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
U01	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	ekor	54.332	57.561	61.100	64.800	68.600					
U06	Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	ekor	27.108.670	69.669.753	30.500.000	32.300.000	34.300.000					
QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit			325	1.379	1.850	2.050	2.200					
001	Sampel Monitoring Residu Ikan Air Tawar yang diuji	01-Jumlah Sampel Monitoring Residu Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	150	168	800	850	900					
002	Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Tawar yang diuji	01-Jumlah Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	70	255	800	900	950					
U03	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	01-Jumlah Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Tawar yang diuji	sampel	105	956	250	300	350					
RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan			7.769.967	3.362.063	13.050.356	14.178.040	15.571.121					
001	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi	01-Jumlah Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi	Unit	220.326	69.495	247.500	262.400	278.100					
002	Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	01-Jumlah Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional UPT	Unit	147.806	107.122	117.834	129.618	400.000					
003	Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi	01-Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi	Unit	7.401.833	3.185.430	11.000.000	12.000.000	13.000.000					
004	Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	01-Jumlah Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	Unit		15	21	21	21					
005	Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia	Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia	Unit	2	1	1	1	-					
007	Ikan Konsumsi air tawar hasil budi daya yang diproduksi	Jumlah Ikan Konsumsi air tawar hasil budi daya yang diproduksi	Unit			1.685.000	1.786.000	1.893.000					
RB Q	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan			-	3	3	3	3					
001	Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar	01-Jumlah prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar yang dikembangkan	unit		3	3	3	3					
002	Klaster Komoditas Unggulan Air Tawar Berbasis Kawasan	01-Jumlah klaster Komoditas Unggulan Air Tawar Berbasis Kawasan	unit		2		2	7					
ACA	Perizinan Produk			38	-	-	-	-					
003	Pakan dan Obat Ikan diregistrasi	01-Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi	produk	38									
794 1	Pengelolaan Prasarana dan Sarana								-	146.665	384.656	418.667	434.155
SK 1	Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya												
ISK 1		Jumlah Rekomendasi teknis untuk perizinan usaha perikanan budi daya	Produk		-	1.200	1.250	1.300					
ISK 2		Jumlah Peralatan/Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat	Unit		723	880	1.044	1.204					
ISK 3		Jumlah Pengelolaan Saluran Irigasi Perikanan yang disalurkan ke masyarakat	unit		30	100	100	125					
ISK 4		Jumlah Prasarana produksi perikanan Budi Daya di UPT	Unit		1	21	21	21					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		yang dibangun atau direhabilitasi											
ISK 5		Jumlah Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina	Lembaga		20	27	28	29					
ISK 6		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya yang disusun	Rekomendasi Kebijakan		3	10	10	10					
SK 2	Peningkatan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)												
ISK 1		Jumlah Rekomendasi bidang lahan pembudidaya ikan yang akan disertifikasi	Orang		1.000	2.000	2.000	2.000					
ISK 2		Jumlah Pembudidaya skala kecil yang terlindungi usahanya	orang		375	800	800	1.000					
SK 3	Pemberdayaan kelembagaan ekonomi pembudidaya ikan melalui fasilitasi penguatan usaha												
ISK 1		Jumlah Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan	Kelompok Masyarakat		3	10	13	15					
ACA	Perizinan Produk			-	-	1.200	1.250	1.300					
001	Rekomendasi teknis untuk perizinan usaha perikanan budi daya	01-Jumlah Rekomendasi teknis untuk perizinan usaha perikanan budi daya	Produk			1.100	1.100	1.100					
002	Pakan dan Obat Ikan diregistrasi	01-Jumlah Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi	produk			100	150	200					
RB Q	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan			-	31	121	121	146					
002	Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAF)	01-Jumlah Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif	Unit		30	100	100	125					
004	Prasarana produksi perikanan budi daya di UPT	01-Jumlah prasarana produksi perikanan budi daya di UPT	Unit		1	21	21	21					
005	Pembangunan Unit Pelaksana Teknis	01-Jumlah Pembangunan Unit Pelaksana Teknis	Unit										
QE A	QEA-Bantuan Masyarakat			-	375	800	800	1.000					
001	Pembudidaya rumput laut skala kecil yang terlindungi usahanya	01-Jumlah Pembudidaya rumput laut skala kecil yang terlindungi usahanya	Orang		42	200	200	100					
002	Perlindungan usaha budi daya skala kecil	01-Jumlah Perlindungan usaha budi daya skala kecil	Orang		333	600	600	900					
QA B	Pelayanan Publik kepada lembaga			-	20	27	28	29					
001	Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	01-Jumlah Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	Lembaga		20	27	28	29					
QD C	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			-	1.000	2.000	2.000	2.000					
001	Rekomendasi bidang lahan budi daya yang akan disertifikasi	01-Jumlah rekomendasi bidang lahan budidaya ikan yang akan disertifikasi	Orang		1.000	2.000	2.000	2.000					
QE G	Bantuan Peralatan / Sarana			-	502	880	1.044	1.204					
001	Sarana Budi Daya Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Sarana budidaya ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat	Unit		12	480	590	700					
002	Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Sarana budi daya Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat	Unit		50	50	54	54					

RENSTRA DJPB 2025 - 2029													
KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME					ANGGARAN (Rp.Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
003	Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	01-Jumlah Sarana Budidaya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	Unit		440	350	400	450					
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			-	3	10	13	15					
001	Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan	01-Jumlah Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan	Kelompok Masyarakat		3	10	13	15					
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			-	3	10	10	10					
001	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya	Rekomendasi Kebijakan		3	10	10	10					

2. MATRIKS PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PSN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam miliar rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam miliar rupiah)					Total (dalam miliar rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KP : Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) ProP: Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan Perikanan Budi Daya dan Revitalisasi Tambak Rakyat ^{a*}	6,75	7,15	7,58	8,04	8,52	-	200	400	400	400	-	5.000	7.400	7.400	4.800	-	5.200	7.800	7.800	5.200	-

Keterangan:
a* : Indikasi Pendanaan Proyek Strategis Nasional Revitalisasi Tambak Pantura

3. KERANGKA REGULASI PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN 2025-2029

REGULASI	URGENSI	TARGET PENYELESAIAN	PIC
Permen KP Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan	Perlu adanya pengaturan sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi sektor perikanan	2025	Dit. Prasarana dan Sarana
Permen KP tentang Tata Kelola Pemanfaatan Air dan Lahan Pembudidayaan Ikan	Amanah Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan	2026	Dit. Prasarana dan Sarana
Permen KP tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan	Tindak lanjut dikeluarkan/tidak diakomodir perizinan rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau obat ikan didalam PP Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko karena merupakan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) & peralihan kewenangan sertifikasi bidang obat ikan (CPOIB & CDOIB) ke BP2MHKP (tidak di DJPB)	2026	Dit. Prasarana dan Sarana
Permen KP tentang Alat dan Mesin untuk Pembudidayaan Ikan.	Amanah Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan	2026	Dit. Prasarana dan Sarana